

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PERUMUSAN  
PROGRAM KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
GAMPONG ACEH DALAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN PADA TAHUN 2018-2019**

*Analysis of Maqashid Sharia in the Formulation of Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Work Program in Poverty  
Alleviation in 2018-2019*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari  
Program Studi Ekonomi Islam



ACC Munaqosah

8 Okt 2020

Oleh :  
DEWI SUCI KHAIRANI  
16423147

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Suci Khairani  
Nim : 16423147  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Analisis Maqashid Syariah Dalam Perumusan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Tahun 2018-2019

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2020



Dewi Suci Khairani

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 4 November 2020  
Nama : DEWI SUCI KHAIRANI  
Nomor Mahasiswa : 16423147  
Judul Skripsi : Analisis Maqashid Syariah dalam Perumusan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh dalam Penanggulangan Kemiskinan pada Tahun 2018-2019

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Junaidi Safitri, SEI, MEI

(.....)

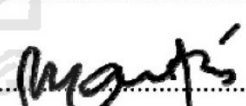
#### Penguji I

Dr. Siti Achiria, SE, MM

(.....)


#### Penguji II

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....)

#### Pembimbing

Soya Sobaya, SEI, MM

(.....)

Yogyakarta, 4 November 2020

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Hal :Skripsi  
Kepada :Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Berdasarkan penunjukkan Dekan Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 572/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama :Dewi Suci Khairani  
No.Mahasiswa :16423147  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam  
Program Studi :Ekonomi Islam  
Tahun Akademik/Konsentrasi :2020/2021 / Keuangan Publik Islam  
Judul Skripsi :Analisis Maqashid Syariah Dalam Perumusan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Tahun 2018-2019

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Oktober 2020  
Dosen Pembimbing

  
Soya Sobaya S.E.I, M.M

## **PERSEMBAHAN**

Sujud syukur kepada Allah SWT, yang Maha Esa, Dzat yang Maha Agung dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta Bapak Sayuti Ar dan Ibu Nurlaili, kakak perempuan Katiya Nahda, kakak laki-laki M. Avga Fadlisyah dan sahabat-sahabat.



## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

-QS. Al-Ra'd, 13:11-

*“Bahwa seseorang yang belum memahami atau peka dengan benar tentang tujuan diberlakuknya syariat, makai ia belum punya kewenangan untuk menetapkan hukum.*

-Al-Juwaini (w. 478 H)-



## ABSTRAK

### **ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PERUMUSAN PROGRAM KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT *GAMPONG* ACEH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA TAHUN 2018-2019**

**DEWI SUCI KHAIRANI  
16423147**

Di Indonesia khususnya Provinsi Aceh juga masih banyak terdapat masyarakat miskin dan juga membutuhkan penanggulangan. Oleh karena itu, upaya dalam menanggulangi kemiskinan menjadi tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) Aceh. DPMG Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok DPMG Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat *gampong* serta tugas pembantuan lainnya. DPMG menanggulangi kemiskinan melalui program-program kegiatan pemberdayaan. Agar program-program kegiatan yang dirumuskan berdampak, berkelanjutan, dan mendapatkan masalah harus menggunakan indikator *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses perumusan program kerja dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* Aceh jika diukur dengan perspektif *Maqashid Syariah*. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perumusan program kerja dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* Aceh perspektif *Maqashid Syariah*. Obyek dalam penelitian ini adalah program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* Aceh yaitu program peningkatan keberdayaan masyarakat *Gampong* dan program pengembangan Lembaga ekonomi *Gampong*. Sedangkan subyek penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat *gampong* Aceh. Dalam menjawab permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan program kerjanya sudah sesuai dengan indikator *Maqashid Syariah* dengan menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, serta menghilangkan kesulitan dan kesusahan, dan menjaga dan memelihara.

Kata kunci: Kemiskinan, Penangulangan, DPMG, Program

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF MAQASHID SHARIA IN THE FORMULATION OF DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG ACEH WORK PROGRAM IN POVERTY ALLEVIATION IN 2018-2019**

**DEWI SUCI KHAIRANI  
16423147**

Indonesia especially in Aceh province there are many poor society that need prevention. Therefore, the effort to reduce poverty are the main duty of Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) of Aceh. DPMG Aceh is a regional apparatus as a supporting element of the Aceh Government in the Community Empowerment Sector which is under and responsible to the Governor of Aceh through the Regional Secretary. The main duties of DPMG Aceh are to carry out government and development affairs in the field of governance, development and empowerment of villages (gampong) as well as other duty. DPMG alleviates poverty through empowerment activities programs. In order for activity programs formulated to have an impact, be sustainable, and get masalah, they must use the Maqashid Syariah By indicator. The problem in this research is how the process of formulating work programs in poverty reduction at dinas pemberdayaan masyarakat gampong in Aceh. if measured by the perspective of Maqashid Syariah. The aims of this study to determine and analyze the formulation of work programs in poverty reduction in dinas pemberdayaan masyarakat gampong of Aceh according to the Islamic Maqashid perspective. The object of this research is the work program of Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, namely a program to increase village community empowerment and a program to develop village economic institutions. While the subjects of this study were employees of Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong. In answering the problems raised, this study uses qualitative research methods with a descriptive research approach. The results showed that the preparation of work programs in accordance with the indicators of maqashid sharia by guarding religion, guarding reason, guarding the soul, safeguarding property, safeguarding descendants, as well as eliminating difficulties and troubles, and protecting and preserving.

Key word: Poverty, Alleviation, DPMG, Program



# PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 158 Th.1987  
Nomor: 05436/U/1987

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اِىَ...َ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ى	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...و	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

#### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'

#### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجَّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazalla	نُعَمَّ - nu''ima
الْبَيْرَ - al-birr	

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

##### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	الْقَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدُ - as-sayyidu	الْبَدِيعُ - al-badī'u
الشَّمْسُ - as-syamsu	الْجَلَالُ - al-jalālu

#### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna	إِنَّ - inna
الْمَنْوَأُ - an-nau'	أُمِرْتُ - umirtu
سَيِّئٌ - syai'un	أَكَلٌ - akala

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ رَازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl
	Ibrāhīm al-Khalīl

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَاصِرًا مِّنَ اللَّهِ فَتَحَ الْقُرْآنَ بِإِذْنِ رَبِّهِ نَاصِرًا Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

اللَّهُ الْأَمْرُ الْجَامِعُ Lillāhi al-amru jamī’an

Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai’n ‘alīm

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas seluruh nikmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Maqashid Syariah Dalam Perumusan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Tahun 2018-2019” sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, serta umatnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
4. Ibu Soya Sobaya S.E.I., M.M, selaku ketua Program Studi Ekonomi Islam dan selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak atau Ibu dosen dan staff Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu, kakak, keluarga besar, dan teman-teman yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



7. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang telah memberikan seluruh keterangan dan informasi yang dibutuhkan.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu pesartu atas bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam karya sederhana ini. Maka dengan ini penulis sangat mengharapkan dan menerima dengan terbuka atas kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaatn bagi akademisi, praktisi, pemerintah, masyarakat. Amin Ya Rabbal Alamin.



Yogyakarta, 13 Oktober 2020

Dewi Suci Khairani

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Telaah Pustaka.....	8
B. Landasan Teori .....	17
1. <i>Maqashid Syariah</i> .....	17
2. Program Penanggulangan Kemiskinan.....	23
3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	30
C. Kerangka Berpikir .....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39

A.	Desain Penelitian .....	39
B.	Lokasi Penelitian .....	39
C.	Waktu Pelaksana Penelitian .....	39
D.	Objek dan Subyek Penelitian .....	39
E.	Populasi dan Sampel .....	39
F.	Sumber Data .....	40
G.	Teknik Pengumpulan Data .....	41
H.	Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	42
I.	Instrumen Penelitian .....	43
J.	Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>46</b>
A.	Gambaran Umum DPMG Aceh .....	46
1.	Profil DPMG Aceh .....	46
2.	Visi dan Misi .....	47
3.	Struktur Organisasi .....	49
B.	Perumusan Program kerja dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat <i>Gampong</i> Aceh Menurut Perspektif Maqashid Syariah.....	51
1.	Tahapan Perumusan Program .....	52
2.	Program di DPMG Aceh.....	56
3.	Rencana Strategis.....	77
4.	Kendala dan Solusi .....	77
5.	Pengukuran capaian Kinerja .....	79
6.	Maqashid Syariah .....	82
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>96</b>
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan dilakukan .....	13
Tabel 3.1 Daftar Sampel Penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh .....	40
Tabel 3.2 Variabel Definisi Konseptual dan Variabel Definisi Operasional .....	43
Tabel 4.1 Perumusan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh .....	56
Tabel 4.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	79
Tabel 4.3 penggunaan <i>Maqashid Syariah</i> di Program-program Dinas Pemberdayaan Masyarakat <i>Gampong Aceh</i> .....	83



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Tahapan Penyusunan Program dan Kegiatan.....	29
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 3.1 Alur Analisis data:Model Interaktif .....	45
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPMG Aceh.....	50
Gambar 4.2 Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan .....	51
Gambar 4.3 Grafik Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	51
Gambar 4.4 Bagan Perumusan Program Kegiatan.....	52



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan Negara Indonesia telah di cantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi atau ditingkatkan jika kemiskinan dapat dikurangi. Sedangkan di Indonesia, kemiskinan menjadi masalah yang kompleks bagi pemerintah Indonesia dari zaman orde lama, orde baru, sampai masa sekarang masih menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Berbagai analisa, strategi, dan metode dilakukan untuk menghilangkan kemiskinan di negara Indonesia. Akan tetapi dari data menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat miskin. Meskipun demikian, tidaklah pemerintah menjadikan kemiskinan sebuah justifikasi atau untuk membiarkan ini terus terjadi di negara Indonesia (Ala, 1981).

Pembahasan tentang kemiskinan tidak ada habisnya dimulai dari penyebab, penanggulangan, dan caranya tidak serta merta bisa langsung diselesaikan. Dilihat dari jumlah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seharusnya sangat cukup melepaskan rakyatnya dari kemiskinan serta mengsejahterakannya. Dengan potensi dan seluruh kekayaan yang dimiliki, sebenarnya masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera dan layak. ironisnya, kondisi masyarakat sangat jauh dari yang diharapkan atau diinginkan. Sampai sekarang ini, kemiskinan menjadi permasalahan yang serius ditengah-tengah potensi dan kekayaan alam yang berlimpah (Mafruhah, Haryatiningsih, & Haviz, 2016).

Di dalam Agama Islam juga menganjurkan untuk melakukan penanggulangan kemiskinan agar yang melakukannya menjadi orang yang

bertaqwa. Jadi salah satu untuk menjadi orang bertaqwa harus membantu orang miskin agar bisa hidup dengan layak (Azizy, 2004).

Selama ini pemerintah Indonesia telah banyak melaksanakan program untuk penanggulangan kemiskinan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti pemberian bantuan, beras raskin, asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin), dan bantuan langsung tunai (BLT). Tetapi hal ini belum mampu membantu masyarakat dalam mengatasi kemiskinan (Miradj & Sumarno, 2014).

Berkaitan dengan kondisi kemiskinan di negara Indonesia, maka pemberdayaan masyarakat menjadi fokus pemerintah dan salah satu solusi yang tepat untuk permasalahan yang terjadi terutama tentang ekonomi. Pemberdayaan masyarakat pun dilakukan oleh berbagai elemen dari pemerintah, dunia usaha, universitas, dan masyarakat sendiri melalui Organisasi Masyarakat Sipil. Meskipun setiap elemen memiliki cara penanggulangan atau strategi yang berbeda, tetapi program pemberdayaan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menyelesaikan atau mengurangi masalah sosial yang ada. Implementasi pemberdayaan masyarakat tidak sama antara satu konteks masyarakat dengan konteks masyarakat yang lain. Secara umum dapat diketahui bahwa pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan dan berbagai macam program pemberdayaan dan perlindungan sosial (Musa, 2017).

Pemberdayaan atau bisa juga disebut *empowerment* merupakan bagian konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan lain-lainnya yang bercirikan *people centered, participatory, empowering, and sustnaible*, atau dengan kata lain bisa dikatakan pemberdayaan yaitu membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangunkan kesadaran akan potensi yang ada di diri masyarakat serta upaya perubahannya ke hal yang positif. Jadi, memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan lapisan masyarakat menjadi lebih baik dan bermatabat dari dari kondisi yang tidak mampu dari segi ekonomi atau

kemiskinan dan ketertinggalan, upaya untuk memampukan atau memandirikan masyarakat (Musa, 2017).

Menurut Gunawan Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat secara umum menuju pada dua arah, yaitu: Pertama, untuk melepaskan dari belenggu kemiskinan atau keterbelakangan. Kedua, untuk mempererat masyarakat dalam struktur organisasi. Untuk mencapai dua sasaran tersebut maka pemberdayaan masyarakat membutuhkan beberapa tahapan, yaitu: (1) inisial: dari pemerintah, dilakukan oleh pemerintah dan untuk rakyat, (2) partisipatoris: dilakukan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan untuk rakyat, (3) Emansipatori: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian, peran pemerintah dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri sangat dibutuhkan, maka pemerintah setempat harus selalu berinisiasi dalam pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 1998).

Pemberdayaan yang menjuru pada kemaslahatan bagi semua makhluk hidup menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan dan direncanakan sesuai dengan syariah islam, karena jika pemberdayaanya tidak di proses dengan baik maka hal tersebut akan menjadi sia-sia atau mubadzir bagi pelaku pemberdayaan.

Pemberdayaan yang tepat harus mampu mengembangkan potensi masyarakat, meningkatkan potensi masyarakat, dan melindungi atau menjaga orang lemah supaya tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang kuat (Mardikanto, 2010). Karena itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjadikan masyarakat mandiri bukan bergantung pada pihak lain. Tetapi melihat kenyataan yang ada justru masih banyak program pemberdayaan masyarakat yang menjadi ketergantungan dan tidak mandiri.

Kesejahteraan yang ingin dicapai setiap individu tidak bisa dipenuhi oleh kekuatan dan kesadaran personal. Kesejahteraan yang ingin dicapai oleh masyarakat dibutuhkan kekuatan yang lebih besar melalui negara dan pemerintah. Negara harus mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dengan



kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki sehingga dapat menghindari ketimpangan sosial atau kemiskinan (Kansil, 2001).

Di dalam Islam mengajarkan bahwa dalam organisasi manusiawi atau institusi harus meralisasikan nilai spritual yang sesuai dengan Syariah Islam. Pemerintah adalah instrumen masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang diinginkan. Oleh karena itu, negara harus bisa mewujudkan kesejahteraan dan menerima aspirasi masyarakatnya (Rofiq, 1997). Konsep kesejahteraan islam sendiri harus diukur dengan indikator yang sesuai dengan Syariah islam agar tatanan yang diberikan lebih efisien dan efektif. Salah satu pengukuran yang Syariah yaitu dengan *maqashid Syariah* yang selalu dihubungkan dengan kemaslahatan.

Dalam hukum islam istilah *Maqashid syari'ah* merupakan konsep yang sangat penting dalam islam, inti dari teori *maqashid syariah* yaitu untuk mencapai kebaikan atau menghindarkan dari keburukan, atau juga bisa untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudharat. *Maqashid syariah* bisa disamakan dengan istilah lain yaitu maslahat, karena setiap penepatan hukum dalam islam pasti akan bermuara kepada maslahat (Shidiq, 2009).

Untuk Indonesia khususnya provinsi Aceh, masih ada warga miskin yang harus di tanggulangi. Fakta yang ditemukan di masyarakat provinsi Aceh yaitu masih banyak pendapatan yang di dibawah upah minimum, yang mana ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Sehingga upaya untuk menanggulangi kemiskinan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh.

Berdasarkan data BPS Provinsi Aceh untuk persentase kemiskinannya menurun 0.67% dari tahun 2018 ke tahun 2019, untuk persentase kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2019 mencapai 15.01%, atau 809.76 ribu orang, sedangkan untuk tahun 2018 mencapai 15.68 % atau 831.50 ribu orang. Jadi, berdasarkan data yang ada masih banyak masyarakat miskin untuk Provinsi Aceh. Oleh karena itu, dibutkan instansi pemerintah untuk melakukan kebijakan dalam penannggulangannya (Nasional, 2020).

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh DPM. Dapat diketahui bahwa salah satu visi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* Aceh ingin memperkuat Syariah islam di dalam kehidupan masyarakat. Peraturan di Aceh menggunakan *Qanun Aceh*, begitu juga di DPMG menggunakan Qanun Aceh. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah tetapi tidak boleh bertentangan dengan Syariah Islam karena qanu bersumber dari agama islam mengatur penyelenggaraan pemerinthan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

Dalam mengatasi kemiskinan pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan, salah satu instusi pemerintah yang melakukan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* Aceh. Sesuai dengan visinya yaitu mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.

Berdasarkan penelitian pra survei dari Laporan Kinerja (LKJ) DPMG Aceh tahun 2019 dan 2018 terdapat beberapa Program Kerja yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan. Sebagai salah satu Lembaga Pemerintahan yang sudah memiliki beberapa program yang telah berjalan di Masyarakat dan *Gampong* dan juga salah satu Lembaga di Aceh yang tidak bertentangan dengan Syariah. Oleh karena itu, topik penelitian ini yaitu bagaimana proses dari perumusan program kerja dilakukan apakah sudah sesuai dengan perspektif *Maqashid Shariah*.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah bagaimana perumusan program kerja dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* menurut perspektif *Maqashid* Syariah.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis perumusan program kerja dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong menurut perspektif Maqashid Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan baru pada umumnya, dan pada khususnya dapat memberikan informasi mengenai perumusan program kerja dinas pemberdayaan masyarakat Gampong Aceh dalam penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan maqashid Syariah.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman tentang program kerja pemerintah yang baik dan cara penanggulangan kemiskinan.
- b. Bagi akademisi, dapat memberikan tambahan referensi khususnya dalam bidang ilmu *maqasid Syariah*.
- c. Bagi pemerintah, dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana perumusan program kerja pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdapat lima bab, setiap bab untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan ke dalam sub bab. Berikut ini adalah sistematika penulisan.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah telaah pustaka dan landasan teori, yang berisi tentang pembahasan tentang penelitian-penelitian terdahulu terkait pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Pada bab ini juga memuat

pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat. penanggulangan kemiskinan, dan analisis maqashid Syariah yang menjadi landasan dalam studi penelitian.

Bab III adalah metode penelitian, yang membahas tentang tata cara pelaksanaan penelitian. Prosedur penelitiannya berisi desai penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, obyek penelitian, sampel, sumber data, Teknik pengumpulan data, definisi konseptual variabel dan definsini operasional variabel, instrumen penelitian, dan Teknik analisi data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini membahas tentang perumusan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan analisis *maqashid Syariah*.

Bab V adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari peneliti yang bersifat konstruktif pada pihak yang terkait di dalamnya.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Ekarina Katmas, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam Perspektif Maqashid Syariah” pada tahun 2018. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa konsep program pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam berbentuk bantuan tunai bersyarat dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum tujuan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan perbaikan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Adapun sasaran program adalah para wanita dan anak-anak dengan kriteria tertentu yang didasarkan pada ketentuan pemerintah pusat maupun daerah. Analisis dengan pendekatan maqashid Syariah menemukan bahwa secara konsep, implementasi, dan implikasi program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam telah merealisasikan maqashid Syariah yaitu pemeliharaan agama melalui dukungan kegiatan keagamaan dan silaturahmi, akal melalui akses pendidikan dan perubahan pola, pemelihara jiwa melalui akses kesehatan, pemeliharaan keturunan penjagaan atas kesehatan dan keselamatan ibu dan anak, pemeliharaan harta peningkatan sektor ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian Jusmal yang berjudul “Pengentasan Kemiskinan di Desa Pammesakkang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif *Maqashid Al-Syariah*” pada tahun 2020. Di dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan PKH di Desa Pammesakkang dalam upaya pengentasan kemiskinan sejak tahun 2016 sampai 2019 telah berjalan baik. Dalam pelaksanaan program tersebut, tampak bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan berupa peningkatan kesadaran menjaga Kesehatan, dan kemampuan meningkatkan pendidikan bagi anak usia didik, menunjukkan bahwa *al-kuliyat al-khamsah* terpenuhi, dengan terpenuhinya

kelima aspek *al-kuliyat al-khamsah* tersebut, maka dari perspektif *maqashid al-syariah* program tersebut berjalan dengan baik.

Dalam penelitian Abdul Rohman yang berjudul “Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten dalam Perpektif Maqashid Syariah” pada tahun 2019. Dapat diketahui bahwa program pengentasan kemiskinan di desa Banjarsari kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk mengedepankan menjaga harta (*al-mal*) karena apabila tidak ada bantuan uang maka nyawanya akan terancam (*an-nafs*) serta (*al-aql*) untuk biaya sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk program pengentasan kemiskinan yang secara langsung diberikan kepada penerima dapat memberikan penghasilan yang berdampak pada kebutuhan dasar peningkatan kesehatan terjadi setelah adanya program pengentasan kemiskinan dapat menguunjungi pukesmas, peningkatan status gizi anak, dan menurunnya tingkat kematian ibu dan anak. Di setiap indikator tersebut patokan dalam membuat kebijakan di seluruh bagian pemerintahan, perekonomian, kependudukan dan kemasyarakatan. Tujuannya adalah demi mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat yang tetap berlandaskan pada program pengentasan kemiskinan dan sosial ekonomi.

Reza Fachrudin, dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan” pada tahun 2015. Dapat diketahui bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah Kota Balikpapan sangat tepat, hal ini dikarenakan kebijakan penanggulangan kemiskinannya terintegrasi dengan kebijakan makro pembangunan Kota Balikpapan. Dari segi atau sudut konten/isi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kota Balikpapan, maka bisa dikatakan sangat baik. Dimana pemerintah Kota Balikpapan melalui produk kebijakan penanggulangan kemiskinan berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang penanggulangan kemiskinan secara ketentuan telah dapat mengakomodir kebutuhan warga miskin dan dapat meningkatkan pendapatan warga miskin. Untuk realisasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan dalam dewasa ini masih jauh dari kata berhasil.

Dalam penelitian Nurmasiyah dan Mislinawati yang berjudul “Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan” pada tahun 2017. Di dalam penelitiannya dapat diketahui bahwa pemerintah melakukan berbagai kebijakan lintas sektorak dalam mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan telah dirancang berbagai program pembinaan sumberdaya manusia dan sekaligus memperbaiki tingkat kesejahterannya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih pemeratakan akses seluruh masyarakat terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu perlu adanya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat miskin yang relative tertinggal dan belum beruntung dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Juli Panglima Saragih (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam penelitian ini menggunakan metode descriptive yaitu dengan menganalisis data sekunder yang relevan dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DIY terus melakukan upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk, dari keterbatasan dan keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat DIY membuat mereka sendiri sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan kemiskinan.

Supriadi (2017) dalam penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan di Kota Palopo” menggunakan penelitian kualitatif, menjelaskan data secara deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan sebagai berikut: pertama, peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan program Khilan menunjukkan dua kategori yaitu penumbuhan iklim usaha dan penguatan potensi atau daya usaha. Penumbuhan iklim usaha meliputi pendanaaa, sarana & prasarana, informasi usaha, perizinan usaha dan promosi dagang. Sedangkan untuk penguatan potensi atau daya meliputi produksi dan pengolahan, pemasaran, serta sumber daya manusia. Kedua, faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin melalui program khilan di Kota Palopo meliputi fsktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat kurangnya

inovasi dalam pemasaran dan terbatasnya anggaran yang hanya sekian persen, sedangkan faktor pendukung sumber daya manusia dan sumber daya alam melimpah.

Nur Inta (2019) dalam penelitian yang berjudul “Usaha Tenun (Panette) Sutra Mandar: Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada masyarakat Desa Tammangalle Kabupaten Polewali Mandar)” penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, Metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berupaya dalam pemberdayaan perempuan dengan cara mendirikan sebuah pelatihan atau kelompok tenun dan memberikan modal agar perempuan penenun memiliki usahanya sendiri dan bisa memperbaiki kualitas diri. Selanjutnya dalam pandangan ekonomi Islam bahwa pemberdayaan perempuan ini berdasarkan pada ajaran agama Islam, bahwasanya bekerja itu juga dinilai sebagai kebaikan, karena dengan bekerja dapat juga mencari ridho Allah SWT, mencari reski serta meningkatkan kesejahteraan hidup.

Aldus Mahioborang (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Kemiskinan Nelayan (Suatu Studi di Kabupaten Sangihe)” jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pembahasannya menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk para nelayan belum dapat mengangkat tingkat kehidupan bagi masyarakatnya. Kemiskinan yang terjadi di lapangan dikarenakan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan maupun infrastruktur. Masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat berhubungan dengan pola hidup masyarakat yang masih bersifat tradisional.

Ade Yunita Mafruhah, Ria Haryatiningsih, dan Meidy Haviz (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Islam”. Jenis penelitian ini adalah penelitian



kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan. Berdasarkan dari hasil kajian pustaka penelitian ini adalah bahwa terdapat dua solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia menurut perspektif Islam. Pertama, dilakukan dengan cara pengelolaan kemiskinan sipiritual dengan cara meningkatkan pembinaan akidah Tauhid dan azkiyatun nafs. Kedua, dilakukan pengelolaan kemiskinan material dengan tiga kaedah:kaedah wajib, kaedah wajib aradhi dan kaedah sunnah.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Dilakukan

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ekarina Katmas, 2018, Analisis Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam Perspektif Maqashid Syariah	Analisis dengan pendekatan maqashid Syariah menemukan bahwa secara konsep, implementasi, dan implikasi program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam telah merealisasikan maqashid Syariah yaitu pemeliharaan agama melalui dukungan kegiatan keagamaan dan sliturahmi, akal melalui akses pendidikan dan perubahan pola, pemelihara jiwa melalui akses kesehatan, pemeliharaan keturunan penjagaan atas kesehatan dan keselamatan ibu dan anak, pemeliharaan harta peningkatan sector ekonomi masyarakat.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi obyek penelitian. Pada penelitian ini, obyek penelitian Program Kecamatan Tayando Tam, sedangkan obyek penelitian yang akan dilakukan program DPMG.

2	Jusmail, 2020, Pengentasan Kemiskinan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maqashid al-Syari'ah	Pelaksanaan PKH di Desa Pammesakang dalam upaya pengentasan kemiskinan sejak tahun 2016 sampai 2019 telah berjalan baik. Dalam pelaksanaan program tersebut, tampak bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan berupa peningkatan kesadaran menjaga Kesehatan, dan kemampuan meningkatkan pendidikan bagi anak usia didik, menunjukkan bahwa <i>al-kuliyat al-khamsah</i> terpenuhi, dengan terpenuhinya kelima aspek <i>al-kuliyat al-khamsah</i> tersebut, maka dari perspektif <i>maqashid al-syariah</i> program tersebut berjalan dengan baik.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada obyek penelitian, obyek penelitian ini adalah pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Pammesakang Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, sedangkan obyek penelitian ini adalah perumusan program kerja penanggulangan kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat <i>Gampong Aceh</i> .
3	Abdul Rohman, 2019, Analisis Program Pengentasan Kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Dalam Prespektif Maqashid Shariah.	Program pengentasan kemiskinan di desa Banjarsari kecamatan ngronggot kabupaten nganjuk mengedepankan menjaga harta (al-mal) karena apabila tidak ada bantuan uang maka nyawanya akan terancam (an-nafs) serta (al-aql) untuk biaya sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk program pengentasan kemiskinan yang secara langsung diberikan kepada penerima dapat	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada obbyek penelitian, obyek penelitian ini adalah program pengentasan kemiskinan di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, sedangkan obyek penelitian ini adalah perumusan program kerja penanggulangan kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat <i>Gampong Aceh</i> .

		<p>memberikan penghasilan yang terdampak pada kebutuhan dasar peningkatan kesehatan terjadi setelah adanya program pengentasan kemiskinan dapat menguunjungi pukesmas, peningkatan status gizi anak, dan menurunnya tingkat kematian ibu dan anak. Di setiap indikator tersebut patokan dalam membuat kebijakan di seluruh bagian pemerintahan, perekonomian, kependudukan dan kemasyarakatan.</p>	
4	<p>Reza Fachrudi, 2015, Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan.</p>	<p>kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah Kota Balikpapan sangat tepat, hal ini dikarenakan kebijakan penanggulangan kemiskinannya terintegrasi dengan kebijakan makro pembangunan Kota Balikpapan.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini di obyek penelitian. Obyek penelitian ini pada evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan. Sedangkan penelitian yang akan digunakan program kerja DPMG.</p>
5	<p>Nurmasyitah dan Mislinawati, 2017, Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan.</p>	<p>Dalam rangka program pengentasan kemiskinan telah dirancang berbagai program pembinaan sumberdaya manusia dan sekaligus memperbaiki tingkat kesejahterannya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih pemeratakan akses seluruh masyarakat terhadap proses</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian yang akan digunakan penelitian kualitatif deskriptif.</p>

		pembangunan dan hasil-hasilnya.	
6	Juli Panglima Saragih, 2015, Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Pemerintah DIY terus melakukan upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk, dari keterbatasan dan keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat DIY membuat mereka sendiri sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan kemiskinan	Perbedaan penelitian ini terletak pada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sekunder, sedangkan penelitian yang akan digunakan primer dan sekunder.
7	Supriadi, 2017, Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan di Kota Palopo.	Pertama, Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Khilan dapat dikategorisasi secara umum menjadi dua peran yaitu penumbuhan iklim usaha dan penguatan potensi atau daya usaha, Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat miskin melalui program khilan di Kota Palopo meliputi faktor penghambat dan pendukung.	Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian. Obyek penelitian ini adalah program khilan di Kota Palopo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan program kerja di DPMG.
8	Nur Inta, 2019, Usaha Tenun (Panette) Sutra Mandar: Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada	Pemerintah berupaya dalam pemberdayaan perempuan dengan cara mendirikan sebuah pelatihan atau kelompok tenun dan memberikan modal agar perempuan penenun memiliki usahanya sendiri dan bisa memperbaiki kualitas diri. Selanjutnya dalam	Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dan normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan

	masyarakat Desa Tammangalle Kabupaten Polewali Mandar).	pandangan ekonomi islam bahwa pemberdayaan perempuan ini berdasarkan pada ajaran agama islam, bahwasanya bekerja itu juga dinilai sebagai kebaikan, karena dengan bekerja dapat juga mencari ridho Allah SWT., mencari reski serta meningkatkan kesejahteraan hidup.	pendekatan penelitian deskriptif.
9	Aldus Mahioborang, 2015, Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Kemiskinan Nelayan (Suatu Studi di Kabupaten Sangihe).	upaya yang dilakukan pemerintah untuk para nelayan belum dapat mengangkat tingkat kehidupan masyarakatnya. Kemiskinan yang terjadi di lapangan dikarenakan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan maupun infrastruktur. Masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat berhubungan dengan pola hidup masyarakat yang masih bersifat tradisional.	Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian, obyek penelitian ini adalah peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan obyeknya adalah program kerja DPMG.
10	Ade Yunita Mafruhah, Ria aryatiningsih, dan Meidy Haviz, 2016, Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Islam.	terdapat dua solusi pengentasan kemiskinan di Indonesia menurut perspektif Islam. Pertama, dilakukan dengan cara pengelolaan kemiskinan sipiritual dengan cara meningkatkan pembinaan akidah Tauhid dan azkiyatun nafs. Kedua, dilakukan pengelolaan kemiskinan material dengan tiga	Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif.

		kaedah:kaedah wajib, kaedah wajib aradhi dan kaedah sunah.	
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap program tujuannya untuk mengsejahterakan masyarakat, yang berbeda dari penelitian penulis dengan penelitian lain adalah Lembaga pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong Aceh*, dan penulis membahas bagaimana perumusan program dalam penanggulangan kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong Aceh* pada tahun 2018-2019, kemudian dianalisis apakah sesuai dengan perspektif *Maqashid Shariah*.

## B. Landasan Teori

### 1. *Maqashid Syariah*

#### a. Pengertian dan Kandungan *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan kata *Syariah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a* *yasyra'u* *syar'an* yang berarti membuat undang-undang atau *shari'at*. (Umar, 2007)

Secara terminologi *syari'ah* ada beberapa pendapat. Salah satunya menurut (fyzee, 1981) menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *canon law of Islam*, yaitu isi keseluruhannya itu berupa perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan (Effendi, 1990) menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah *al-nushush al-muqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan al-Hadits yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia. Begitulah arti dari kata *syari'ah*, akan tetapi menurut ulama-ulama mutakhirin telah terjadi penyempitan makna *syari'ah*. Sedangkan pendapat lain dari (al-Sayis, 1970) menjelaskan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya yang harus dipercayai dan diamalkan untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Berikut pengertian *Maqashid Shariah* yang dikemukakan para ulama terdahulu antara lain:

1) Alal al-Fasi

*Maqashid Syariah* adalah tujuan pokok yang harus ditaati yang telah ditetapkan oleh Tuhan pada hukum Allah dari Al-Quran, hadits, ijma', dan qiyas untuk kemaslahatan umat, selain itu tidak bisa dikategorikan sebagai kemaslahatan umat (Wehr, 1980).

2) Abdul Wahab Khallaf

Tujuan Allah dari menciptakan hukum Allah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya dengan terpenuhi, *dlaruriyah*, *hijiyah*, dan *tahsiniah* (Chapra, 2000). Menurut beliau *Maqashid Shariah* dapat dijadikan alat bantu dalam memahami Al-Quran dan Hadits dalam dalil-dalil yang bertentangan dan tidak tertimpang dari hukum yang ditetapkan Tuhan, dan memahaminya melalui kajian *dlaruriyah*, *hijiyah*, dan *tahsiniah*. Hukum *maqashid Syariah* membantu hukum-hukum Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan Hadits.

3) Al-Imam al-Syatibi

Menurut Al-Imam al-Syatibi bahwa *maqashid* hanya ada tiga yaitu *dlaruriyah*, *hijiyah*, dan *tahsiniah*. *Dlaruriyah* harus ada karena fungsinya untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal tersebut tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. *Maqashid dlaruriyah* ada lima, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqashid hijiyah* adalah menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *maqashid tahsiniyah* adalah menyempurnakan kedua *maqashid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia (Toriqoddin, 2014).

Maqashid Syariah dalam kajian teori hukum islam itu penting. Urgensi-urgensi itu didasari pada pertimbangan berikut ini. *Pertama*, hukum islam adalah hukum yang bersumber dari Allah SWT dan diperuntukkan untuk umat yang digunakan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum ini akan selalu berhubungan dengan aspek sosial ataupun aspek lainnya. *Kedua*, dilihat dari segi historis, sesungguhnya teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah, sahabat, dan generasi mujtahidnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang maqashid Syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan (Shidiq, 2009).

Bila dilihat dari semua perintah dan larangan dari Allah yang ada di dalam Al-Quran semuanya memiliki tujuan tertentu dan tidak sia-sia. Semuanya ada hikmahnya di dalamnya yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.

Sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya:107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : "Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam" (QS.Al-Anbiya':107)

Rahmat seluruh alam di ayat tersebut diartikan sebagai kemaslahatan semua umat. Sedangkan secara sederhana, maslahat dapat diartikan sesuatu yang baik yang bisa diterima dengan akal sehat. Akal sehat disini diartikan dapat mengetahui dan memahami baik di balik penetapan hukum tersebut (Shidiq, 2009).

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara, yaitu :

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu datang.



- 2) Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik atau buruk dalam melakukan sesuatu dilihat dari kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia. Kebutuhan dalam kehidupan manusia itu bertingkat yaitu primer, sekunder, tersier (Shidiq, 2009).

b. Aspek Maqashid Syariah

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa fokus kajian *Maqashid Syariah* terdapat 3 klasifikasi berdasarkan kepentingan masing-masing, diantaranya yaitu *dharuriyat*, *Hajiyat*, *Tahsiniyat*. Berikut ini penjelasannya (Zainil, 2016):

- 1) Menjaga al-Dharuriyat

Yaitu sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, karena jika tidak akan membuat kehidupan tidak berarti atau terabaikan. Menjaga al-Dharuriyat dapat dikalsifikan sebagai berikut:

- a) Menjaga Agama (hidz ad-din)

Menjaga agama sangatlah penting, melihat hal ini menjadi dasar pedoman yang paling penting dan yang menjadi tujuan hidup manusia, seperti menjaga ibadah, sholat, puasa, zakat, serta meninggalkan larangannya dan mengerjakan perintahnya.

- b) Menjaga jiwa (hidz nafs)

Menjaga jiwa menjadi tujuan dari hukum Islam, karena dalam hukum islam menjaga jiwa merupakan hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Sebagaimana firman Allah SWT, pada Surat Al-Furqan Ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”.

c) Menjaga Akal (hidz ‘aql)

Akal merupakan sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya matahari, dan sumber kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal surat perintah dari Allah disampaikan dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi. Dan dengan akal juga yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan menjaga akal yang Allah berikan maka kita mendapat kelebihan yang berupa senantiasa ingin belajar, dapat memperdalam keilmuan agama dan umum, serta selalu ingin mempelajari ilmu yang ada di alam sekitar.

d) Menjaga keturunan (hidz an-nasl)

Menjaga keturunan ini dilakukan untuk menghindari dari perzinaan, menuduh zina, agar kemurnian darah dapat dijaga dan menjaga kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang

mana hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذْ كَانَ فُجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zin aitu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

e) Menjaga harta (hidz maal)

Menjaga harta untuk selalu berada di jalan yang diridhoi Allah adalah menjadi hal yang penting untuk dijalankan, dan kita diperintahkan untuk mencari rizki dengan cara yang halal agar terjauhi dari hasil harat non-halal yang anntinya akan menjadi darah api kelak diakhirat, dan akan berakibat kepada amal ibadah yang akan diteruma disisi Allah yang dikarenakan ketidakhalalan harta tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

## 2) Menjaga al-Hajiyat

Menjaga al-Hajiyat adalah tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi oleh manusia. Maka dari segi kepentingannya dapat diketahui bahwa masalah ini tingkatannya lebih rendah daripada daruriyat. Ketentuan hukum disini ialah dilakukan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia, contohnya seperti berbuka puasa bagi musafir, dan bagi orang yang sedang sakit, dan mengqasar shalat ketika dalam perjalanan. Contoh tersebut adalah untuk kemaslahatan yang dibutuhkan manusia. Jika tidak diwujudkan atau dilaksanakan maka akan tidak berakibat kepada kerusakan, tetapi hanya sekedar menimbulkan kesulitan.

## 3) Menjaga Tahsiniyah

Maksud dari menjaga tahsiniyah yaitu menjaga atau memelihara kebaikan budi pekerti. Jika kemaslahatan ini tidak dipenuhi maka tidak akan berakibat atau menimbulkan kesulitan dan kegoncangan dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja.

## 2. Program Penanggulangan Kemiskinan

### a. Pengertian Kemiskinan

Pengertian tentang kemiskinan semakin meluas seiring dengan banyaknya faktor atau indikator yang menyebabkan kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan tidak hanya dipandang dari sudut ekonomi, tetapi juga dilihat dari sosial, pendidikan, kesehatan, dan politik. Pengertian miskin (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2014) menyebutkan yaitu tidak memiliki harta beda atau serba kekurangan.

Benyamin White dalam (H.S & Hermanto, 1993) mengartikan kemiskinan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya itu memiliki perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan

masyarakat yang berbeda. Hal yang sama diungkapkan oleh Sar A. Levitan dalam (Ala, 1981) bahwa kemiskinan adalah tidak kurangnya barang-barang dan pelayanan-pelayanan dalam memenuhi hidup, maka dengan itu sulitnya untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Definisi diatas yang telah dijabarkan oleh kedua tokoh ahli menandakan bahwa kesejahteraan itu diukur melalui standar hidup layak bagi masyarakat.

Efendy mendefinisikan kemiskinan dengan tiga pendekatan, yaitu, ekonomi, sosial, dan politik. Menurut pendapatnya dari segi ekonomi, kemiskinan yaitu kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial, kemiskinan disebabkan karena kekurangan jaringan sosial struktur untuk masyarakatnya dalam meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan (Efendi, 1993). Tinjauan yang sama dikemukakan oleh (Nugroho, Iwan, & Dahuri, 2004) kemiskinan dari segi ekonomi adalah kesejangan antara lemahnya daya pembelian dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dari aspek sosial, kemiskinan mengartikan perkembangan masyarakatnya yang rendah atau lama. Sedangkan dari segi politik, kemiskinan berhubungan dengan masyarakat yang tidak biasa hidup mandiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar para tokoh ekonom mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup (Ravallion, 1994).

Kemiskinan dicirikan oleh indikator tidak bisa memenuhi makanan pokok bernutrisi atau kebutuhan dasar non makanan yang disebabkan tingkat pendapatannya rendah dan tidak mencukupi untuk kebutuhan tersebut. Kemiskinan bisa

disebabkan kelaparan, kekurangan air bersih, kurangnya akses untuk kesehatan, energi, pendidikan, susah akses untuk perdagangan, akses terhadap pendidikan.

Dalam suatu masyarakat dapat dikatakan ada kemiskinan jika terdapat satu atau lebih orang yang memiliki taraf hidup dibawah tingkat kesejahteraan ekonomi yang dianggap dibawah minimal masyarakat lainnya yang sesuai dengan standar masyarakatnya. Kemiskinan sangat sulit untuk diperbandingkan dengan negara-negara lain atau masyarakat lain karena kemiskinan ditentukan oleh norma, nilai, dan kondisi masyarakatnya, yang masing-masing masyarakat memiliki strukturnya masing-masing (Ravallion, 1994).

b. Klasifikasi Kemiskinan Masyarakat

Klasifikasi dan jenis-jenis kemiskinan dalam masyarakat pada umumnya adalah (Suryani, Permadi, & Serif, 2019) :

- 1) Kemiskinan absolute, yaitu pendapatan kasar yang didapatkan perbulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum.
- 2) Kemiskinan relative, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara pendapatan dengan kebutuhan.
- 3) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang di dalam wilayah tersebut memiliki sekelompok orang miskin, dan tidak ada peluang untuk keluar dari kemiskinan.
- 4) Kemiskinan kultural, yaitu disebabkan karena budayanya yang membuat masyarakat miskin.

Kemiskinan dibagi dalam beberapa dimensi menurut (Cox, 2005):

- 1) kemiskinan yang disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi memiliki yang menjadi menang dan kalah. Negara maju yang menjadi pemenang sedangkan negara berkembang sebagai

yang kalah, karena negara berkembang seringkali menjadi negara yang terpinggir oleh pesaing dan pasar bebas yang menjadi prasyarat globalisasi.

- 2) kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan yang disebabkan rendahnya pembangunan seperti kemiskinan pedesaan yang disebabkan peminggiran pedesaan dalam pembangunan, kemiskinan perkotaan disebabkan oleh kecepatan dalam pembangunan,
- 3) kemiskinan sosial. Kemiskinan yang sering dialami hanya oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- 4) Kemiskinan konsekuensi. Kemiskinan yang terjadi di luar dari faktor kemiskinan seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

c. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Para ahli mengemukakan bahwa kemiskinan tidak hanya bersumber dari faktor internal, namun juga dari faktor eksternal penduduk miskin. Ada juga pendapat lain yang mengemukakan bahwa kemiskinan terdiri dari faktor struktural dan kultural. Wignjosubroto dalam bukunya (Suyanto, 1995) mendefinisikan kemiskinan struktural yaitu disebabkan oleh kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Struktur kemiskinan yang seperti ini tidak hanya mengalami kemiskinan tetapi juga melanggengkan kemiskinan. Jika satu keluarga atau kelompok berada dalam struktur tersebut, maka akan susah untuk keluar dari belenggu kemiskinan tanpa bantuan pihak lain. Kemiskinan struktural juga berkaitan dengan distribusi sumberdaya yang timpang. Wilayah yang penduduknya memiliki sumber daya tidak akan mengalami kemiskinan tetapi begitu juga sebaliknya jika tidak memiliki sumber daya maka akan berada dalam kondisi miskin. Kemiskinan struktural disebabkan karena tatanan sosial yang tidak adil, bukan dikarenakan sebab pribadi. Tatanan yang di

dalamnya terdapat ketidakadilan, masyarakatnya tidak mempunyai akses atau peluang dalam meningkatkan kualitasnya.

Kemiskinan kultural disebabkan karena adat atau budaya di daerah tersebut. Hal ini membuat faktor adat atau budaya dapat menghalangi seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tidak hanya sumber daya fisik yang menjadi hal penting untuk terbebas dari kemiskinan, tetapi sumber daya nonfisik seperti motivasi atau tekad juga menjadi hal penting untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Pemahaman atau keyakinan bahwa setiap orang sudah memiliki takdirnya masing-masing, dan menganggap bahwa miskin adalah takdir, hal tersebut yang menyebabkan rendahnya dalam melakukan usaha-uaha untuk keluar dari kondisi miskin. Pada kelompok yang seperti ini, peran pemerhati bukan hanya bantuan fisik dari pemerintah tetapi juga dorongan motivasi untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Penyebab kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi menurut Sharp et. al. dalam (Kuncoro, 2004) berupa: (1) kepemilikan sumber daya yang dimiliki tidak sama sehingga distribusinya menimbulkan ketimpangan; (2) perbedaan dalam kualitas sumber daya dalam produktivitas dan upah yang rendah; (3) kemiskinan dapat muncul dengan perbedaan akses dalam mendapatkan modal.

d. Mengukur Kemiskinan

Kemiskinan dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Yang menjadi indikator kuantitatif yaitu tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat konsumsi rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan indikator yang diukur secara kualitatif dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi rumah yang dihuni, dan sebagainya (Suryani, Permadi, & Serif, 2019).

e. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan

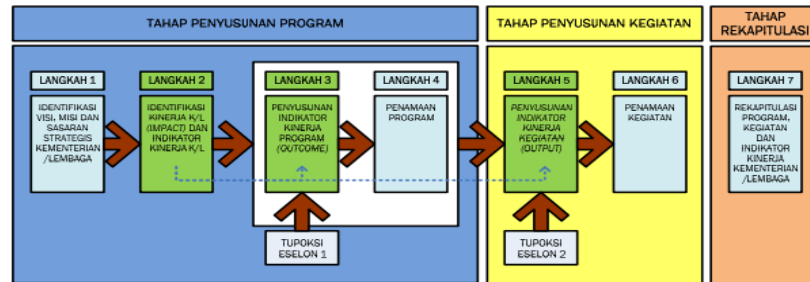


Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, pemerintah terus mengupayakan program-program untuk menanggulangi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan terkait dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal diantaranya pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Ayat (2) setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh persamaan dan keadilan. Ayat (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Ayat (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 34 menyebutkan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal tersebut yang semula ayat tunggal, pada amandemen keempat UUD 45 hal tersebut dipertegas lagi dengan menambah ayat-ayat baru, sehingga pasal 34 menjadi empat ayat. Ayat (2) berbunyi “negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Lingkungan hidup yang kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai.

Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk wilayah daerah oleh pemerintah daerah haruslah mementingkan kepentingan umum. Salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah menjaga kepentingan umum tersebut untuk mencapai harapan daerah dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa (Syaukani, Gaffar, & Rasyid, 2009).

Pemerintah pusat dan daerah merancang program-program dalam menanggulangi kemiskinan yang dirancang melalui RJPM (Rencana Pembangunan Jangka menengah). RJPM merupakan

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala negara/kepala daerah. Proses penyusunannya juga harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Gambar 2.1. Bagan Tahapan Penyusunan Program dan Kegiatan

Berdasarkan bagan diatas, dapat diketahui bahwa secara garis besar penyusunan program dan kegiatan dalam rangka penyusunan RPJM dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut: pertama, tahap penyusunan program. Kedua, tahap penyusunan kegiatan. Ketiga, Tahap Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Sebagai pelaksana negara, pemerintah wajib menjalankan amanat yang ada di undang-undang untuk mengentaskan kemiskinan. Usaha yang dilakukan melalui program-program strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengelola daerahnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut pendapat (Hall & Midgley, 2004) bahwa kemiskinan didefinisikan kondisi di dalam suatu masyarakat tersebut mengalami kekurangan atau kesejangan materi dan dosial diantara individu dengan individu lainnya atau hidup dibawah standar kehidupan yang layak.

f. Program Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi yang ada dalam masyarakat dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk mengurangi kemiskinan peran pemerintah sangat dibutuhkan karena pemerintah

memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menanggulangi kemiskinan. Program-program pembangunan yang sasarannya adalah masyarakat miskin sangat beragama, dari sektor pembangunan, sektor alokasi anggaran, maupun sektor instansi penyelenggara, pelaksana, penanggung jawab (Nurmasyitah & Mislinawati, 2017).

Rencana untuk menanggulangi kemiskinan telah pemerintah lakukan bersama dengan masyarakat melalui pengembangan dan penyelenggara berbagai program-program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut dilakukan dengan berbagai upaya baik itu menyediakan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir sebagai modal usaha, pembangunan sarana dan prasarana dasar maupun pedampingan usaha. Pemerintah telah berusaha dalam menanggulangi kemiskinan dengan melaksanakan berbagai program-program, khususnya program pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan kemandirian masyarakat.

### **3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kemampuan daerah, yang nantinya akan menghasilkan kesejahteraan dan memperbaiki material yang adil dan merata. Pemberdayaan masyarakat memiliki pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan jika diberi kesempatan dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya sendiri (Musa, 2017).

Di dalam masyarakat fungsi pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya agar dapat hidup mandiri yang akan menciptakan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa pemberdayaan tidak bisa dilepaskan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Agar

pemberdayaannya optimal yang mampu memberdayakan diri maka harus dilibatkan pemerintah secara optimal juga.

Saat ini hampir semua Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) memiliki program pemberdayaan masyarakat. Demikian juga untuk semua daerah yang ada di Indonesia baik itu dinas/instansi memiliki program pemberdayaan. Beberapa daerah bahkan membentuk unit kerja otonom yang tugasnya mengawasi proses koordinasi yang lebih baik dan menjamin agar terlaksananya pemberdayaan masyarakat dibawah gubernur/Bupati/Walikota yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat (Musa, 2017).

Dengan berbagai dinamika pengembangan dalam model pemberdayaan masyarakat yang didalamnya tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah baik itu melalui departemen maupun Lembaga pemerintah non departemen seperti DPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat), PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), PENP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir), PDM DKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain sebagainya. Program program tersebut salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dengan masyarakatnya yang mandiri.

Dari sekian banyaknya program yang ada, aspek ekonomi menjadi aspek yang paling banyak dilakukan. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk melepas masyarakat dari kemiskinan dan keterbelangan. Pemberdayaan dengan aspek ekonomi menjadi akses masyarakat untuk mendapatkan pendapatan dalam membiayai hidup yang layak. Pemerintah mewujudkan masyarakat yang berdaya guna dan mandiri, salah satunya melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemerintah memiliki peranan sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisator), dan fasilitator dalam upaya pemberdayaan masyarakat

melalui UKM. Berikut ini adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat; (Musa, 2017)

a. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator memiliki peran sebagai yang menyiapkan arah atau menyeimbangkan atas pembangunan seperti menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan. Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat itu memiliki acuan dasar yang dibuat oleh pemerintah sebagai regulator. Pemberdayaan masyarakat dari aspek ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang akan mendukung pengembangan usaha. Adapun kebijakan dari aspek ekonomi yang diarahkan yaitu kebijakan di bidang permodalan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat dan anggarannya di dapatkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah mengerak partisipasi semua pihak jika pembangunan daerahnya tidak bergerak atau berhenti dengan cara mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Sebagai dinamisator, pemerintah juga berperan sebagai yang memberikan bimbingan atau pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah memberikan bimbingan pelatihan kepada masyarakat melalui tim penyuluh maupun badan/instansi.

c. Pemerintah sebagai Fasililator

Peran pemerintah sebagai fasililator adalah menciptakan kondisi yang kondusif dengan menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasililator pemerintah juga berperan untuk menciptakan dan memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman, dan aman,

termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana sebagai pembangunan.

Ada dua tugas fasilitator diantaranya, yaitu : (Musa, 2017)

- 1) Fasilitator di Bidang Pendampingan, pendampingan sangat dibutuhkan dalam melanjutkan dan meningkatkan usaha agar bisa mandiri. Pendampingan ini diimplementasikan dengan cara memberikan pelatihan, pendidikan, dan peningkatan ketrampilan.
- 2) Fasilitator di Bidang Permodalan, tidak hanya fasilitas pendampingan yang dibutuhkan tetapi juga membutuhkan fasilitas dalam bidang pendanaan maupun permodal, peran pemerintah di bidang ini adalah mencari jalan keluar untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah masyarakatnya agar lebih berdaya agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa juga dinilai dari hasilnya, tetapi juga melalui proses yang berbasis pada tingkat partisipasi kebutuhan dan potensi yang masyarakat setempat. Untuk mencapai keberhasilan seperti itu, maka agen pemberdayaan harus menggali potensi, menentukan masalah, dan menentukan kebutuhan masyarakatnya. Walaupun dalam satu daerah atau komunitas, potensi atau kebutuhan itu sangat beragam. Dalam hal ini, maka agen pemberdayaan yang menjadi tanggung jawab dalam menentukan skala prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi seperti inilah yang menjadi acuan agen pemberdayaan untuk menentukan perencanaan pemberdayaan (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan klien atau sasaran. Keterlibatan sasaran dalam tahapan perencanaan ini, merupakan

salah satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional untuk menyukseskan program pemberdayaan (Musa, 2017).

Ada beberapa pendekatan dalam melaksanakan pemberdayaan. Menurut Suharto yang dikutip dalam (Anwas, 2013), pendekatan penerapan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu; pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongna, dan pemeliharaan.

Adapaun penjelasan 5P dapat dijelaskan dibawah berikut ini:

- 1) Pemungkinan; memberikan suasana yang membuat masyarakatnya berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus membebaskan masyarakatnya dari *cultural* dan struktur yang menghambat.
- 2) Penguatan; untuk memecahkan masalah yang ada dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang kuat. Pemberdayaan masyarakat harus mampu menumbuhkan kemampuan dalam menunjang kemandirian masyarakatnya sendiri.
- 3) Perlindungan; melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menjaga kelompok lemah agar tidak terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh kelompok kuat, dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat anatra yang lemah dengan yang kuat. Pemberdayaan dilakukan agar tidak adanya diskriminasi atau dominasi yang akan tidak menguntungkan rakyat miskin.
- 4) Penyokongan; menyokong masyarakat dengan memeberikan dukungan atau bimbingan agar dapat menjalankan peran-perannya. Pemberdayaan harus menjaga masyarakatnya agar

tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah atau tersingkirkan.

- 5) Pemeliharaan; menjaga agar kondisinya menjadi kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dengan masyarakatnya. Pemberdayaan harus mampu menjaga keseimbangan yang setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Kehidupan dan realitas dalam masyarakat sangat heterogen. Agen pemberdayaan memilih cara pelaksanaan pemberdayaan dilihat berdasarkan beragam karakter yang dimiliki masyarakat. Keberhasilan hasil atau proses itu dapat dilihat dari cara pemilihan atau teknik dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, Dobois dan Miley menurut Suharto yang dikutip oleh (Anwas, 2013) menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu;

- 1) Meningkatkan hal rasa menolong terhadap yang lain yang disalurkan dalam bentuk merefleksikan respon rasa empati terhadap yang diberdayakan, menghormati pilihan yang diberdayakan dalam menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien.
- 2) Komunikasi dibangun dan diwujudkan dalam bentuk: menghargai harga diri sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, serta menjaga rahasia yang dimiliki oleh sasaran.
- 3) Dalam pemecahan masalah agen pemberdayaan terlibat dan diwujudkan dalam bentuk: partisipasi sasaran ditingkatkan dalam aspek pemecahan masalah yang ada, menghargai hak-hak sasaran, menjadikan tantangan-tantangan sebagai kesempatan dalam belajar, serta



melibatkan sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.

- 4) Meningkatkan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk: patuh terhadap kode etik profesi, ikut serta dalam pengembangan professional, melakukan penelitian, dan perumusan kebijakan, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu public, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Disamping itu juga, untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka menemukan potensi yang di dirinya dan meningkatkan kesejahteraan hidup dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi atau cara yang dilakukan berdasarkan potensi dan kondisi yang dimiliki masyarakat. Berikut ini strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan antara lain (Musa, 2017):

- 1) Peningkatan mutu dan kuantitas pendidikan formal dan non formal

Peningkatan pendidikan yaitu suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan masyarakat yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Pendidikan tidak selalu di dapatkan dengan cara formal, tetapi juga bisa pendidikan dilakukan dengan cara nonformal, contohnya melalui pelatihan, prak lapangan, magang, studi banding, dll.

- 2) Peningkatan mutu dan frekuensi penyuluhan

Penyuluhan adalah salah satu dari contoh pendidikan dengan pendekatan noformal yang membahas tentang suatu materi, biasanya sasaran dari penyuluhan adalah orang dewasa atau orang yang sudah banyak memiliki pengalaman di bidangnya.

- 3) Kegiatan pendampingan

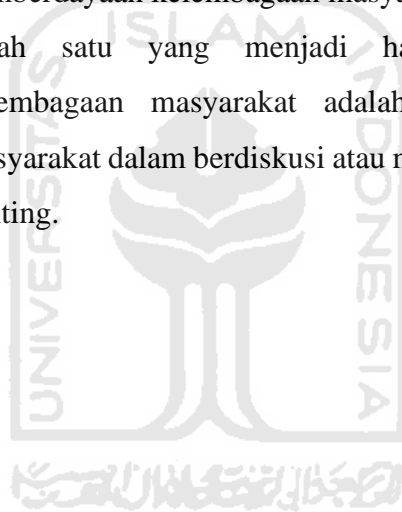
Pendampingan dilakukan untuk menemukan potensi yang ada di dirinya dan memecahkan masalah yang ada. Konsep dari pendampingan yaitu menghubungkan masyarakat dengan kebutuhan baik yang bersifat materil amupun non materil.

4) Penyebaran informasi

Kurangnya informasi itu bisa disebabkan oleh dua permasalahan pokok. Pertama, karena informasinya masih bersifat khusus atau eksklusif, informasi tersebut disengaja tidak disebarkan kepada khalayak umum. Kedua, disebabkan karena masyarakatnya sendiri masih lemah dalam mengakses informasi yang sebenarnya sudah tersedia lingkungan mereka.

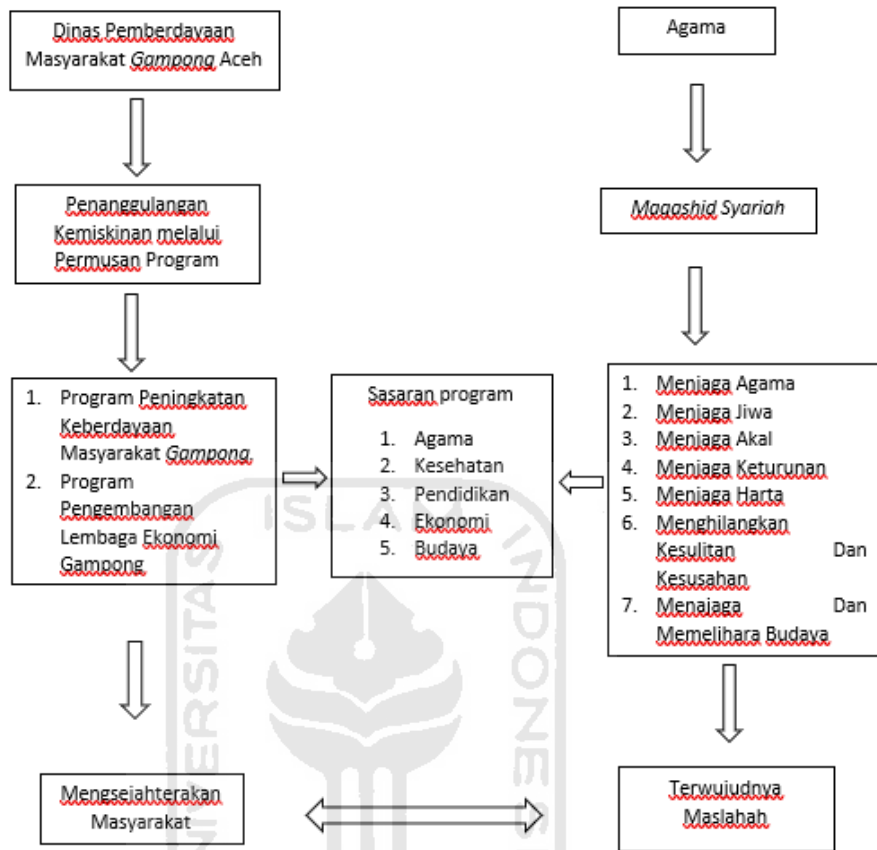
5) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat

Salah satu yang menjadi hal penting dibentuknya kelembagaan masyarakat adalah untuk menjadi sarana masyarakat dalam berdiskusi atau membicarakan hal-hal yang penting.



### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut ini:



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2006). Dalam penelitian ini pembahasan akan menitikberatkan pada perumusan program kerja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh dalam penanggulangan kemiskinan serta menganalisis data tersebut dengan harapan bisa sesuai dengan *maqashid Syariah*.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong di Jalan Tgk. Syech Mudawali No.E Banda Aceh.

#### **C. Waktu Pelaksana Penelitian**

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2020.

#### **D. Objek dan Subyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong. Sedangkan Subyek penelitiannya adalah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh.

#### **E. Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai atau berjumlah 127 orang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh. Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai pegawai yang terlibat dalam perumusan program kerja dalam penanggulangan kemiskinan.

Dengan demikian sampel penelitian berjumlah 5 orang, yakni :

Tabel 3.1. Daftar Sampel Penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Gampong Aceh

Nama	Jabatan
Rukasana	Sekretaris
Fitriana	Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
Irwansyah	Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
Siska Vita Sari	Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
Hery Mahyuda	Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

#### F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dapat diartikan sebagai sumber yang memberikann informasi data, baik secara primer mamupun sekunder. Berikut ini merupalan sumber yang agan digunakan oleh peneliti:

##### 1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung kepada subyek penelitian dengan menggunakan instrument-instrumen yang yelah ditetapkan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, data dikumpulkan. Pengumpulan data primer merupakan bagian yang penting dari proses penelitian dan dipakai untuk pengambilan keputusan (Purhantara, 2010).

Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh yang dianggap dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang obyek penelitian.

##### 2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari subyek penelitiannya atau melalui pihak lain. Data sekunder ini dilakukan untuk memperkuat penemuan peneliti yang telah dikumpulkan dari data primer. Data sekunder peneliti memperoleh dari sumber buku, jurnal, *website*, laporan DPMG Aceh, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data bagian dari proses menyediakan data primer untuk kebutuhan peneliti. Pengumpulan data merupakan hal yang penting dilakukan dalam metode penelitian ilmiah karena pada dasarnya data yang dikumpulkan akan digunakan (Tanzeh & Suyitno, 2006).

Teknik pengumpulan data kualitatif itu bersifat tentative karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang ingin diperoleh. Perbedaan yang paling dasar dari data kualitatif dan kuantitatif adalah dari Teknik pengumpulan datanya. Data yang paling penting dari penelitian kualitatif adalah data yang dilihat secara nyata seperti penglihatan, penedengaran, mewawancarai, dan mengobeservasi (Mantja, 2005).

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab antara satu orang dengan yang lainnya baik antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee* (Usman & Akbar, 2004).

Ada dua jenis wawancara yang sering dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang direncanakan terlebih dahulu dari materi dan urutan yang ingin ditanyakan

sebelum turun ke lapangan. Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah sebaliknya, tidak dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya, materi, dan urutan yang ingin ditanyakan. Materi pertanyaannya dapat dikembangkan ketika wawancara berlangsung (Tanzeh & Suyitno, 2006).

Di dalam wawancara ini peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak DPMG Aceh. Di penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yang telah dijelaskan diatas bahwa peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan, materi, dan urutan yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka langsung dengan pihak yang diwawancarai.

## 2. Dokumentasi

Menurut (Mantja, 2005) dalam penelitian kualitatif bahwa data dokumen biasanya dianggap data sekunder, karena data ini tidak diperoleh secara langsung kepada subyeknya. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai suatu hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010).

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penitian lalu sehingga dengan data ini dapat menambah dan mendukung kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian (Satori & Komariah, 2013).

## **H. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Pengertian variabel menurut (Suryabrata, 1998) adalah segala sesuatu yang akan dijadikan obyek penelitian atau variabel penelitian bisa juga dikatakan faktor-faktor dalam peristiwa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel perumusan program kerja dan variabel pemberdayaan masyarakat.

Definisi dari Konseptual Variabel yaitu bersifat abstraksi, yang dijelaskan dengan kata-kata yang akan membantu pemahaman. Sedangkan definisi operasional variabel yaitu terdiri dari sekumpulan cara bagaimana mengukur variabel yang telah ditentukan secara konseptual (Russel, 2000).

Tabel 3.2. Variabel Definisi Konseptual Dan Variabel Definisi Operasional

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator	Pertanyaan
Perumusan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh	Perumusan program keranya menggunakan indikator Al-Imam al-Syatiibi	Dlaruriyah	1. Menjaga agama	1-5
			2. Menjaga jiwa	6-7
			3. Menjaga akal	8-11
			4. Menjaga keturunan	12-14
		Hijiyah	5. Menjaga harta	15-17
			6. Menghilangkan kesulitan dan kesusahan	18-19
			Tahsiniyah	7. Menjaga dan memelihara

### I. Instrumen Penelitian

Ciri khas dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti menjadi instrumen sekaligus yang mengumpulkan data. Selain menggunakan instrumen manusia juga menggunakan instrumen lain yang sebatas hanya dijadikan fungsi sebagai pendukung dalam penelitian, seperti pedoman wawancara, *handphone*, alat tulis, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk keberhasilan dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti menjadi sangat penting



dalam penelitian kualitatif, karena peneliti berinteraksi langsung dengan subyek yang diteliti baik itu manusia ataupun non manusia yang ada di obyek penelitian.

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang ingin dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data tidak bisa dilepaskan dari metode pengumpulan data. Metode wawancara menggunakan instrumen pedoman wawancara terbuka dan terstruktur. Untuk metode pengumpulan datanya menggunakan observasi atau pengamatan maka menggunakan instrumen pedoman observasi. Yang terakhir metode pengumpulan data dengan dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen (Ardianto, 2010).

#### **J. Teknik Analisis Data**

Data akan berguna jika telah dianalisis. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa betapa pentingnya menganalisis data khususnya penelitian kualitatif. Mengemukakan (Bogdan & Biklen, 1998) analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, bahan-bahan dan catatan-catatan dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan menyajikan apa yang ditemukan di lapangan. Proses pengumpulan dan analisis data seharusnya dikerjakan secara bersamaan, tidak seharusnya dipisahkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014), berikut tahapannya:

1. Kondensi data (data condensation)

Tahapan pertama dalam analisis yaitu melakukan *data condensation*. *Data condensation* mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan/atau mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan yang ditulis, wawancara, transkrip, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

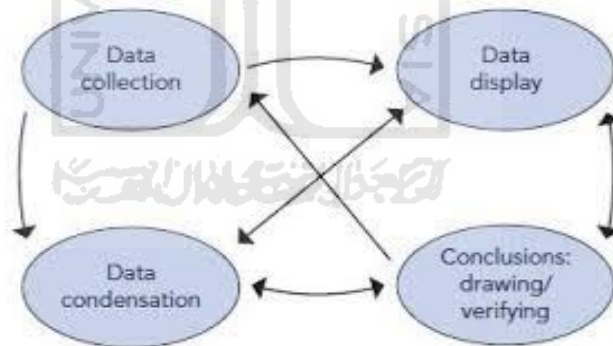
## 2. Penyajian data (data display)

Dalam melakukan penelitian ini, data didapatkan berkaitan dengan objek penelitian berupa kalimat, kata-kata dan kemudian data disajikan secara sistematis yang dapat memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.

## 3. Penarikan kesimpulan / verifikasi (conclusions: drawing/verifying)

Data dianalisis secara berlangsung terus-menerus baik yang dikerjakan di lapangan maupun setelah di lapangan sampai data tersebut selesai dianalisis, kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Data hasil kesimpulan didapatkan dari hasil analisis data selama kegiatan di lapangan baik yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tahapan analisis data dengan menggunakan metode interaktif dapat dilihat dari alur berikut ini :



Sumber: (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

Gambar 3.1 Alur Analisis data: Model Interaktif

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum DPMG Aceh

Gambaran umum DPMG Aceh menjelaskan profil singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* Aceh (DPMG), struktur organisasi. Berikut gambaran umum DPMG Aceh :

##### 1. Profil DPMG Aceh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah yang dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh , 2019).

Tugas Pokok (TUPOKSI) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mukim dan gampong serta tugas pembantuan lainnya.

Dan untuk fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Aceh ada beberapa berikut ini:

- a. Pelaksanaan Urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

## 2. Visi dan Misi

Visi misi gubernur di Aceh melekat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, visi gubernurnya adalah pembangunan Aceh yang ditetapkan kepala daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh tahun 2017-2022. Visi tersebut berbunyi “terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”. Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program SKPA sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh (outcome) dan dampak (impact) yang dicita-citakan.

Agar visi tersebut tercapai akan diwujudkan dengan beberapa misi lima dalam waktu lima tahun, adapun misi Pemerintahan Aceh tahun 2017-2022 adalah:

- a. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
- b. Memperkuat Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat;
- c. Menjaga Integritas Nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
- d. Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu Pendidikan secara merata, baik pada Pendidikan vokasional, dayah dan Pendidikan umum;
- e. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegritas;
- f. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
- g. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industry;
- h. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industry jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif;
- i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dari uraian visi misi yang telah disebutkan di atas, maka yang sesuai dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah misi point a dan h, yaitu, point a reformasi birokrasi untuk tercapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan.

Maka, dari misi tersebut kegiatan yang akan dapat mendukung untuk tercapainya misinya adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Prasarana gampong,
- b. Pembinaan kompetensi Aparatur Pemerintahan Gampong,
- c. Peningkatan sarana dan prasarana gampong,
- d. Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim,
- e. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong, dan
- f. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Dan misi point yang b, yaitu: membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan. Kegiatan yang sesuai dengan misi tersebut adalah:

- a. Peningkatan Kapasitas dan Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong,
- b. Peningkatan Kebutuhan Pelayanan Dasar Ekonomi Masyarakat Gampong,
- c. Fasilitasi,
- d. Pembinaan dan Pengembangan Keuangan Gampong,
- e. Penataan dan Pengembangan Kawasan Gampong,
- f. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna, dan
- g. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam melalui Penerapan Inovasi.

### 3. Struktur Organisasi

Secara umum dapat diketahui bahwa struktur organisasi di DPMG Aceh tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi dinas pemberdayaan masyarakat lain. Struktur organisasi DPMG Aceh terdiri Kepala Dinas, Sekretaris yang dibawahnya ada sub bagian program, informasi, dan hubungan masyarakat, sub bagian keuangan dan pengelolaan aset, sub bagian hukum, kepegawaian dan umum, kemudian bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, yang dibawahnya ada seksi pendampingan dan fasilitas keuangan gampong, seksi pengembangan usaha

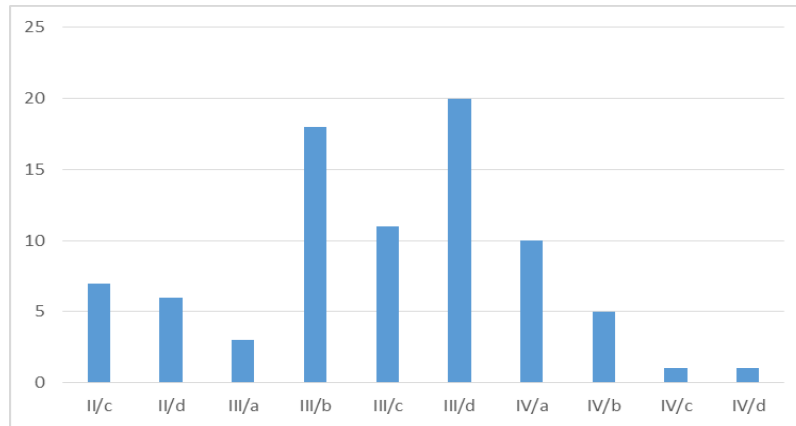
dan Lembaga ekonomi gampong, seksi pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada bidang pemerintahan mukim dan gampong, yang dibawahnya ada seksi pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan gampong, seksi pembinaan sarana dan prasarana pemerintahan mukim dan gampong, seksi pembinaan kekayaan mukim dan gampong. Dan ada Bidang Lembaga Kemasyarakatan gampong dan Lembaga adat gampong, yang dibawahnya ada seksi pembinaan Lembaga kemasyarakatan gampong, seksi pengembangan adat dan Lembaga adat gampong, dan seksi pembinaan partisipasi masyarakat gampong. Yang terakhir ada bidang pengembangan Kawasan sumber daya alam dan teknologi tepat guna gampong yang dibawahnya ada seksi penataan dan pengembangan Kawasan gampong, seksi pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong, dan seksi pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna. Susunan struktur organisasi DPMG Aceh dapat dilihat pada gambar 4.1



Sumber: Website Beranda DPMG Aceh

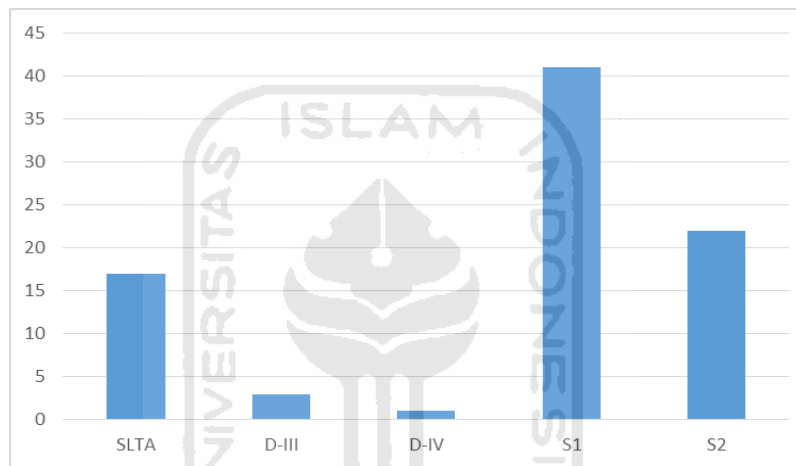
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPMG Aceh

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, DPMG Aceh didukung oleh 127 orang pegawai yaitu PNS sebanyak 84 dan tenaga kontrak sebanyak 43 orang. Gambaran komposisi pegawai yang ada saat ini sampai akhir bulan Desember 2019.



Sumber: Laporan Kinerja (LKj) DPMG Aceh Tahun 2019

Gambar 4.2 Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Laporan Kinerja (LKj) DPMG Aceh Tahun 2019

Gambar 4.3 Grafik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

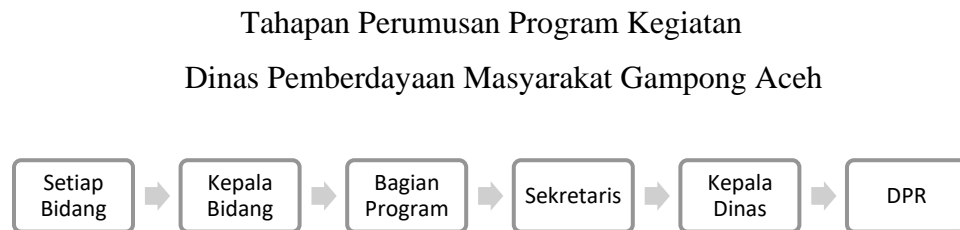
## B. Perumusan Program kerja dalam Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* Aceh Menurut Perspektif Maqashid Syariah

Hasil penelitian ini peneliti dapatkan dari wawancara pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* Aceh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dari Laporan Kerja Tahun 2018 dan 2019. Penelitian ini mengungkap tentang perumusan program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* Aceh dalam menanggulangi kemiskinan pada tahun 2018-2019 yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi.



## 1. Tahapan Perumusan Program

Berikut ini bagan tahapan perumusan program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong Aceh*.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong Aceh*

Gambar 4.4 Bagan Tahapan Perumusan Program Kegiatan

Sebelum melakukan perumusan program kegiatan, terlebih dahulu mengidentifikasi pemasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang di DPMG, permasalahannya pada tahun 2018-2019 diantaranya yaitu:

- a. Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- b. Lemahnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah sesuai dengan bidang keahlian.
- c. Rendahnya kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
- d. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM industri.
- e. Terbatasnya akses pasar regional, nasional, internasional.
- f. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup berkelanjutan.
- g. Masih lemahnya kapasitas pemerintahn Mukim dan Gampong dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong serta pemberdayaan masyarakat.
- h. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana gampong dan sarana pendukung lainnya bagi peningkatan pelayanan masyarakat.

- i. Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses permodalan untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
- j. Kurangnya ketersediaan akses perekonomian gampong melalui berbagai pelaksanaan/pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pasar desa dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG.
- k. Penyediaan sistem informasi desa dan deseminasi teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas sumber daya alam yang dikelola gampong dan masyarakat perlu ditingkatkan.
- l. Terbatasnya akses pembangunan Kawasan gampong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas kemudian menentukan prioritas dan sararan pembangunan perangkat daerah berdasarkan RPJM dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya reformasi bikrorasi dan pelayanan publik, yang di sebabkan oleh kurang optimalnya kapasitas manajemen pemerintahan, akar masalahnya karena manajemen pemerintahan belum baik.
- b. Lemahnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah sesuai dengan bidang keahlian yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi, akar masalahnya ada di sumber daya aparatur rendah.
- c. Rendahnya kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, yang disebabkan oelh tingginya angka gizi buruk, akar permasalahannya karena kualitas asupan gizi anak usia dini masih rendah.

- d. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM bidang industry, disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengurus Lembaga ekonomi dalam pengelolaan Lembaga dan usaha ekonomi gampong, akar permasalahannya karena SDM pengurus masih rendah.
- e. Terbatasnya akses pasar regional, nasional, dan internasional, disebabkan oleh rendahnya kualitas produk unggulan gampong, akar permasalahannya ada di kurangnya pengembangan kualitas produk unggulan.
- f. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, disebabkan oleh belum adanya pemetaan dan pengembangan pengelolaan teknologi tepat guna berbasis sumber daya alam dan belum terbangunnya Kawasan sesuai potensi sumber daya alam.

Untuk DPMG Aceh, kemiskinan itu dibawah bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong, contoh kegiatan yang dilaksanakan seperti mengadakan rumah dhuafa untuk rakyat miskin, rapat rakor, rapat oragnisasi lintas sektor, dan BUMG, untuk BUMG lebih kepada pelatihan-pelatihan BUMG. Nama-nama programnya, program peningkatan pemberdayaan masyarakat gampong, pengembangan Lembaga ekonomi gampong. Untuk peningkatan pemberdayaan gampong ada dua, dari kemiskinan dan kesempatan kerja. Untuk yang lainnya khusus ke pemerintahan gampongnya aparat gampong, Lembaga sosial masyarakat, lembaga adat, ibu PKK, posyandu. BUMG adalah salah satu bagian dari bidang tersebut, BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yang mana pengelolaannya dari dana desa, tetapi DPMG hanya sebatas perencanaan dan pembinaan atau pendampingan desa agar masyarakatnya dapat mandiri dengan kekuatan yang ada di desa.

Tujuan dari sebuah program yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, agar tujuan tersebut tercapai harus merancang sebuah program kegiatan dengan baik mempertimbangkan

output yang ingin dicapai *outcome* apa yang ingin dihasilkan sama *impact* apa yang akan diberikan, misalnya dibuat pelatihan, untuk apa dibuat pelatihan, lokasi yang mana akan dituju, tergetnya berapa orang yang akan dilatih, hasil dan dampak apa yang akan tercapai dari pelatihan tersebut, dan mempertibangkan anggarannya, jadi dalam merancang sebuah program kegiatan harus mempertibangkan segala hal tersebut yang nanti akan dibahas ketika rapat internal.

Dokumen rencana kinerja DPMG Aceh tahun 2018 dan 2019 salah satunya memuat tentang program kegiatan. Program penanggulangan kemiskinan DPMG berubah setiap pergantian Gubernur karena menyesuaikan dengan visi misi Gubernur. Program-program yang ada di DPMG sudah ditetapkan oleh DPA yang disesuaikan dengan tupoksinya DPMG, tetapi untuk program kegiatan yang merumuskan pihak DPMG sendiri. Untuk kegiatannya akan diusulkan kepada kepala dinas, sekretaris, dan kepala bagian oleh setiap bidang, setiap bidang akan mengajukan ke bagian program, bagian program akan menghimpun atau merekap semua usulan-usulan dari bidang lain dan akan disampaikan kepada kepala dinas, setelah itu baru diusulkan kepada anggota DPR, ketika sudah disahkan baru itu dapat dijalankan oleh DPMG, yang mana program kegiatan yang diajukan harus sesuai dengan prioritas yang lebih ingin dilaksanakan yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Rensra) RPJM gubernur Aceh, program kegiatan yang dijalankan oleh DPMG itu harus berhubungan juga dengan visi misi gubernur. Program kegiatan sendiri sifatnya kebijakan, jadi mungkin nanti kepala dinas dan sekretaris yang akan melihat mana kegiatan yang bisa dianggap prioritas dan mungkin bukan prioritas.

Untuk kegiatan rutin sendiri akan selalu dilaksanakan dan untuk kegiatan baru akan disesuaikan dengan kondisi. Untuk pelaksanaan dari program yang telah dirumuskan disesuaikan dengan perencanaannya.

Semua proses dari perumusan program sampai pelaksanaan dibawah pengawasan dan arahan kepala dinas. Agar program tersebut tersalurkan kepada masyarakat atau gampongnya.

Tantangan dalam merumuskan program kegiatan program yang telah dibuat dan setelah dibuat diperiksa ditahap akhir ternyata tidak sesuai dengan TUPOKSI DPMG atau ada yang kurang, maka dengan ini mengulang kembali perumusan programnya dari tahap awal.

## 2. Program di DPMG Aceh

Berikut ini akan dijelaskan program-program di DPMG dalam penanggulangan kemiskinan dan akan akan disajikan dalam tabel 4.1 terlebih dahulu.

Tabel 4.1 perumusan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh

Obyek	Program Kerja	Program Kegiatan 2018	Program Kegiatan 2019
Perumusan program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong	Pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat gampong.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat gampong
		Pembinaan sosial budaya masyarakat pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Pembinaan perencanaan program pemberdayaan masyarakat
		Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan/pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).	Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna
		Penyelenggaraan diseminasi informasi Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat gampong	Pengembangan potensi sumber daya alam melalui penerapan inovasi

			Penataan dan pengembangan kawasan gampong
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong	Pembinaan, Pengembangan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/desa (P3MG/D)	Pembinaan, pengembangan keuangan gampong
		Workshop Bansos Se-Aceh Tahun 2018	Peningkatan kapasitas Lembaga dan usaha ekonomi masyarakat gampong
			Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar ekonomi masyarakat gampong

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong

Untuk program ini kegiatan kinerjanya yaitu menentukan jumlah Kawasan gampong yang dibentuk dan dikembangkan, jumlah alat-alat TTG yang dimanfaatkan oleh gampong sesuai dengan potensi SDA gampong, dan jumlah gampong yang mengelola dan menerapkan SIGAP.

Untuk mendukung program diatas pada tahun 2018 terdapat beberapa program kegiatan, diantaranya yaitu: *Pertama*, kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat gampong, output yang diharapkan dapat terlaksananya pemberdayaan Lembaga dan organisasi gampong, pada tahun 2018 kegiatannya yaitu berupa:

1) Pelatihan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat gampong

Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan wawasan dan pola pikir masyarakat dalam menentukan dan menyusun perencanaan gampong, baik jangka pendek, menengah dan panjang serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pengurus LKMD/Tuha Lapan *Gampong* agar mampu menyusun rencana pembangunan yang lebih berkualitas sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat gampong dan mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya gampong dan mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai sarana pendukung dalam mempercepat pembangunan gampong.

*Kedua*, pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, output yang ingin dicapai dapat terpelihara dan lestarnya semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, optimalisasi peran Pokjanal Posyandu Provinsi dan kab/kota, serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas TP.PKK dalam menggerakkan pembangunan di Aceh secara terencana dan terpadu. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung program kegiatan ini sebagai berikut:

1) Rapat kerja Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Se-Aceh

Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan penyelenggaraan prioritas Pembangunan Nasional, dalam rangka peningkatan asupan gizi pada peserta didik diamanatkan mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, kabupaten/Kota sampai Gampong agar memberikan Penyediaan Makanan Tambahan Anak sekolah kepada peserta didik di tingkat TK/RA dan SD/MI terutama di daerah tertinggal, terisolir, terpencil,

perbatasan, di pulau-pulau kecil, dan/atau terluar serta di daerah pedalaman.

Tahun 2018 dilaksanakan sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan pemberian uang jajan dan biaya manajemen kepada 110 (seratus sepuluh) TK/RA di 23 Kabupaten/Kota se-Aceh yang telah dipilih, ditetapkan dan memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan PMT AS tersebut. Melalui Rapat Kerja Penyedia Makanan Tambahan Anaka Sekolah (PMT-AS) Se-Aceh ini diharapkan para pihak yang terlibat sebagai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan PMT-AS dapat melaksanakan kegiatan penyediaan makanan tambahan ini sebagaimana mekanisme atau aturan yang telah ditetapkan.

2) Kegiatan-kegiatan TP.PKK Provinsi Aceh

- a) Penguatan kader pendampingan ibu hamil dan penggunaan Buku KIA di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Lhoksumawe, Bireun, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Jaya

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas dalam rangka membantu pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan anak. Dengan adanya pelatihan ini, nantinya diharapkan kader posyandu dapat mendampingi ibu hamil agar dapat menjalani kehamilan, persalinan dan amsa nifas yang sehat dan juga kepada ketua TP PKK Kabupaten agar dapat meningkatkan jumlah kader yang terlatih tentang pendampingan ibu hamil dan penggunaan buku KIA melalui pelatihan secara mandiri.

- b) Integrasi program PKK dengan program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka tersosialisasinya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan keluarga kepada Tim Penggerak PKK seluruh kabupaten/kota. Dalam



kegiatan ini, para peserta dilatih bagaimana peran PKK dalam mendukung PIS-PK, Program Indonesia sehat melalui pendekatan keluarga, pendekatan PIS-PK melalui PKK, sinergitas program Pokja IV dengan PIS-PK , Keluarga Sehat dan Pelaksana posyandu terintegrasi sebagai intervensi PIS-PK.

c) Pengembangan ekonomi kreatif daerah pesisir

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan cakupan pelaksanaan program dan kelembagaan PKK melalui pengembangan ekonomi kreatif daerah pesisir serta terjalinnya silaturahmi sesama kader PKK se Aceh dan dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah pesisir, teknik pengemasan, pemasaran, manajemen usaha, dan bagaimana mensinergikan pelaku usaha agar menjadi suatu kelompok UP2K Binaan TP.PKK.

*Ketiga,* pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan/pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), output yang ingin dicapai dapat meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program kegiatan ini sebagai berikut:

1) Sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam

Sasaran dari kegiatan ini adalah Aparatur Desa/Tenaga Ahli di bidang Sumber Daya Alam selaku pihak yang terlibat langsung dari kabupaten yang berada di daerah pesisir, kepulauan, daratan dan pedalaman untuk diberdayakan dalam hal penyamaan persepsi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Gampong.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen, kemitraan serta dukungan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terhadap pengembangan dan pengelolaan potensi

Sumber Daya Alam Gampong yang inovatif menuju *one village one product*.

Dari pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Kawasan Gampong, diharapkan dapat menghasilkan beberapa hal, antara lain:

- a) Tersosialisasinya program pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Alam Gampong yang inovatif untuk menggali gagasan dan pemikiran yang inovatif dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan, Sumber Daya Alam dalam pemberdayaan masyarakat di Gampong.
- b) Meningkatnya pengetahuan Aparatur Desa/ Tenaga Ahli di Bidang Sumber Daya Alam Gampong dalam pengembangan dan pengelolaan potensi sumber daya alam gampong.
- c) Meningkatnya kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah dan Kabupaten/Kota serta Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka terwujudnya pemahaman konsep, tujuan dan arah dari program pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) gampong yang inovatif.
- d) Menjadi stimulus bagi pemerintah gampong untuk mewujudkan kinerja yang optimal dalam memberdayakan masyarakat gampong.

*Keempat*, penyelenggaraan diseminasi informasi Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat gampong. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan gelar teknologi Tepat Guna XII se-Aceh dan lomba inovasi TTG tahun 2018

Sebagai upaya dalam penyebarluasan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan

masyarakat dan usaha ekonomi desa/kelurahan dan hasil kreasi serta inovasi dibidang Teknologi Tepat Guna (TTG), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh menyelenggarakan kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Se Aceh XIII tahun 2018.

Gelar teknologi Tepat Guna (TTG) Se Aceh XIII tahun 2018 dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh informasi, menstimulasi, mendorong atau memotivasi dalam meningkatkan pengetahuan. Kapasitas produksi dan nilai tambah produk unggulan daerah secara ekonomi serta sebagai barometer kemajuan perkembangan Teknologi Tepat Guna di seluruh Aceh.

Penyelenggaraan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Se Aceh ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pengelolaan pemerintahan Gampong yang inovatif dan pendayagunaan TTG juga dapat mendorong atau memotivasi masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produknya. Selain itu gelar TTG dapat digunakan sebagai sarana saling tukar informasi berbagai jenis TTG yang telah diadopsi dan didayagunakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat pengguna dapat memperoleh informasi yang cukup dalam menentukan pilihan TTG yang dibutuhkan sesuai dengan kegunaan dan kemampuannya.

## 2) Pelatihan pengelola posyantek

Kegiatan ini bertujuan untuk: a) menumbuhkan, menguatkan dan memandirikan fungsi kelembagaan Teknologi Tepat Guna (Posyantek/Posyantekdes) di desa kecamatan, kabupaten/kota bagi masyarakat; b) memperluas pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c) meningkatkan kualitas teknologi pedesaan yang dimanfaatkan

masyarakat, d) melakukan kerjasama Teknologi Tepat Guna dengan berbagai pihak melalui pemberdayaan masyarakat efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sedangkan pada tahun 2019 program peningkatan keberdayaan masyarakat gampong untuk program kegiatannya ada yang berbeda dari tahun lalu output yang diharapkan dapat tersedianya pemberdayaan Lembaga dan organisasi gampong. Adapun dalam program ini terdiri dari beberapa program kegiatan yang dilaksanakan yaitu: *Pertama*, kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat gampong, output yang diharapkan dapat tersedianya pemberdayaan Lembaga dan organisasi *gampong*. Sedangkan pada tahun 2019 yang mendukung program kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi masyarakat gampong yaitu berupa:

1) Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Kute kab. Aceh Tenggara

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Kute Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 dilaksanakan dengan tujuan memahami: kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong pembangunan gampong melalui BUMG, filosofi dan kelembagaan BUMG, pendekatan Bisnis Model Canvas untuk Analisa usaha BUMG, pengembangan BUMG melalui bantuan Teknologi Digital (*Web Profil dan E-Commerces*), Studi kelayakan usaha BUMG dan *Busineses Plan*, sistem pelaporan keuangan BUMG sesuai psaketap, peran BNI kreatif dan agen 46 dalam pengembangan BUMG.

2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Lembaga Adat dan Seni Budaya Kute Tahun 2019

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Lembaga Adat dan Seni Budaya Kute Tahun 2019 dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tenggara dengan jumlah peserta 80 orang terdiri dari unsur

Imuem Mukim, penghulu, tokoh adat, tokoh seni dan tokoh pemuda. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan bimtek tersebut adalah meningkat kesadaran dan wawasan masyarakat tentang pentingnya pelestarian adat istiadat dan budaya Kute sebagai salah satu perwujudan pengabdian kepada masyarakat di Kute, meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun rencana penguatan kapasitas Lembaga adat kute, memperkuat peran dan fungsi pengelola Lembaga adat seni budaya Kute guna mendukung program pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis adat dan budaya di kabupaten Aceh Tenggara. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini: orientasi dan bina suasana (Bimtek, form isian Lembaga adat, Pokja PABA, Monev, Regulasi, sdb), strategi penyelenggaraan keistimewaan Aceh dalam bidang pembinaan adat yang islami, peran DPMG dalam pelestarian adat dan budaya Aceh, peran DPMG Kab Aceh Tenggara dan pemanfaatan dana desa dalam penguatan kapasitas Lembaga adat, sosialisasi permedagri no.18 yang Lembaga kemasyarakatan desa dan Lembaga adat desa.

*Kedua*, pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat, dengan output yang diharapkan jumlah peserta rakor pemberdayaan masyarakat tercapai 176 orang, dan jumlah dokumen perencanaan program yang dihasilkan sebanyak 14 dokumen. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu:

- 1) Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Se-Aceh

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkolaborasikan DPMG Aceh, Kabupaten/kota dan koordinator pendamping wilayah dalam satu kesatuan persepsi penanganan Dana Desa, menyelaraskan usulan program dan kegiatan 2021 antara Provinsi/Kabupaten, sebagai komitmen yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak, membahas isu-isu strategis antara lain: arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh

Tahun 2021, optimalisasi peran pedamping gampong, perencanaan dan dana desa tahun 2020 tepat waktu, tata kelola perencanaan Gampong yang berkualitas dan fokus kepada stanting, kemiskinan serta narkoba, penyaluran dan penggunaan dana desa dengan mekanisme (siskeudes, sipede, omspan, optimalisasi peran Lembaga kemasyarakatan gampong, pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu, kewenangan gampong dan tata kelola aset milik gampong.

*Ketiga*, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, dari TTG ini akan muncul inovasi-inovasi baru yang bisa digunakan oleh masyarakat, membantu masyarakat dalam peningkatan perekonomiannya, membantu masyarakat agar kerjanya lebih cepat dan produksinya lebih banyak, contohnya seperti pentiris minyak goreng, pemecah pinang, agar program tersebut tercapai maka pada tahun 2019 melakukan beberapa kegiatan yang akan mendukung, kegiatannya sebagai berikut:

1) Pelatihan pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)

Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan, menguatkan dan mamandirikan fungsi kelembagaan Teknologi Tepat Guna (TTG) (posyantek/posyantekdes) di desa, kecamatan, kabupaten/kota bagi masyarakat, memperluas pemanfaatan TTG sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melakukan kerjasama teknologi tepat guna dengan berbagai pihak melalui pemberdayaan masyarakat secara efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

2) Penyelenggaraan gelar Teknologi Tepat Guna se-Aceh dan Lomba Inovasi TTG Tahun 2019

Penyelenggaraan Gelar TTG Se-Aceh XIV Tahun 2019, merupakan salah satu media penyampaian informasi terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan hasil

kreasi serta inovasi di bidang TTG baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun dari Lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta serta bidang lainnya, sekaligus sebagai forum untuk menggali/menumbuhkan kembangkan gagasan pemikiran dalam penyusunan program pembangunan khususnya bidang TTG di masa datang.

Pelaksanaan Lomba Inovasi TTG Se-Aceh X tahun 2019 merupakan wahana strategis bagi pemerintah daerah Tingkat Provinsi Aceh dalam menyebarluaskan keberhasilan Inovasi TTG, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui TTG dari masing-masing Kabupaten/Kota. Pameran dan lomba diikuti Kab/Kota se-Aceh, merupakan kegiatan yang memperagakan berbagai keberhasilan pengelolaan pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan potensi gampong secara inovatif dan menampilkan alat TTG unggulan pada masing-masing Stand Pameran, menampilkan dekorasi stand yang mengangkat ciri khas dan potensi/kearifan lokal daerah masing-masing.

Keempat, pengembangan potensi Sumber Daya Alam melalui penerapan Inovasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Gampong pada tahun 2019 dilaksanakan 4 (empat) kabupaten, yaitu di kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah mewujudkan komitmen, kemitraan serta dukungan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terhadap pengembangan dan pengelolaan potensi sumber daya alam gampong yang inovatif menuju *one village one product*. Hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini

adalah: tersosialisasinya program pengembangan dan pengelolaan SDA gampong yang inovatif untuk menggali gagasan dan pemikiran yang inovatif dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan, Sumber Daya Alam (SDA) dalam pemberdayaan masyarakat gampong, meningkatnya pengetahuan, peran dan aparatur desa/tenaga aktif di Bidang Sumber Daya Alam dalam pengembangan dan pengelolaan potensi SDA gampong, meningkatnya kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka terwujudnya pemahaman konsep, tujuan dan arah dari program pengembangan SDA *gampong* yang inovatif, menjadi stimulus bagi pemerintah gampong untuk mewujudkan kinerja yang optimal dalam memberdayakan masyarakat gampong.

2) Rakor pengembangan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Gampong

Kegiatan ini bertujuan melahirkan rekomendasi untuk mewujudkan komitmen dan kemitraan dalam penyusunan program serta dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota terhadap pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam.

*Kelima*, penataan dan pengembangan Kawasan gampong, dari beberapa desa akan dipetakan menjadi satu kawasan, dalam beberapa gampong kita akan membentuk kawasan-kawasan kegiatan misalnya ada kawasan perikanan yang mengembangkan potensi tersebut tetapi gagal atau tidak sampai selesai, jadi gampong lain yang memiliki kawasan yang sama akan dijadikan satu kawasan nanti dari situ dilakukan pembinaan dan akan dikembangkan bersama, maka dari ini diharapkan membantu lebih baik lagi karena dikerjakan bersama. Jadi agar hal tersebut tercapai maka yang dilakukan pada tahun 2019 untuk mendukung program kegiatan ini sebagai berikut:



1) Bimtek pengelolaan keramba ikan air tawar Kawasan gampong

Kegiatan Bimtek keramba ikan air tawar Kawasan gampong tahun 2019 dilaksanakan di Banda Aceh dan waktu pelaksanaan selama 4 hari dengan jumlah peserta 35 orang yang diikuti 2 kabupaten yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Bireuen. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan bimtek tersebut adalah untuk menciptakan sumber daya manusia dalam memahami cara memelihara ikan air tawar Kawasan gampong dengan menggunakan keramba, mendorong pengembangan produk Kawasan gampong, mendorong terciptanya kerja sama gampong di bidang perekonomian dan terbentuknya Kawasan minapolitan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat gampong. Materi yang di berikan yaitu, arah dan kebijakan pemberdayaan masyarakat, komitmen Pemerintah Aceh dalam pengentasan kemiskinan, pengembangan Kawasan perdesaan berbasis produk unggulan, teknis pembentukan kelembagaan Kawasan gampong, teknis pengelolaan/pembuatan keramba Ikan Air Tawar Kawasan gampong, pembibitan dan pemeliharaan Ikan Air Tawar Kawasan gampong, pengolahan pakan Ikan dari bahan baku SDA Kawasan gampong, pencegahan/penanggulangan hama penyakit pada Ikan Air Tawar Kawasan gampong, pengolahan berbagai macam produk Ikan Air Tawar pasca panen.

2) Workshop percepatan pembentukan dan penetapan Kawasan gampong

Kegiatan Workshop percepatan pembentukan dan penetapan gampong tahun 2019, dilaksanakan melihat latar belakang mengapa penataan dan pembangunan Kawasan perdesaan harus menjadi fokus utama karena angka kemiskinan masih menjadi kendala utama dalam setiap proses pembangunan perdesaan.

Disamping itu prasarana dan sarana dasar sebagian masih dibawah standar serta masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintah di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi. Peserta terdiri dari Kepala DPMG Kab/Kota, Kepala Bappeda dan Tenaga Ahli TTG Kab/Kota. Tujuan pelaksanaan workshop percepatan pembentukan dan penetapan Kawasan Gampong adalah mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pembangunan Kawasan disetiap kab/kota sesuai yang diatur dalam perundang-undangan. Hasil yang diharapkan yaitu menghasilkan kesamaan persepsi antara DPMG Kab/Kota dengan Bappeda Kab/Kota dalam menentukan Kawasan prioritas komoditas unggulan, pembangunan Kawasan perdesaan yang kan dilakukan tidak berpeluang untuk menimbulkan konflik kepnetingan, memperhatikan kearifan lokal, pembangunan Kawasan perdesaan untuk mempercepat kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

### 3) Bimtek Asosiasi Program Pamsimas Aceh

Pengurus asosiasi pengelola SPAMS perdesaan kabupaten dan pengurus yang diundang dari asosiasi kab/kota pengurus Asosiasi provinsi. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan bimtek tersebut adalah meningkatkan kapasitas pengurus asosiasi pengelola SPAMS perdesaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meningkatkan pengurus asosiasi pengelolaan SPAMS perdesaan agar dapat melakukan pendampingan kepada KPSPAMS sehingga jumlah SPAMS yang tidak berfungsi semakin berkurang, peningkatan kerjasama dan tanggungjawab antara Asosiasi Pamsimas dengan DPMG Kab/Kota.

#### b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong

Dalam program ini pada tahun 2018 indikator yang ingin dicapai jumlah Lembaga ekonomi gampong yang aktif, jumlah usaha ekonomi

masyarakat gampong yang dikembangkan, sedangkan pada tahun 2019 yang menjadi indikator kinerjanya yaitu persentase BUMG yang tumbuh serta persentase tumbuhnya usaha ekonomi produktif masyarakat gampong.

Untuk mendukung program ini maka kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Pembinaan, Pengembangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/Desa (P3MG/D), output yang diharapkan dapat meningkatnya kinerja pelaku Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/Desa. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program kegiatan ini sebagai berikut:

1) Pendamping desa

Pendamping profesional P3MD se-Aceh berjumlah sebanyak 2.788 orang.

2) Kegiatan Bimtek SIPEDE tahun 2018

Untuk membantu pelaksanaan UU Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dimana desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa, serta untuk mendukung pengendalian, pelaporan, transparansi penggunaan Dana Desa, dikembangkanlah sebuah sistem informasi online yang bisa diakses berbagai pihak dimana data sumbernya langsung didapat dari desa melalui Tenaga Pendamping Profesional P3MD.

Sistem ini berfungsi untuk memberikan pendataan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), volume pekerjaan, realisasi biaya, pendataan tenaga dan upah kerja, serta detail kegiatan lainnya termasuk foto dokumentasi kegiatan desa. Sistem ini juga akan memberikab gambaran / *profile* suatu desa dari kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di desa tersebut.

Sehubungan dengan maksud tersebut, maka untuk penerapan Sistem Informasi Pembangunan Desa di Provinsi Aceh secara tepat dan akurat, peningkatan kapasitas kepada seluruh Tenaga Pendamping Desa dan pemenuhan data kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018, DPMG Aceh mengadakan Pelatihan lanjutan Aplikasi SIPEDE kepada Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Aceh sebanyak 105 orang.

SIPEDE (Sistem Informasi Pembangunan Desa) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memantau proses pelaporan sekaligus memberikan informasi perencanaan kegiatan Pembangunan Desa. Adapun fokus monitoring Keuangan APBN (Dana Desa) dapat disajikan secara detail beserta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan yang dimaksud dapat dikategorikan sesuai dengan Bidang dan Prioritas penggunaan Dana Desa.

*Kedua*, Workshop Bansos Se-Aceh Tahun 2018, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka:

- 1) Berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 10 Kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
- 2) Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam pembangian Bantuan Sosial Beras Sejahtera (BANSOS RASTRA).
- 3) Memantapkan tindak lanjut pembinaan, pengawasan dan pendampingan program pemberdayaan masyarakat dibidang penguatan usaha ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia sebagai penggerak sekaligus pelaksana.

Sedangkan pada tahun 2019 untuk mendukung program ini maka kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

*Pertama*, pembinaan dan pengembangan keuangan gampong, output yang diharapkan jumlah peserta Tim pelaksana inovasi desa (TPID) kecamatan dan Tim inovasi kab/kota (TIK) yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan keuangan gampong (dana desa) sebanyak 312 orang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung program kegiatan ini yaitu:

- 1) kegiatan Bimtek Tupoksi Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) dalam pengelolaan bantuan pemerintah Program Inovasi Desa.

Kegiatan Bimtek TPID dalam pengelolaan bantuan pemerintah Program inovasi Desa diikuti oleh 103 orang dari kab./kota dari unsur ketua TPID Kecamatan 6 orang dari panitia. Program inovasi desa (PID) hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta memperkuat peran pendampingan P3MD di desa. PID merupakan inovasi dalam praktek pembangunan dan pertukaran pengetahuan, inovasi ini dipetik dari realita/hasil kerja desa-desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk di tularkan secara meluas.

Dana desa dan membangun kapasitas desa melalui perekonomian masyarakat, sehingga ke depan diharapkan bisa peka terhadap kebutuhan masyarakat dan emningkatkan pendapatan perdesaan sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Tujuan dari program Inovasi Desa (PID) untuk meningkatkan kualitas penggunaan Bimtek Tupoksi TPID antara lain : meingkatkan ketrampilan kepada TPID untuk dapat melaksanakan PID sesuai yang diharapkan, emngembangkan kemampuan TPID dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan

bantuan pemerintah PPID, mengembangkan fungsi-fungsi TPID untuk menjalankan PID, meningkatkan pemahaman tentang regulasi, pedoman dan juknis PID, dalam pelaksanaan sesuai tugas pokok TPID, menyediakan bahan rumusan program dan kebijakan peningkatan akseibilitas PID. Output yang dapat dicapai dari Bimtek tersebut yaitu; peningkatan keterampilan TPID Kecamatan dalam pelaksanaan PID, terciptanya Akuntabilitas Laporan Keuangan Pelaksanaan PID sesuai yang diharapkan, terselenggaranya kegiatan PID sesuai yang diharapkan, terselenggaranya Kegiatan PID sesuai yang diharapkan, Terselenggaranya kegiatan PID sesuai yang diharapkan, tersedianya informasi faktor/indikator yang mempengaruhi rendahnya Akseibilitas PID, tersedia bahan rekomendasi kebijakan dan program intervensi untuk peningkatan pelaku PID, dan peningkatan pemahaman tentang laporan pertanggungjawaban sesuai dengan PMK 173 tahun 2019.

*Kedua*, peningkatan kapasitas Lembaga dan usaha ekonomi masyarakat gampong, outputnya yang diharapkan jumlah Lembaga dan usaha ekonomi masyarakat gampong yang difasilitasi/dibina diharapkan mencapai 286 BUMG, Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pendukung untuk program ini adalah BUMG. Badan Usaha Milik Desa/Gampong (BUMG) adalah Lembaga Usaha Gampong yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Gampong dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMG sebagai suatu Lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usahanya BUMG harus bersumber dari masyarakat.

Pengembangan BUMG diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong melalui pengembangan Lembaga

ekonomi gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pada tahun 2018 DPMG melakukan strategi penguatan untuk BUMG melalui kegiatan fasilitasi dan membina pengurus/pengelola BUMG agar benar-benar memahami secara teknis pelaksanaan pengembangan BUMG untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia agar menjadi badan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat gampong. Sedangkan pada tahun 2019 DPMG melakukan strategi penguatan untuk BUMG melalui Meng-update data Bumdes yang akurat dan siapkan Profil Bumdes, memilih Bumdes sebagai *Pilot Project* (manajemen & Produk Unggulan), melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (Universitas, Perbankan, Kadin/pengusaha, NGO, perusahaan-perusahaan dan SKPA terkait, peningkatan kapasitas pengelola (studi banding/job training/Magang), mengembangkan Bumdes dengan pola konservasi hutan berbasis ekonomi.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program kegiatan tersebut, yaitu:

1) Bimtek pembentukan dan pengelolaan BUMG Se-Aceh

Secara umum tujuan Bimtek pembentukan dan pengelolaan BUMG adalah untuk membuka wawasan para peserta mengenai BUMG sehingga kedepannya dapat mendorong pendirian BUMG dan mendukung pengembangannya. Kegiatan ini diikuti oleh 132 orang, peserta yang merupakan unsur Aparatur Pemerintah Gampong (Keuchik), DPMG Kab/Kota, Dpmg Aceh.

2) Bimtek penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMG Se-Aceh

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya Bimtek penguatan dan pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Gampong se-Aceh adalah memfasilitasi dan membina pengurus/pengelola BUMG agar benar-benar memahami secara

teknis pelaksanaan pengembangan BUMG untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya agar menjadi badan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat gampong sebuah usaha desa. Kegiatan tersebut diikuti oleh 176 orang peserta yang merupakan unsur pengurus/pengelolaan (Manager) BUMG.

3) Bimtek penguatan BUMG Kota Banda Aceh

Tujuan penyelenggaraan Bimtek penguatan BUMG Kota Banda Aceh pengembangan usaha ekonomi melalui BUMG, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi gampong, melaksanakan kebijakan yang telah dilakukan sebagai langkah strategis terhadap rencana pembinaan, pengawasan dan pendampingan penguatan kelembagaan ekonomi, alternatif dan solusi terhadap permasalahan bidang pengembangan BUMG antara pemerintah Provinsi dan Kab/Kota. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta Bimtek Penguatan Badan Usaha Milik Gampong Kota Banda Aceh tahun 2019 berjumlah 57 orang yaitu dari unsur perangkat gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong/Tokoh Pemuda dan Pengurus BUMG.

4) Bimtek pengelolaan dan pengembangan BUMG Se Aceh

Tujuan penyelenggaraan Bimtek pengelolaan dan pengembangan Se-Aceh Tahun 2019 adalah pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengembangan usaha ekonomi gampong melalui badan usaha milik gampong, menyamakan persepsi antara Pemprov dan Pemkab dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, melaksanakan kebijakan yang telah dilakukan sebagai langkah strategis, mencari alternatif dan solusi terhadap permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengembangan



BUMG antara pemprov dan Pemkab. Kegiatan tersebut diikuti oleh 182 orang peserta.

*Ketiga*, peningkatan kebutuhan peyalanan dasar ekonomi masyarakat gampong, output yang diharapkan jumlah peserta yang mengikuti rakor pembangunan gampong tertinggal mencapai 100 orang dan jumlah rumah masyarakat miskin yang direnovasi sebanyak 14 unit. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1) Rapat koordinasi pembangunan Gampong tertinggal

Rapat koordinasi pembangunan Gampong tertinggal dilaksanakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan gampong tertinggal dan peningkatan gampong mandiri sesuai dengan visi misi Gubernur Aceh 2017.

2) Rapat sosialisasi Teknik pelaporan / pertanggungjawaban Rumah Masyarakat miskin

Peserta pada kegiatan tersebut sebanyak 40 orang dari undur keuchik, ketua TPK, bendahara dan penerima manfaat. Rapat sosialisasi ini dilaksanakan untuk memahami dan mampu mempertanggungjawaban penggunaan dana bantuan renovasi rumah masyarakat miskin, materi yang di berikan adalah pelaporan pertanggungjawaban Rumah Masyarakat Miskin.

3) Bantuan renovasi rumah masyarakat miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak bagi masyarakat miskin, mendukung pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat miskin, mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat, karena temat tinggal yang layak adalah kebutuhan dasar yang harus memiliki terutama masyarakat miskin, meningkatkan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat gampong guna menggerakkan kembali kegiatan gorong royong, emningkatkan kualitas lingkungan sebagai

tempat tinggal masyarakat miskin. Sasaran renovasi masyarakat miskin tahun 2019 sebanyak 14 unit di kabupaten pidie.

### 3. Rencana Strategis

Rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dengan periode 5 (lima) tahun, tahun, terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Rencana Strategis DPMG Aceh menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan DPMG Aceh. Isi dalam dokumen Rencana Strategis DPMG Aceh menjabarkan tentang kebijakan yang dilakukan secara komprehensif dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis dengan dinamika tuntutan perubahan dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Aceh khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya selama periode.

Untuk mewujudkan perumusan program DPMG melakukan perencanaan yang baik, betul, tepat sasaran, karena dari perencanaan menjadi titik awal dalam mewujudkan program agar tercapai tujuan, setelah perencanaannya sudah direncanakan dengan seksama dan matang, maka akan memudahkan untuk pelaksanaannya, yang mana pelaksanaannya hanya menyesuaikan dengan rencana yang telah dibuat dan harus ada partisipatif dan proaktif dari masyarakat.

### 4. Kendala dan Solusi

Dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh pada tahun 2019, terdapat kendala yang cukup berpengaruh yakni:

- a. Terhadap pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA), masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat gampong tentang pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

- b. Untuk kegiatan teknologi tepat guna, masih minim minat dari masyarakat yang mengikuti gelar/evet, hal ini mungkin diakibatkan dari masih kurangnya informasi dan pengetahuan tentang Teknologi Tepat Guna serta masih kurangnya inovasi alat ttg di pasarkan.
- c. Masih kurangnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan menggunakan Teknologi Tepat Guna.
- d. Disamping itu, untuk kegiatan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), baik tingkat desa maupun kecamatan, belum seluruhnya membentuk dan mengaktifkan pengelolaan posyantek.
- e. Kurang tersedianya anggaran untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan gampong.
- f. Masih kurangnya peran aktif Lembaga pemberdayaan masyarakat gampong dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di gampong.

Maka, dari kendala-kendala yang telah disebutkan dia atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh memberikan solusi, berikut ini adalah solusinya:

- a. Perlu adanya sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Gampong yang dikoordinasi langsung oleh pakar/ahli di bidang tersebut serta kerjasama dengan dinas terkait.
- b. Perlu diberikannya pelatihan/Bimtek dan Sosialisasi kepada masyarakat gampon, sehingga kedepannya gelar TTG diharapkan tidak hanya dilevel provinsi dan nasional, akan tetapi mulai dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.
- c. Perlu adanya pelatihan atau bimtek yang berkelanjutan agar setiap perangkat gampong bisa lebih meningkatkan kapasitasnya serta kinerjanya.
- d. Perlu adanya pelatihan atau bimtek kepada Lembaga pemberdayaan masyarakat gampong dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan pasca program.

- e. Perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus BUMG dalam pengelolaan Manajemen BUMG.
- f. Perlu dukungan dana yang memadai dalam mendukung tercapainya program-program pemberdayaan masyarakat.

5. Pengukuran capaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPMG pada tahun 2018 dan 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 4.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi bahwa hasil realisasi capaian kinerja untuk tahun 2018 melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh berbagai faktor pendukung, selain sumber daya aparatur gampong yang semakin besarnya dana desa diterima gampong baik yang bersumber dari APBN maupun APBA. Pelaksanaan program dana desa juga cukup memberikan dorongan yang

cukup memberikan dorongan yang cukup signifikan dalam program pembangunan dan pengembangan gampong.

Untuk capaian kinerja yang telah direalisasi pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Jumlah gampong yang cepat berkembang dengan target 985 belum memenuhi capaian target yang telah ditetapkan, hanya terealisasi 868 gampong dengan persentase 88.12% dengan kode warna hijau muda dan memiliki kriteria tinggi, perolehan capaian kinerja untuk indikator jumlah gampong yang cepat berkembang didapat dari variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan kependudukan, ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan, Lembaga kemasyarakatan, kinerja pemerintahan desa dan kelurahan, dan Lembaga kemasyarakatan.

Untuk jumlah Lembaga dan usaha ekonomi gampong yang aktif tercapai sebanyak 3853 BUMG dengan persentase 100% dengan kode hijau tua dan memiliki kriteria sangat baik. Untuk jumlah TTG yang diterapkan masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan masyarakat dari target 40 TTG tidak dapat terealisasi dikarenakan sangat terbatasnya anggaran untuk pengadaan alat TTG tersebut yang akan dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan potensinya.

Jumlah Kawasan gampong yang akan dikembangkan sebanyak 5 kawasan dengan persentase 100% yang memiliki kode hijau tua dengan kriteria sangat baik. Hal ini dikarenakan pembangunan Kawasan perdesaan harus menjadi fokus utama karena angka kemiskinan masih menjadi kendala utama dalam setiap proses pembangunan perdesaan. Disamping itu prasarana dan sarana dasar sebagian masih dibawah SPM, serta masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan ditingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Kawasan perdesaan masih merupakan Kawasan yang

tertinggal dan *stagnan*. Bertolak dari permasalahan diatas ada beberapa gampong di kab/kota yang memiliki potensi SDA sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang akan dikembangkan. Adapun tujuan tujuan dari pengembangan Kawasan adalah untuk mengetahui potensi SDA yang ada digampong yang nantinya dapat dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi.

Yang terakhir untuk jumlah murid TK/RA yang meningkat gizinya di lokasi terpencil, terluas, termiskin, dan terisolir sebanyak 5512 murid dengan persentase 100% memiliki kriteria hijau tua dengan kriteria sangat baik melalui Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah di 23 Kabupaten/Kota Se Aceh yang telah terpilih, ditetapkan dan memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan PMT-AS.

Sedangkan pada tahun 2019 persentase gampong yang cepat berkembang dengan target 4% dari jumlah gampong 6.497 gampong memiliki kode tua dengan kriteria sangat baik, capaian realisasi melebihi target yang telah ditetapkan dengan persentase 13,30%, perolehan capaian yang signifikan tersebut dengan keberadaan dan pemanfaatan dana desa sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi gampong.

Pada tahun 2019 yang telah direalisasi dijelaskan sebagai berikut. Untuk jumlah Kawasan gampong yang akan diidentifikasi dan dikembangkan terealisasi dengan capaian 80.00% masih dalam kode warna hijau muda dengan kriteria tinggi, dengan terkendala anggaran dan waktu, hal ini dikarenakan pembangunan Kawasan perdesaan harus menjadi fokus utama dikarena angka kemiskinan masih menjadi kendala utama dalam setiap proses pembangunan perdesaan. Disamping itu prasarana dan sarana dasar sebagian masih dibawah SPM, serta masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan ditingkat lokal dan kelombagaan sosial ekonomi. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Kawasan perdesaan masih merupakan Kawasan yang tertinggal dan *stagnan*. Kawasan gampong yang akan diidentifikasi dan dikembangkan dimulai di beberapa kabupaten/kota, yaitu: kabupaten Aceh Jaya,

Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun salah satu tujuan dari pengembangan Kawasan adalah untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya yang dapat dioptimalkan masyarakat dan pemerintah dalam lingkup pembangunan Kawasan.

Untuk jumlah Teknologi Tepat Guna yang diterapkan masyarakat sesuai dengan potensi SDA dan kebutuhan dengan target 12 TTG dapat teralisasi dengan capaian 100% dengan kode hijau tua dan memiliki kriteria sangat baik .

Realisasi capaian kinerja untuk tahun 2019 melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh berbagai faktor pendukung, selain sumber daya aparatur gampong yang semakin membaik melalui sosialisasi dan bimbingan teknis juga didukung dengan semakin besarnya dana desa diterima gampong baik yang bersumber dari APBN maupun APBA. Pelaksanaan program dana desa juga cukup memberikann dorongan yang cukup signifikan dalam program pembangunan dan pengembangan gampong. Penyusunan LKJ tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban RPJM tahap kesatu sehingga untuk tahun pembandingan masih digunakan tahun sebelumnya, karena RPJM dan Renstra Tahun 2017-2022 masih merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, dan untuk program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) juga merupakan kelanjutan program dan kegiatan sebelumnya.

#### 6. *Maqashid Syariah*

Dalam program pengentasan kemiskinan ini di analisis dengan indikator *Maqashid Syariah* karena ruang lingkup yang akan dibahas lebih spesifik lagi dalam islam. Jika, indikator *Maqashid Syariah* dijadikan sebagai landasan dalam pengentasan kemiskinan maka yang didapatkan manfaatnya tidak hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat.

Oleh karena itu, berikut di bawah ini akan dijelaskan indikator *Maqashid Syariah* yang akan dihubungkan dengan program-program di DPMG Aceh dan berikut ini tabel penjelasannya:

Tabel 4.3 Penggunaan *Maqashid Syariah* di Program-Program Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat *Gampong Aceh*

Maqashid Syariah	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019
Menjaga agama				
Menjaga jiwa	Rapat kerja Penyediaan Makanan Tambahkan Anak Sekolah (PMT-AS) Se-Aceh			
	Penguatan kader pendampin gan ibu hamil dan pengguna an Buku KIA di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Lhoksuma we,			



	Bireuen, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Jaya			
	Integrasi program PKK dengan Program Indonesia Sehat- Pendekatan Keluarga			
Menjaga akal	Pelatihan perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat gampong	Sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)	Kegiatan Bimtek SIPEDE tahun 2018	Kegiatan Bimtek Tupoksi Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) dalam pengelolaan bantuan pemerintah Program Inovasi Desa
	Sosialisasi pemanfaatan	Rakor pengemba		Bimtek pembentuk

	n dan pengelolaa n Sumber Daya Alam	ngan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Gampong		an dan pengelolaa n BUMG Se-Aceh
		Bimtek pengelolaa n kerambah ikan air tawar kawasan gampong		Bimtek penguatan dan pengemban gan kelembaga an BUMG Se-Aceh
		Bimtek assosiasi program pamsimas Aceh		Bimtek penguatan BUMG Kota Banda Aceh
				Bimtek pengelolaa n dan pengemban gan BUMG Se Aceh
Menjaga keturunan	Rapat kerja Penyediaan Makanan Tambah			

	Anak Sekolah (PMT-AS) Se-Aceh			
	Penguatan kader pendampingan ibu hamil dan penggunaan Buku KIA di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Lhoksumawe, Bireuen, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Jaya.			
Menjaga harta	Pengembangan ekonomi kreatif daerah pesisir	Rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat Se-Aceh	Workshop Bansos Se-Aceh tahun 2018	Peningkatan kebutuhan pelayanan dasar ekonomi masyarakat gampong

		Bimtek pengelolaan kerambah ikan air tawar kawasan gampong		
		Workshop percepatan pembentukan dan penetapan kawasan <i>gampong</i>		
Menghilangkan Kesulitan dan kesusahan	Penyelenggaraan gelar Teknologi Tepat Guna XII Se-Aceh dan lomba inovasi TTG tahun 2018	Fasilitasi pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Kute Kab. Aceh Tenggara	Pendamping desa	
	Pelatihan pengelola Posyantek	Pelatihan pengelola Pos Pelayanan Teknologi Tepat		

		Guna (Posyante k)		
		Penyeleng garaan gelar Teknologi tepat Guna se-Aceh dan Lomba Inovasi TTG tahun 2019		
Menjaga dan memelihara		Bimbinga n teknis pengelolaa n Lembaga adat dan seni		

a. Menjaga Agama

Program kegiatan yang khusus untuk Syariah itu tidak dirumuskan tetapi semua program yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan Syariah. Tetapi di DPMG Aceh sendiri mereka mempunyai misi yang khusus untuk menjaga agar Syariah Islam tetap terjaga, misinya yaitu memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Safi'yah

dengan tetap menghormati mazhab lain. Hal ini juga didorong oleh tingginya nilai-nilai keislaman dan budaya dalam masyarakat, khususnya di gampong.

Pemberdayaan yang dilakukan pada dasarnya itu sudah mengikuti Syariah karena membantu masyarakat yang membutuhkan, yang mana dalam agama menganjurkan untuk menolong sesama manusia. Dinas pemberdayaan di Aceh yang berbeda provinsi lain dari peraturan pemerintah, yang mana untuk provinsi Aceh program yang dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan qanun Aceh yang berisi tentang syariah islam. Dan setiap ada kegiatan pasti disertakan dengan pembukaan baca doa.

Dan dalam pelaksanaan program kegiatan mengikutsertakan tokoh agama/adat di gampong yang diberdayakan, yang mana tokoh agama tersebut akan berupaya program yang diberikan tetap menjaga agama.

Jika program kegiatan yang dirumuskan terbentur atau bertentangan dengan agama, maka program ini tidak akan bisa dilaksanakan atau disahkan karena tidak sesuai dengan qanun-qanun Syariah dan masyarakat yang diberdayakan juga tidak akan mau berpartisipasi jika bertentangan dengan agama. Program kegiatan yang khusus untuk Syariah itu tidak dilaksanakan tetapi semua program kegiatan yang dirumuskan berdasarkan Syariah. Karena untuk provinsi Aceh benteng syariahnya cukup kuat.

#### b. Menjaga Jiwa

Dalam pengentasan kemiskinan juga berkaitan dengan menjaga jiwa karena dalam islam kehidupan adalah salah satu anugerah yang diberikan kepada makhluk hidup seperti manusia. Dengan kehidupan manusia dapat menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan dunia dan akhirat.

Dalam menjaga jiwa masyarakat DPMG merumuskan berbagai program kegiatan yang akan menjaga kehidupan, salah satunya pada tahun 2018 yaitu PTMAS yang menjadi sasarannya adalah anak-anak

PAUD, TK, SD/MI, yang PTMAS ini dilakukan untuk pencegahan stunting. Memberikan materi tentang percepatan target air minum dan sanitasi. Dan juga program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Kemudian ada program kegiatan penguatan kader pendampingan ibu hamil, program uni dilakukan untuk meningkatkan Kesehatan bagi ibu dan bayi dari hamil, bersalin sampai nifas. Dan terakhir ada program PKK dengan program Indonesia sehat yang berkerjasama dengan pendekatan keluarga.

Untuk tahun 2019 tidak ada program dalam penanggulangan kemiskinan dengan mempertimbangkan dari segi menjaga jiwa masyarakat.

Agar motivasi masyarakat terus terjaga dalam melaksanakan program, DPMG memberikan motivasi melalui kepala gampong, karena kepala gampong adalah orang-orang yang terpilih oleh masyarakat dan kepala gampong akan mengkoordinasi gamponnya yang mana masyarakatnya akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program. DPMG mengpublikasikan semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di media sosial atau di webnya, dari ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan termotivasi untuk berpartisipasi.

Dalam perumusan program DPMG juga melakukan strategis pada meningkatnya motivasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan gampong, merupakan tingkat partisipasi masyarakat/keikutsertaan masyarakat gampong, jumlah pengurus PKK gampong yang mengikuti desiminasi posyandu terintegrasi dan jumlah anak sekolah yang mendapat PMT-AS sudah mulai meningkat dengan adanya rapat koordinasi dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh.

c. Menjaga akal

Dalam agama islam kewajiban manusia untuk memahami alam semesta, tanpa pengetahuan manusia akan kesulitan atau bahkan akan

menderita. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang kewajiban mencari ilmu.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas tentang kewajiban mencari ilmu, dengan ini program-program yang dirancang DPMG tetap menjaga dari aspek akal dengan cara bekerjasama dengan Dosen atau para ahli, contohnya UNSYIAH dan DPMG melakukan sosialisasi daun kelor kepada masyarakat dan akan menjelaskan apa manfaat dari daun kelor tersebut dan melatih masyarakat bagaimana proses tanaman daun kelor. Contoh lain seperti membantu menemukan alat teknologi, yang mana alat tersebut akan membantu masyarakat dalam melakukan operasional produksi, yang juga akan diperjualbelikan kepada masyarakat lain. Bekerjasama dengan para ilmuwan tujuannya untuk meningkatkan atau mengembangkan kapasitas pengetahuan masyarakat.

Salah satu program yang mendukung untuk menjaga akal masyarakat pada tahun 2018 yaitu DPMG melakukan pelatihan perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat *gampong*. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan wawasan dan pola pikir masyarakat dalam menentukan dan menyusun perencanaan *gampong* baik jangka pendek, menengah dan panjang, serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para pengurus para pengurus LKMD/*Tuha Lapan Gampong*. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 melakukan kegiatan sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen, kemitraan serta dukungan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terhadap pengembangan dan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam *Gampong* yang inovatif menuju *one village one product*.

Pada tahun 2019 ada beberapa program yang mendukung untuk menjaga akal, salah satunya Bimtek pengelolaan kerambah ikan air tawar kawasan *gampong* tujuannya untuk menciptakan sumber daya manusia dalam memahami cara memelihara ikan air tawar. Dan kegiatan lain yaitu Bimtek Tupoksi Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID)



dalam pengelolaan bantuan pemerintah Program Inovasi Desa, kegiatan ini dilakukan untuk menjaga akal dengan upaya mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta memperkuat peran pendampingan P3MD di desa.

Bukan hanya pengetahuan dari segi ekonomi tetapi juga dari segi kesehatan seperti meningkatkan kapasitas pengurus Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga jumlah SPAMS yang tidak berfungsi semakin berkurang.

Persentase capaian terhadap kapasitas aparatur pemerintahan gampong yang baik dalam mengelola pemerintahan gampong dengan target yaitu 65% dengan melebihi target 62%, program kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa seperti memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan. Untuk mengembangkan intelektual aparatur gampong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti mengolah data desa atau mengembangkankan dana desa menjadi lebih produktif, sehingga terwujudnya aparatur gampong yang memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas. Untuk mengembangkan intelektual sasarannya bukan hanya aparatur desa tetapi juga masyarakat. Masyarakat akan diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi kegiatan yang dilakukan.

d. Menjaga keturunan

Dalam programnya pada tahun 2018 DPMG Aceh juga menjaga dari sisi keturunan seperti merumuskan program penguatan kader pendampingan Ibu Hamil, kegiatan ini jelas dilakukan untuk menjaga keturunan agar menurunkan angka kematian ibu dan anak, dengan pelatihan ini ibu hamil dapat meningkatkan kesehatan, bersalin, dan nifas.

Dan juga program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Se-Aceh, tujuannya untuk meningkatkan gizi anak usia dini

di lokasi terpencil, terluas, termiskin, terisolir sebanyak 4.969 murid terealisasi sebanyak 4.733 murid atau sebesar 95,25% di sesuaikan dengan alokasi anggaran melalui pemberian makanan tambahan anak sekolah di 239 kabupaten/kota Se Aceh yang telah terpilih ditetapkan dan memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan PMT-AS. Pada tahun 2019 untuk program kegiatan di DPMG tidak ada program yang menjaga keturunan.

Faktor kesehatan menjadi hal yang penting dalam masa pertumbuhan balita, sehingga tersedia bantuan untuk memenuhi gizi anak-anak memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan anak.

Program yang dirancang untuk semua kategori tidak dibatasi hanya kepada orang dewasa atau hanya lelaki tetapi juga semua kalangan dari anak-anak, remaja, dan dewasa baik itu laki-laki ataupun perempuan.

e. Menjaga Harta

Untuk DPMG Aceh dalam kegiatan programnya juga memikirkan dari segi hartanya. DPMG membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan. Kegiatan ini juga didorong oleh adanya dana desa dan juga tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berwirausaha.

Pada tahun 2018 program yang menjaga dari aspek harta yaitu pengembangan ekonomi kreatif daerah pesisir, program ini dilakukan untuk membantu masyarakat wilayah pesisir dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada, kemudian dijadikan sebuah produk, dan tidak hanya itu, tetapi juga akan dilatih bagaimana Teknik pengemasan, Teknik pemasaran, manajemen usaha, dan juga bagaimana mengsinergikan pelaku usaha. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi peningkatan kemiskinan.

Dan pada tahun 2019 DPMG Aceh juga mempertimbangkan untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam yang dimiliki dengan merumuskan

program pengelolaan kerambah ikan air tawar kawasan gampong, program ini dilakukan untuk masyarakat bisa memanfaatkan karamba, agar dapat mendorong pengembangan produk kawasan *gampong* dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat *gampong*.

Dan pada tahun 2019 DPMG mempertimbangkan dana desa yang dimiliki setiap *gampong*, agar dana desa tersebut dapat digunakan dengan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. oleh karena itu DPMG merumuskan program rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat Se-Aceh, program ini tujuannya untuk penanganan dana desa.

Di tahun tersebut juga pemerintah merumuskan program kegiatan peningkatan kebutuhan pelayanan dasar ekonomi masyarakat, kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu rumah, ini dilakukan karena untuk mengurangi beban masyarakat miskin, mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat.

Adanya bentuk program kegiatan seperti itu akan membantu masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan. Hal ini akan sesuai dengan pendapat Imam al-syathibi dalam *Maqashid Syariah* bahwasanya harta adalah faktor penunjang yang dibutuhkan oleh manusia dari zaman dahulu sampai sekarang. Harta bukan hanya bisa dirasakan di dunia saja tetapi akan menjadi pendorong di akhirat nanti, karena dengan harta tersebut akan membantu dalam kelangsungan hidup seperti beribadah, karena sebagian dari harta yang kita miliki akan kita gunakan untuk ibadah dalam mencari ilmu, membayar zakat, shadaqah, infaq, dan menunaikan haji, dan lain sebagainya yang akan menjadi pendorong untuk akhirat.

f. Menghilangkan kesulitan dan kesusahan

Gubernur mengharapkan DPMG menjadi fasilitator dalam pengentasan kemiskinan dengan melalui program-program kegiatan yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa dan anggaran dari DPMG. Oleh karena itu DPMG juga memiliki program untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Pada tahun 2018 DPMG merumuskan program penyelenggaraan gelar Teknologi Tepat Guna XII Se-Aceh dan lomba inovasi TTG tahun 2018, program ini dilakukan DPMG untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi, menstimulasi, mendorong atau memotivasi dalam meningkatkan pengetahuan. Dan masih banyak program-program lain yang dirumuskan DPMG untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

g. Menjaga dan memelihara

Untuk menjaga dan memelihara adat DPMG memiliki program tersendiri yang dirumuskan pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2019 tidak merumuskan program untuk aspek tersebut. Programnya yaitu bimbingan teknis pengelolaan Lembaga adat dan seni budaya Kute tahun 2019. Tujuan dari pelaksanaan ini untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat tentang pentingnya pelestarian adat istiadat dan budaya sebagai salah perwujudan pengabdian kepada masyarakat di Kute, meningkatkan kemampuan peserta dalam Menyusun rencana penguatan kapasitas Lembaga adat Kute, memperkuat peran dan fungsi pengelola Lembaga adat seni budaya Kute guna mendukung program pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis adat dan budaya di kabupaten Aceh Tenggara.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan program terdapat Implikasi Maqashid Syariah untuk penanggulangan kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh. Bisa dilihat dari program-programnya dalam menerapkan *Maqashid Syariah*, berikut ini penjelasannya:

1. Menjaga agama dilihat sari salah satu misinya yaitu memperkuat pelaksanaan Syariah islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dan mengikutsertakan tokoh agama di kegiatan yang akan dilaksanakan di gampong.
2. Menjaga jiwa, bisa dilihat dari kegiatan PTMAS yang dilakukan untuk pencegahan stunting.
3. Menjaga akal, ini terbukti dari kerjasama yang dilakukan dengan dosen atau para ahli dalam melakukan pemberian pengetahuan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi aparatur-aparatur desa.
4. Menjaga keturunan, dilihat dari kegiatan seperti mendampingi ibu hamil sampai persalinan dan juga kegiatan meningkatkan gizi anak dari usia dini.
5. Menjaga harta, program yang memikirkan dari segi menjaga harta sangat banyak salah satunya membangun dan melindungi sentra-sentar produksi dan industri jasa kreatif yang akan menghasilkan produk.
6. Menghilangkan kesulitan dan kesusahan, sudah jelas bahwa tujuan dari beberapa program yang dilakukan untuk menurnkan angka kemiskinan atau pengangguran.
7. Ketujuh menjaga dan memelihara adat dan seni budaya, tujuan dari pelaksanaan ini untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat tentang pentingnya pelestarian adat istiadat dan budaya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk program pengentasan kemiskinan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh ada beberapa saran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Aceh yang bisa dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Ketika merumuskan sebuah program agar selalu menggunakan landasan yang telah ditetapkan agar ketika pengesahan dan pengecekan kembali tidak ada yang ditolak atau direvisi sehingga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien lagi.
2. Dalam perumusan program kegiatan kedepannya untuk merumuskan program khusus untuk menjaga agama.
3. Dalam perumusan program kegiatan kedepannya diharapkan dalam setiap tahun untuk mengaplikasikan *Maqashid Syariah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. (2003). *Social Work and Empowerment*. New York: Palgrave Empowement.
- Adi, R. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ala, A. B. (1981). *Kemiskinan dan strategi memerangi kemiskinan*. Yogyakarta: liberty.
- al-Sayis, A. (1970). *nash 'ah al-fiqh al-ijtihadi wa al-ruh*. kairo: majma' al-islamiyyah.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Bandung: alfabeta.
- Ardianto, A. (2010). *Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arif, W. (2019). *Perbedaan Ekonomi Masyarakat Desa Dalam Memenuhi Aspek Maqashid Syariah Melalui Pendekatan Asset Based Community Development (studi Pada Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang Jawa Timur)*. Malang: Program Studi Magister Ekonomi Syariah Ppascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azizy, A. Q. (2004). *Pengembangan ilmu-ilmu keislaman*. Semarang: aneka ilmu.
- Azwar, B. (2014). Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten kumpang (tudi tentang efektifitas bantuan dana bergulir sektor agribisnis. *jurnal kewirausahaan*, vol 13, no. 1, 102-117.
- Boediono, & Koster, W. (2002). *Teori dan Aplikasi Statiska dan Probilitas*. Bandung : Rosdakarya.
- Bogdan, C. R., & Biklen, T. K. (1998). *Qualitative Research for Education; An Introduction Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Brohman, J. (2001). *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*. New York: Blackwell Publishers.
- Chapra, M. U. (2000). *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani.

- Cox, D. (2005). *Outline of Presentation on Poverty Allevation Programs in the Asia-Pacific Region*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Efendi, T. N. (1993). *Sumber Daya Manusia, peluang kerja dan kemiskinan*. Yogyakarta: pt tiara wacana.
- Effendi, S. (1990). *dinamika hukum islam dalam tujuh puluh tahun ibrahim hosen*. bandung: remaja rosdakarya.
- Ekando, A., Firdaus, & Elfemi, N. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan kemiskinan di nagari lagan hilir, kab. pesisir selatan. *jurnal ilmu sosial mamangan volume III nomor 1*, 1-9.
- Fachrudin, R. (2015). Eevaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Balikpapan. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik vol, 4, no.2*, 327-338.
- fyzee, A. A. (1981). *the outlines of muhammad law*. delhi: idarah-i adabiyat-i.
- H.S, D., & Hermanto. (1993). *Kemiskinan di negara berkembang masalah krusial global*. Jakarta: LP3ES.
- Hall, A., & Midgley, J. (2004). *social policy for development*. london: sage publications ltd.
- Indra, S. (2018). Economic Empowerment Model for the Poor Throught Zakat Institution Under Maqashid Syariah Concept in Wesy Kalimantan. *Asian Journal of Social Science Studies*, 54-62.
- Inta, N. (2019). *Usaha Tenun (Panette) Sutra Mandar: Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Tammangalle Kabupaten Mandar)*. Makassar: Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Jaya, A. (1996). *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil. (2001). *ilmu negara umum dan indonesia*. jakarta: Pt: pradnya paramita.
- Katmas, E. (2018). *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam Perspektif Maqashid Syariah*. Malang: Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Khotimah, K. (2019). *Analisis program bantuan rumah layak huni terhadap pengentasan kemiskinan di kecamatan mesuji dalam perspektif ekonomi islam*.



lampung: fakultas ekonomi dan bisnis islam universitas islam negeri raden intan .

- Komariyah, O. (2013). analisis implementasi maqashid syariah pada lembaga pengelola zakat dalam membangun konsep pemberdayaan masyarakat. *jurnal ekonomi dan perbankan syariah Vol 4, no 1*, 118-134.
- Kuncoro, M. (2004). *otonomi daerah - reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. jakarta: penerbit erlangga.
- Lalaun, A., & Siahaya, A. (2015). Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 73-86.
- Mafruhah, A. Y., Haryatiningsih, R., & Haviz, M. (2016). Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia berdasarkan Perspektif Islam. *Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Vol 6, No. 1*, 134-141.
- Mahiorang, A. (2015). Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan Kemiskinan Nelayan (Suatu Studi di Kabupaten Sangihe). *Jurnal Politico Vol 4, No 2*.
- Mantja, W. (2005). *Etnografi Ddisain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*. Malang: Wineka Media.
- Mardikanto, T. (2010). *konsep-konsep pemberdayaan masyarakat: acuan bagi aparat birokrasi, akademisi, praktisi dan peminat/pemerhati pemberdayaan masyarakat*. surakarta: fakultas pertanian universitas sebelas maret.
- Miles, M., Huberman, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook (3rd ed)*. Beverly Hills: SAGE Publications Inc.
- Miradj, S., & Sumarno. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui proses pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di kabupaten halmahera barat. *jurnal pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, volume I*, 101-112.
- Muhaimin. (2012). Analisis Hukum terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Model Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.1* , 15-26.

- Murdiansyah, I. (2014). evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada program gerdu-taskin di kabupaten malang). *jurnal WIGA vol.4 no.1* , 71-92.
- Musa. (2017). optimalisasi peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat: sebuah tawaran dalam mengentaskan kemiskinan. *jurnal dakwah dan pengembangan sosial kemanusiaan vol.8, no.1* , 107-125.
- Mutakin, A. (2017). Teori maqashid al syari'ah dan hubungannya dengan metode istinbath hukum. *kanun jurnal ilmu hukum vol. 19, no. 3*, 547-570.
- Nasional, S. S. (2020, Februari 2). *Badan Pusat Statistika Provinsi D.I Yogyakarta* . Retrieved from BPS Yogyakarta: <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/28/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-persen-2011-2019.html>
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 87-99.
- Noor, M. (n.d.). Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Semarang). *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 130-139.
- Nugroho, Iwan, & Dahuri, R. (2004). *pembangunan wilayah perspektif ekonomi sosial dan lingkungan*. jakarta: pustaka LP3ES.
- Nurmasyitah, & Mislinawati. (2017). Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. *jurnal pesona dasar vol. 1 no. 5*, 30-36.
- Pertiwi, S. Y. (2014). Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan . *Pandecta Volume 9. Nomor 2*, 212-225.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk bisnis* . Yogyakarta: Graha Ilmu .
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *kamus besar bahasa indonesia, cetakan VII, edisi IV*. jakarta: pt gramedia pustaka utama.
- Putri, N. S. (2019). *Analisis Peran Program Keluarga Harapan (Pkh) terhadap Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Mmojoranu)*. Tulungagung: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri.

- Ravallion, M. (1994). *Poverty Comparisons, Fundamentals of pure and Applied Economics*. Switzerland: Harwood Academic Publishers.
- Rofiq, A. (1997). *etika ekonomi politik: elemen-elemen startegis pembangunan masyarakat islam*. surabaya: Risliah Gusti.
- Russel, B. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Saragih, J. P. (2015). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta . *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. VII. No.02*.
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid al-syari'ah dalam hukum islam . *sultan agung vol XLIV NO. 118*, 117-130.
- Subagyo, J. (1991). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosia & Pekerjaan Sosia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (1998). *membangun perekonomian rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* . Jakarta: Gramedia.
- Suparjan, H. (2003). *Pengembangan Masyarakat (dari Pembangunan sampai Pemberdayaan)*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Supriadi. (2017). *Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan di Kota Palopo*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Surjono, A., & Nugroho, T. (2008). *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah* . Malang: Bayumedia Publishing.
- Suryabrata, S. (1998). *Metode Penelitian* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Suryani, E., Permadi, L. A., & Serif, S. (2019). Identifikasi Karakteristik dan Profil Kemiskinan di Pulau Lombok: Basis Perumusan Intervensi Kebijakan. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH)*, 27-41.
- Suyanto, B. (1995). *Perangkap Kemiskinan: Problem & Strategi pengentasannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suyanto, B. (n.d.). *Perangkap Kemiskinan*.
- Syaukani, Gaffar, A., & Rasyid, R. (2009). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tamim, I. H. (2011). Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Didalam Komunitas Lokal. *Jurnal Sosiologi Islam Vol.1 No.1*, 35-58.
- Tanzeh, A., & Suyitno. (2006). *Dasar-dasar Penelitian*. Surabaya: eLKAF.
- Tlonaen, Y. B., hardianto, W. T., & Diahloka, C. (2014). Implementasi Program keluarga (Pkh) Untuk Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 3, No. 01*, 29-37.
- Toriqoddin, M. (2014). Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi. *Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1*, 33-47.
- Umar, H. (2007). *Nalar Fiqih kontemporer*. Jakarta: Gaung persada press.
- Usman, H. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Vergoreta, D. A., Pratiwi, R. N., & suwondo. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi pada desa beji kecamatan jenu, kabupaten tuban). *Jurnal administrasi publik (jap), vol.2, no 12*, 1-5.
- Wehr, H. (1980). *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: McDonald & Evan.
- Zainil, G. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *jurnal Iqtishoduna*, 90-112.
- Zuriah, N. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

## LAMPIRAN

### A. Lampiran Pedoman Daftar Pertanyaan

#### 1. Umum

Nama :

Peran dalam Perumusan Program :

Masa Jabatan :

#### 2. Proses Perumusan Program

- a. Bagaimana tahapan dalam perumusan program?
- b. Apa saja program dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh DPMG Aceh ?
- c. Apa saja yang menjadi landasan dan prinsip dalam perumusan program kerja?
- d. Pertimbangan apa saja dalam merancang sebuah program?
- e. Dalam setiap kali usulan-usulan yang ditujukan kepada pemerintah pusat, apakah semua usulan usulan tersebut mendapat tindak lanjut atau ada usulan-usulan yang tidak terima? Contoh usulan yang tidak diterima/ditolak?
- f. Siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan program?
- g. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan perumusan program?
- h. Siapa saja yang turut andil dalam program yang dijalankann DPMG Aceh?
- i. Siapa yang menjadi prioritas dalam program tersbut ketika merealisasikan program? Bagaimana vcara menentukan prioritas?
- j. Bagaimana hubungan atau keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program?
- k. Bagaimana prosedur sehingga program terssebut dapat tersalurkan kepada masyarakat?
- l. Bagaimana konsep program peningkatan keberdayaan masyarakat desa?

- m. Bagaimana konsep pemberdayaan program pengembangan Lembaga ekonomi desa?
- n. Bagaimana konsep pemberdayaan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa?
- o. Bagaimana langkah-langkah untuk merealisasikan program tersebut?
- p. Apa tantangan yang dihadapi DPMG dalam progrja kerja yang dilakukan?
- q. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 2 program tersebut?

### 3. Maqashid Syariah

#### a. Menjaga Agama

- 1) Apakah program-program di DPMG mempertimbangkan dari sisi syariah atau agama? Jika iya, panduan apa yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat?
- 2) Apakah tokoh agama diikutsertakan dalam program-program tersebut? jika iya apa perannya?
- 3) Kegiatan keagamaan apa yang sering dilakukan dalam merealisasikan program?
- 4) Bagaimana merumuskan 2 program tersebut agar dapat menjaga agama?
- 5) Bagaimana dampak dari 2 program kegiatan masyarakat terhadap peningkatan keimanan? (dijelaskan per perprogram)

#### b. Menjaga jiwa

- 6) Apa saja kegiatan dari program-program tersebut yang dapat meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat?
- 7) Dalam memotivasi masyarakat langkah apa yang dilakukan oleh DPMG?

#### c. Menjaga Akal

- 8) Dalam 2 program tersebut apakah diikutsertakan pendidik dalam pemberdayaan?

- 9) Ragam kegiatan apa saja yang mengupayakan peningkatan intelektual/keilmuan warga?
  - 10) Untuk DPMG apakah ada bimbingan dari pimpinan kepada karyawan? jika iya, bagaimana bentuk bimbingannya?
  - 11) Dalam merealisasikan 2 program tersebut apakah membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi yang diberdayakan? Jika iya bagaimana bentuk pelatihannya?
- d. Menjaga Keturunan
- 12) Siapa saja yang menjadi target dalam 2 program tersebut?
  - 13) Apakah perempuan juga terlibat dalam 2 program tersebut? Kalau iya seperti apa keterlibatannya?
  - 14) Bagaimana sistem kerja di DPMG dalam pemberdayaan masyarakat melihat dengan berbagai umur yang ada di desa?
- e. Menjaga Harta
- 15) Bagaimana sistem kerja 2 program tersebut sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat?
  - 16) Apakah ada kerja sama dengan pihak lain dalam mengelola dan mengembangkan harta?
  - 17) Bagaimana dampak dari 2 program tersebut terhadap peningkatan perekonomian Gampong secara umum?
- f. Menghilangkan kesulitan dan Kesusahan
- 18) Bagaimana peran DPMG dalam menghilangkan kemiskinan yang ada di Aceh?
  - 19) Apakah dari 2 program tersebut dapat menjadikan masyarakat hidup mandiri dan terbebas dari kemiskinan?
- g. Menjaga dan Memelihara
- 20) Bagaimana caranya menjaga 2 program tersebut agar terus berkelanjutan?
  - 21) Sampai sekarang ini sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan 2 program tersebut? (Uraikan perprogram)

- 22) Apa standar dan ukuran keberhasilan program kerja yang ditetapkan oleh DPMG atas pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan?
- 23) Apa tindakan yang dilakukan atas hasil pengukuran dan penilaian keberhasilan program kerja?



#### Hasil wawancara

##### 1. Umum

Nama : Fitriana  
Jabatan : Staf Bidang Program  
Masa Jabatan : 2016-sekarang



## 2. Proses Perumusan Program

### a. Bagaimana tahapan dalam perumusan program?

jawab:

Untuk merumuskan program, kalau program memang udah ada di DPA disesuaikan dengan tupoksinya kita, misalnya kayak disini tupoksinya kan tadi pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong, jadi tupoksinya itu kita lihat apa yang bisa kita usulkan untuk kegiatan kemiskinan. Kegiatannya disesuaikan dengan mungkin yang harus lebih dilaksanakan, pokoknya setiap bidang nanti akan mengusulkan kegiatan ke kepala dinas dan sekretaris, dan kepala dinas, karena program kegiatan kan sifatnya kebijakan, jadi mungkin kadis dan sekretarisnya akan melihat mana kegiatan yang bisa dianggap prioritas dan mungkin bukan prioritas seperti tahun ini, semua bidang mengajukan semua kegiatan-kegiatan ada yang rutin selalu dilaksanakan dan ada kegiatan baru yang disesuaikan dengan kondisi, jadi nanti begitu mereka setiap bidang mengajukan, mengajukannya ke program, himpun rekap semua usulan-usulan dari bidang dan disampaikan kepada kadis, nanti kadis yang menentukan prioritas, disesuaikan dengan tupoksi dengan LPJM, dengan rensra kita, jadi yang dilihat dari 3 hal tersebut, jangan sampai nanti tupoksi kita apa, kegiatan kita apa, disesuaikan dengan LPJM gubernur Aceh, apa target gubernur, jadi kita lihat dari itu juga, sama rensra kita, apa yang ingin kita capai di rensra kita, jadi 3 itu yang menjadi patokan kita dalam membuat program kegiatan.

### b. Apa saja program dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh DPMG Aceh ?

Jawab :

Kalau disini untuk kemiskinan tu mungkin ada di seksi bang sayed sama bang helmi pokoknya seksi bang sayed terkait kemiskinan kan nama bidangnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong tu bidang yang terkait dengan kemiskinan ada bang sayed dan bang helmi, dan disitu program kegiatannya tuh di masa itu dia lebih kepada masyarakatnya. Jadi

kalau tahun ini kebetulan dikarenakan covid semua kegiatan dialihkan anggarannya, kalau anggaran pertemuan enggak ada, kalau tahun lalu contohnya itu seperti kayak rumah dhuafa untuk rakyat miskin habis itu juga ada seperti rapat rakor, habis itu rapat organisasi lintas sektor, dan juga bumdes, bumdes lebih kepada pelatihan-pelatihan bumdes. Nama program-programnya, program peningkatan pemberdayaan masyarakat gampong, pengembangan Lembaga ekonomi gampong. Kalau peningkatan pemberdayaan gampong itu ada dua sisi, dari kemiskinan bisa jadi dari kesempatan kerja. Kalau yang lainnya khusus ke pemerintahan gampongnya jadi lebih ke aparat gampongnya dan satu lagi lebih ke lembaga sosial masyarakatnya, Lembaga adat kayak gitu, ibu pkk, posyandu.

- c. Apa saja yang menjadi landasan dan prinsip dalam perumusan program kerja?

Jawab:

Tupoksi, RPJM Aceh, sama rensra, itu landasan jadi kalau mau buat kegiatan baru patokan kita dari itu, jadi kalau nggak ada dari rensra kita juga tidak bisa laksanakan, ada beberapa yang kayak gini misalkan keluar kemendagri baru tentang jadi semua program kegiatan harus menyesuaikan kemendagri baru, jadi mau nggak mau harus menyesuaikan rpjm, menyesuaikan rensra, baru menyesuaikan lagi kegiatannya dengan kemendagri terbaru.

- d. Pertimbangan apa saja dalam merancang sebuah program?

Jawab:

Output yang dicapai outcomenya sama inpactnya, jadi kita lihat masing-masing kesini apa yang mau dicapai, outputnya apa yang mau dicapai outcomenya apa yang mau dihasilkan, misalkan dibuat pelatihan, untuk apa dibuat pelatihan, kan kita harus melihat kesitunya, dimana lokasi yang mau dituju, targetnya berapa orang yang mau dilatih, kita lihat ini bagus, ini tidak

bagus, target ini belum seharusnya dicapai, atau mungkin tidak perlu di capai, dengan menyesuaikan kondisi anggarannya, tahun ini misalkan anggarannya 30M, berarti tahun depan kira-kira 30M juga, jangan tahun ini segini tahun depan kita berandai-andai.

- e. Dalam setiap kali usulan-usulan yang ditujukan kepada pemerintah pusat, apakah semua usulan usulan tersebut mendapat tindak lanjut atau ada usulan-usulan yang tidak terima? Contoh usulan yang tidak diterima/ditolak?

Jawab : kalau pemerintah pusat sudah ada skala prioritas, misalkan kalau pemerintah pusat sudah ada skala prioritas seperti LPJM misalnya tahun ini rencana melanjutkan yang punya tahun selanjutnya, misalnya Aceh, Aceh tahun ini belum selesai, diusulkan lagi ke Aceh lagi sampai selesai skala prioritas di Aceh. Terkadang ada yang diterima ada ya yang ditolak, sesuai dengan prioritas sorang itu juga. Kalau tahun ini nggak ada, kalau tahun lalu banyak juga yang ditolak, misalkan kayak kami ada ajukan pemenuhan Kawasan itu ada beberapa lokasi kayak Aceh Timur ada Aceh Nagan yang diterima Cuma Aceh Timur, kenapa, karena Aceh Timur sudah prioritas Aceh pusat jadi itu yang kayak nagan karena masih baru dan belum menjadi prioritas lpjm orang itu jadi tidak bisa.

- f. Siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan program?

Jawab:

Kadis pasti, sekretaris, program, kabid, sama kasih itu yang, kalau staf-staf mungkin lebih ke operaror, tapi yang menentukan kegiatan program emang itu kabid, kasih, kadis.

- g. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan perumusan program?

Jawab:

Pertama perencanaan nya harus baik, betul, tepat sasaran, kalau kita dari perencanaan sudah salah langkah pasti otomatis kedepannya juga tidak

akan, pasti kalau dari awal kita sudah merencanakan dengan seksama dengan bagus pada pelaksanaannya kita akan gampang, di strateginya perencanaannya harus matang. Jadi betul dilihat, cocok nggak, mungkin diperencanaanya sih. Setelah perencanaanya mungkin dipelaksanaanya, pelaksanaan mungkin SDMnya yang harus betul-betul sesuai dengan rencana yang dibuat, perencanaan begini, pelaksanaanya juga begini.

- h. Siapa yang menjadi prioritas dalam program tersebut ketika merealisasikan program? Bagaimana cara menentukan prioritas?

Jawab:

Itu tergantung kegiatannya, misalkan kegiatannya ini daerah tertinggal otomatis daerah kita daerah tertinggal, dia tergantung daerah, misalkan tentang kemiskinan kita pilih daerah yang banyak miskin, jadi itu tergantung kegiatan, kalau emang kegiatannya terkait daerah tertinggal, otomatis kita ambil daerah tertinggal. Tapi rata2 yang disasar miskin dan tertinggal, kecuali kegiatan rutinnnya, kegiatan rutin emang semua kabupaten kota pasti ikut, misalkan kayak lomba, misalkan kayak pelatihan aparatur itukan semua kabupaten kota ikut, karena banyak aparatur baru, macam-macam, itu mungkin semua kabupaten kota yang rutin semua kabupaten ikut semua tergantung kegiatannya.

- i. Bagaimana hubungan atau keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program?

Jawab:

Pemerintah ini semua sasaran kita untuk mengsejahterakan masyarakat itu udah pasti, itu mungkin semua dinas juga tujuan akhir, semuanya bakal kesitu mengsejahterakan masyarakat, masyarakat itu emang obyek yang akan kita bantu, karena kami ada dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, jadi sasaran kami juga ada gampongnya, jadi gampongnya dapat berdaya juga, kita kasih program buat masyarakat agar masyarakatnya berdaya jadi masyarakat itu kayak objek, yang mau kita tujukan pasti

masyarakat sejahtera, Cuma kalau kami dinas pemeberdayaan masyarakat gampong jadi sasaran kami rata-rata yang digampongnya, jadi, kita berdayakan gampongnya supaya masyarakatnya juga berdaya karena kalau gampong udah maju, bumdesnya maju, otomatisnya masyarakatnya juga maju, dia merangkul masyarakat gampong sekitar masyarakat gampong sekitar disitu.

- j. Bagaimana prosedur sehingga program terssebut dapat tersalurkan kepada masyarakat?

Jawab:

Sama kayak tadi saya bilang dari perencanaanya kita sudah matang, kita sudah tau kita siapa yang mau kita sasar dimana, lokasinya dimana, apa kebutuhannya, berapa uangnya, terus supaya tepat sasaran, karena kalau tidak kita tentukan dari awal, otomatis apa yang mau kita capai tidak tepat sasaran, apa yang mau kita harapin dari kegiatan kita, untuk apa kita buat kegiatan kita, tujuan itu dulu, udah tau tujuannya, kita rencanakan yang baik, tinggal pelaksanaan aja yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, dimana pelaksanaanya begini, rencananya begini. Kepala dinas mengawasi habis itu penyusunan itu, kepala dinas yang akan menentukan mana prioritas, mana tidak, habis itu kadis juga mengawasi jalannya kegiatan, misalnya kayak gini kita sudah membuat perencanaan ini, ini, ini, ada sepuluh point pak kadis yang mengawasi, setiap bulan kan bisa jadi di evaluasi kok belum dilaksanakan apa hambatannya, misalkan begitu, ini mungkin pak kadis yang mengarahkan dan mengawasi, nanti kita bingung pak kami mau buat begini, tapi ada kendala gini-gini, hambatannya gini-gini, ini mungkin pak kadis lebih mengarahkan, mengawasi, misalkan nanti kita bingung pak kami ini buat gini tapi ada kendala gini gini, nanti pak kadis yang membantu.

- k. Bagaimana konsep program peningkatan keberdayaan masyarakat desa?

Jawab:

Kalau program peningkatan keberdayaan masyarakat gampong itu kita lihat dari kegiatannya aja ya, kegiatannya ada tentang teknologi tepat guna habis itu pengembangan Kawasan, jadi misalnya pengembangan Kawasan dari pengembangan Kawasan itu diharapkan akan membentuk Kawasan-kawasan baru, misalkanya Kawasan pertanian, bisa jadi Kawasan perikanan, jadi ada beberapa Kawasan, nanti ada beberapa gampong kita bentuk Kawasan-kawaaan kenapa kita bentuk Kawasan-kawasan, ada hal-hal yang gampong kerjakan itu tidak selesai, nantik kalau dikerjakan bersama itu mungkin membantu, jadi dengan kawasan itu diharapkan sesuai dengan potensi SDA dia potensinya kayak perikanan misalkan kayak gampong ada beberapa yang sama perikanan, jadi yang sama-sama perikanan kita jadikan satu Kawasan nanti disitulah kita bina dia kita kembangkan dia lagi, nanti dengan bentuk bumdes bersama misalnya kalau berdua gampong dikasih dana sikit, dikasih modal sikit, kan kalau bertiga udah banyak itu modalnyam jadi itu pengembangan Kawasan, jadi kalau untuk teknologi tepat guna, dari TTG ini kita ada perlombaan ini setiap tahun, tetapi untuk tahun ini tidak ada karena ada covid, jadi dari TTG akan muncul inovator inovotor baru kayak temuan-temuan baru alat-alat ini alat yang bisa dipakai masyarakat, kayak misalkan kalau detailnya lupa, kayak pentiris minyak goreng, yang kayak pemecah pinang, jadi alat-alat itu akan membantu masyarakat agar kerjanya lebih cepat kerjanya seperti mengerjakan sederhana ini ada alat TTG itu mungkin bisa membantu lebih cepat, agar produksinya lebih banyak, alat-alat itu yang akan membantu.

1. Bagaimana konsep pemberdayaan program pengembangan Lembaga ekonomi desa?

Jawab :

Kalau pengembangan ekonomi gampong itu dia misalkan kayak pembinaan ke rakyat miskin dan desa tertinggal, dia lebih kepada rakor, rapat organisasi dengan lintas sektor, kayak tahun ini kita rencananya kayak mau buat pembinaan rakyat miskin nanti yang kita sasar rakyat miskin mana

yang akan kita bantu, nanti kita bantu kembangkan dia mulai dari kita kasih pelatihan, bantuan, kita kasih alat, pokoknya sesuai dengan kebutuhan dia, tetapi sasaran kita tetap masyarakat miskin, habis itu, udah ada bumdes, nanti di bumdes itu, kita lebih kepada melatih pengurus bumdes, bagaimana manajemen bumdesnya, supaya bumdesnya berjalan dengan baik, habis itu kita arahkan, misalkan di ada produk-produk yang bagus ini, kita kembangkan, tahun depan, kami rencanakan untuk bumdes online, jadi mungkin begitulah gambaran kegiatan Lembaga ekonomi desa.

m. Apa tantangan yang dihadapi DPMG dalam programkerja yang dilakukan?

Jawab:

Tantanganya banyak, mungkin salah satunya mungkin masyarakat miskin ya kurang, kalau tantangan gini tadi kan masyarakatnya kan ada gagal, tantangannya fokus ke masyarakat miskin, terkadang updating data masyarakat miskin itu pada saat tahun depan berjalan nggak tepat sasaran walaupun sudah terverifikasi, tantangannya itu aja kurang tepat sasaran dan kemauan masyarakat yang tidak mau dibantu untuk kegiatan tersebut, tantangan yang besarnya itu sih, paling tantangannya kayak ini sekarang, bencana besar non alam kayak pandemi covid, ini tantangan juga seperti kaya tahun 2020 ini kita sudah ada kegiatan yang harus kita jalankan tapi tantangannya ya itu pandemik covid ini, tantangan juga salah satu bencana non alam itu salah satunya juga, selain nggak tepat sasaran, bukan nggak tepat sasaran, padahal kita sudah verifikasi, kayak orang yang kasih bantuan mengundurkan diri mungkin, tantangan paling utama yaitu non alam, faktor alam juga, bencana juga Aceh kan salah satu tempat rawan bencana, mungkin anggaran juga, anggaran itu kan sudah di plot-plot kan, misalnya kayak harus berapa persen, jadi kalau dinas-dinas lain ya otomatis seberapa dia tidak di prioritaskan oleh gubernur, mungkin tantangan juga, kita mau buat kayak gini, tapi anggarannya nggak segini, karena kalau mau buat kegiatan harus meyakinkan orang lain, mendapat ini.

#### 4. Maqashid Syariah

##### a. Menjaga Agama

- 1) Apakah program-program di DPMG mempertimbangkan dari sisi syariah atau agama? Jika iya, panduan apa yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat?

jawab:

salah satunya kita kembangkan rumah madu itu, syariah itu apa kami kenapa buat lebah madu karena dalam al-qur'an ayat nahnu ayat 68 dan 69 itu emang Allah mengerjakan untuk, ayat 68 dan 69 coba adek lihat artinya dan tuangkan disitu, mungkin kalau tahun depan kita banyak dari sisi syariah, kita juga banyak juga Syariah bekerja sama dengan Baitul maal, Nu zakat. Yang terjadi diberikan dengan konsumtif saja Cuma dikasih bantuan saja kami lagi menggodok-godok, tapi kita tidak hanya kasih uang tetapi dengan uang tersebut dia bisa memodali dirinya sendiri buat kue segala macam. Kita tidak secara langsung syariah tapi karena kita membantu orang lain itu juga sudah Syariah seperti menolong orang lain, tetapi tidak langsung syariah tetapi disitu ada syariahnya, menolong antar sesama juga ada Syariah. kelebihan di Aceh yang enggak ada di provinsi lain enggak ada Baitul maal, badan dayah enggak ada, syariat islam enggak ada, itu mungkin dinas teknik yang telah dilaksanakan di Syariah yang sesuai dengan qanun Aceh untuk pelaksana Syariah islam, apalagi ya? lima kalau nggk salah, baitul maal, wali nangro, badan dayah, majelis Pendidikan, dayah, badan dayah. Kita juga bekerjasama dengan Unsyiah misalkannya kayak contoh ini, kayak daun kelor apa sih manfaat daun kelor ini bukan hanya tanam saja ada di bireun tapi dengan daur kelor itu ada kerjasama dengan Unsyiah, Unsyiah membuat alat misalnya alat menggunakan, nilai jual alat murah karena yang menemukan orang-orang berpendidikan, simpel, mambantu masyarakat, jadi mungkin nominalnya enggak bisa dibelakang sini karena diluar sana dijual



mahal, tapi disini, nantik UIN lagi, uin ada program zakat produktif konsumtif, kalau unsyiah gini dia bantu masyarakatnya bisa nanam daun kelor, pellet segala macam itu, kan ada manfaatnya, kegunaannya, situ diukur dia, kita liat disitu.

24) Apakah tokoh agama diikutsertakan dalam program-program tersebut? jika iya apa perannya?

Jawab: kalau tokoh agama paling adat paling adat karen kita lebih ke Lembaga adat.

b. Menjaga jiwa

1) Apa saja kegiatan dari program-program tersebut yang dapat meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat?

Jawab:

PTMAS jadi kami kan, dulu kan tentang ptas untuk anak sekolahan sasaran kami itu anak-anak paud kita kasih bantuan makanan selama beberapa bulan, karena pemberian makanan PTASN itu untuk peencegahan stanting, ibu Pkknnya yang masak, bagian dari program partisipasi masyarakat

2) Dalam memotivasi masyarakat langkah apa yang dilakukan oleh DPMG?

Jawab:

Lewat gampong, Mungkin kita masuk lewat gampongnya, lewat gampongnya lebih gampang, pak geuchik karena pak geuchik orang-orang yang terpilih oleh masyarakat, lewat kabupaten kota, lewat camat, lewat gampong, nanti lewat gampong yang mengkoordinasi gampongnya, mengikuti serta dengan program-programnya.

c. Menjaga Akal

- 1) Dalam 2 program tersebut apakah diikutsertakan pendidik dalam pemberdayaan?

jawab:

Dari dosen ada juga untuk program tapi ahlinya bisa didapatkan dari lingkungan hidup dia sudah mengerti lebah madu dia sudah belajar, dari dosen bisa juga, dilibatkan dari dosen bisa juga itu bukan pendidikan tapi narasumber meningkatkan kapasitas masyarakat mengembangkan lebah madu atau tiram itu salah satu programnya.

- 2) Ragam kegiatan apa saja yang mengupayakan peningkatan intelektual/keilmuan warga?

Jawab:

Mungkin kalau kami intelektual lebih ke aparatur gampongnya mungkin karena lebih ke gampongnya jadi lebih ke aparaturnya yang kami latih, bisa mengolah data desa, atau mungkin lebih ke masyarakatnya kaya ke ibu pknya. Kalau masyarakatnya butuh pelatihan ini kita latih dengan kondisi kegiatan kita. Kalau ada kegiatan yang berhubungan dengan masyarakatnya, masyarakatnya yang kita latih. Kalau karyawan ikut melatih juga kayak TOT, streaching contohnya kayak dia membuka, jangan setelah dikasih modal dia lari tapi dikasih pemahaman bagaimana mengelola dana itu sukses, diberikan motivasilah baru ahlinya, atau entar dosen sering dilibatkan dosen. Pokoknya sesuai kebutuhan aja. enggak semua kegiatan itu oh ini harus. Kita lihat masyarakatnya kalau masyarakatnya bagus kita latih tapi kalau cuma butuh modal ya kita kasih modal aja. Pokoknya sesuai kebutuhan aja. Karyawan ada ikut melatih tetapi tidak semua ada beberapa, karyawan yang emang sudah bisa jadi pelatih, sudah jadi trainer.

#### d. Menjaga Keturunan

- 1) Siapa saja yang menjadi target dalam 2 program tersebut?

Jawab:

Program peningkatan pemberdayaan targetnya masyarakat, satu lagi TTG teknologi tepat guna, sama Kawasan gampong itu targetnya, masyarakat mungkin begini kita ada pengembangan kawasan misalnya jadi masyarakat yang ada di gampong-gampong itu yang kita berdayaakan. Kalau program pengembangan ekonomi gampong sasarannya dua masyarakat miskin dan masyarakat gampong tertinggal, eh pemerintah gampong tertinggal sama BUMG. Yang ketiga itu lebih ke partisipasi masyarakat jadi dia lebih kepada lembaga masyarakat, lembaga adat, jadi lebih kesitu, ibu PKK, posyandu, KPM, dan lain-lainnya.

- 2) Apakah perempuan juga terlibat dalam 2 program tersebut? Kalau iya seperti apa keterlibatannya?

Jawab:

Ibu PKK mungkin, ada kegiatan pkk juga disini, mungkin itu, kayak ada pelatihan pkk, kalau pkk macam-macam dia macam-macam ada. Kalau dulu ada namanya simpan pinjam untuk perempuan tahun 2010 sampe tahun 2015. ibu-ibu dpinjam duit dari desa namanya spp simpan pinjam perempuan, duit tersebut untuk produktif buat kue dan macam, pokoknya produktif lah. Sekarang juga masih ada dan dia di desa, jadi kami lebih ke promosi tidak ikut. Itu programnya setelah melakukan msyawarah dengan desa tersebut. Kalau sekarang misalnya kita melatih aparat kmapung ini, ini misalkan ada perempuan kita panggil juga, mungkin lebih yang kita undnag ada perempuan kita latih.

- 3) Bagaimana sistem kerja di DPMG dalam pemberdayaan masyarakat melihat dengan berbagai umur yang ada di desa?

Jawab:

Kita tidak melihat dari umur tetapi layak bekerja saja

e. Menjaga Harta

- 1) Bagaimana sistem kerja 2 program tersebut sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat?

Jawab:

Kita tidak hanya memberikan modal tetapi kita bimbing, kita latih, kita kawal sampe dia menghasilkan. Kita tidak semata kita kasih modal kita kawal, bagaimana membuat caranya, kita lakukan dengan teknik, dan dibawa ahlinya, kalau kami hanya menjadi sebagai motivator saja. Keberhasilannya tinggi karena halnya datang praktek langsung dilapangan, kemudian kita dampingin dia terus, dikawal terus sampe dia menghasilkan sampe dengan produk dikemas, kalau dikemas menjadi mahal kalau dikasih gitu aja murah, jadi harus kita kawal dengan tetap ruang lingkup desa, harus berkelanjutan tidak boleh setengah-tengah dari awal sampe akhir. Dari dia belum bisa apa-apa sampe sudah jadi, sudah dipasarkan, sudah dijual sampe sudah balik modal dia, dan dikembangkan sendiri.

f. Menjaga dan Memelihara

- 1) Bagaimana caranya menjaga 2 program tersebut agar terus berkelanjutan?

Jawab:

Iya program tersebut harus bagus, jadi kalau emang bagus dia tidak akan berhenti kalau emang dibutuhkan masyarakat, jadi kita munculkan program, program tersebut emang harus betul-betul bermutu, jadi harus sesuai dengan potensi desanya, strateginya di perencanaan awal, kualitas perencanaanya harus bagus. Sesuai dengan potensi desa tersebut. Kalau emang kegiatannya bagus tidak mungkin kegiatan tersebut dicoret, tapi kalau emang lihat dampaknya enggak ada, outcomenya enggak ada, kiat harus

menjaga kualitas program kita, sesuai potensi, sesuai kebutuhan yang kita butuhkan buat yang lain.

- 2) Apa standar dan ukuran keberhasilan program kerja yang ditetapkan oleh DPMG atas pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan?

Jawab:

Mungkin misalnya partisipasi masyarakat itu mungkin lebih kepada kepalatihan kemasyarakatan supaya partisipasi masyarakat itu aktif, mungkin kita lihat dulu outputnya apa, pelatihannya apa output, misalkan udah terlatih, habis terlatih masyarakat itu apa lagi, habis itu apalagi, misalkan outcome yang diharapkan itu adalah partisipasi masyarakat, ada enggak partisipasi masyarakat setelah dilatih, kayak outline dia lebih ke perencanaan, tepat waktu enggak perencanaannya, jangan sudah dilatih perencanaannya enggak tepat waktu kan outcome yang mau kita capai kan enggak tercapai, mungkin lebih ke ekonomi, habis kita bantu kita lihat, kita kembangkan, ada naik enggak pendapatan mereka, pendapatan mereka enggak naik, berarti enggak berhasil, atau mungkin belum berhasil, disitu kita lihat dari kendala apa mungkin, kenapa bisa enggak naik pendapat kita, mungkin ukurannya dari situ, tergantung kegiatannya kita lihat dari situ.

- 3) Apa tindakan yang dilakukan atas hasil pengukuran dan penilaian keberhasilan program kerja?

Jawab:

Kalau emang berhasil berarti tahun depan bisa dibuat lagi, kita kembangkan lagi, kalau tidak berhasil kita lihat dimana kendalanya, apa ada masalah mungkin diperencanaannya atau mungkin dipelaksananya yang enggak sesuai, pasti ada hambatan-hambatannya kan dari situ kita lihat.

## Narasumber Kedua

### 1. Umum

Nama : Irwansyah  
Jabatan : Staf Program DPMG  
Masa Jabatan : Sekitar 2 tahun

### 2. Proses Perumusan Program

#### a. Bagaimana tahapan dalam perumusan program?

Jawab:

Dia gimana ya BUMG itu merupakan salah satu syarat gampong bisa menerima dana desa, jadi setiap gampong diwajibkan memiliki BUMG walaupun apa ya namanya tidak semuanya aktif jadi untuk pengelolaan BUMG nya di dinas kita ini, dia berbentuk pembinaan kemudian ada tahun-tahun lalu ada bantuan modal untuk usaha, kemudian pelatihan-pelatihan dari pengurus BUMG-nya sendiri supaya bagaimana bisa majulah tergantung termasuk juga pelatihan-pelatihan tentang usaha misalnya di gampong ini yang produk pertanian misalnya bisa dibuat apa aja itu ada dilatih. Dibuat oleh DPMG berdasarkan masukan-masukan kabupaten kota. Pertama usulan dari kasubid kemudian ketika dijelaskan dengan segala macam yang arguementgasi bagus, menarik, dimasukkan kedalam rencana kerja RKA (rencana kerja anggaran), jadi nanti di bapeda dibahas lagi, sudah dibawa ke BAPEDA, sudah oke masuk ke pembahasan DPR, masalah DPA kalau oke baru bisa kita jalankan,

#### b. Apa saja program dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh DPMG Aceh ?

Jawab:

Yang terkait penanggulangan kemiskinan disini ada bidang DPMG yang berkaitan dengan ekonomi yaitu berbasis gampong jadi langsung turun

Ke gampong jadi programnya BUMG yang sedang lagi digalak-galakan BUMG, BUMG itu badan usaha milik gampong terus pengelolaan dana desa dari desa, emang kita hanya sebatas pembinaan, pembinaan dan kaki tangan pemerintah pusat, pengelolaannya langsung dikelola oleh bupati dan macam tentang peraturan-peraturannya juga mereka juga membuat sendiri di kabupaten, nama programnya BUMG pengembangan BUMG lah itu.

- c. Apa saja yang menjadi landasan dan prinsip dalam perumusan program kerja?

Jawab:

Itu balik lagi ke mana ya tujuan dan tupoksi DMPG sendiri, disitu tupoksinya adalah pengembangan aparatur gampong kemudian ekonomi gampong berbasisnya langsung ke gampong kalau program-program yang diusulkan mencakup segala pengembangan tupoksi ini otomatis akan kita naikkan programnya.

- d. Pertimbangan apa saja dalam merancang sebuah program?

Jawab:

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, kalau ada, walaupun sedikit kalau emang bisa untuk dipertanggung jawabkan bisa.

- e. Dalam setiap kali usulan-usulan yang ditujukan kepada pemerintah pusat, apakah semua usulan usulan tersebut mendapat tindak lanjut atau ada usulan-usulan yang tidak terima? Contoh usulan yang tidak diterima/ditolak?

Jawab:

Ada yang ditolak, bukan ditolak maksudnya dari kita kan dari awalnya kan, misalnya ini tahun 2021 tim diawal 2020 kasubid yang menjadi pengeraknya kasubid, kasubid ini dituntut untuk menciptakan program-program baru yang lebih baik lah kalau enggak ada ya pakai program

lama kalau emang masih bagus, kalau ada program baru dari kasubid inikan nanti dikoordinasikan lagi dengan kabid, oh udah oke, ujung-ujungnya kita naikkan ke BAPEDA dan masukan ke RKA jika kepala dinas, menurut kepala dinas ini oh emang suatu terobosan bagaimana-bagaimana, itu akan kita perjuangkan supaya jadi itu program, itulah dia. Biasanya yang ditolak emang ya untuk sangat sedikit pengaruhnya untuk perkembangan gampong itu.

f. Siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan program?

Jawab:

Biasanya pertahap dia, pertama kasubid menciptakan program, kemudian di bagian kabid, dilibatkan kasubag program kemudian baru puncaknya ke kepala dinas, oke apa enggak.

g. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan perumusan program?

Jawab:

Kembali kepada argumntasi kita, misalkan kita mau buat program, programnya ujung-ujungnya akan kita capai hasilnya seperti ini, argumentasi kita harus kita kuatkan, ini, ini, sampe ke BAPEDA nanti kita bela argumentasi kita, kalau arguemntasi ita kuat, pasti belum pasti tembus.

h. Siapa yang menjadi prioritas dalam program tersebut ketika merealisasikan program? Bagaimana vcara menentukan prioritas?

Jawab:

Kita basisnyakan gampong segala data dan keadaan gampong akan selalu kita koordinasikan dengan, misalnya ini udah jadi programnya maksudnya yang ditanyakan penerima manfaat itu, otomatis kita oordinasikan ke kabupaten, kabupaten koordinasikan ke kecamatan, dan segala macam sampai ke gampong, muncullah data penerima manfaat dengan segala kriteria yang kita tetapkan. Kriterianya



tergantung programnya apa , misalnya kaya BUMG, bung mana yang layak kit bantu, kalau bung tadui hamper seluruh bung dilatih tetapi pertahap pengurusnya, misalnya kayak disini juga ada rumah dhuafa disini kita klasifikasi, ada kriterianya siapa aja berhak secara rinci, ada bilangannya sendiri, koordinasinya langsung ke gampong melalui kabupaten. Kriteria yang menentukan kita, entar kabupaten yang tinggal mengusulkan, oh dia layak, dia layak. baru kirim ke kita, baru entar kita buat SK gubernur.

- i. Bagaimana hubungan atau keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program?

Jawab:

Kita berbasis gampong dia otomatis segala data segala apapun informasinya dari gampong, jadi keterlibatan masyarakatnya bisa dikoordinir langsung dari gampong, misalnya kayak pembangunan kanto geuchik, disini juga ada pembangunan kantor geuchik itu dilakukan sub kelola, sub kelola maksudnya masyarakat gampong, atau tukang-tukang yang ada di masyarakat gampongnya yang boleh membangun kantor geuchik itu, itulah salah satu yang dimaksud dengan keterlibatan masyarakat.

- j. Bagaimana konsep program peningkatan keberdayaan masyarakat desa?

Jawab:

Programnya itu kegiatannya ada TTG, pengembangan TTG, peningkatan pengembangan kawasan, kawasan itu gimana ya, pemetaan atau penetapan bahwa kawasan itu adalah suatu Kawasan pertanian, Kawasan pesisir, perikanan, nanti ada Kawasan perkebunan itu lain lagi, Kawasan itu ada mencakup beberapa desa, nanti di plot kan satu Kawasan, nanti kalau udah masuk satu Kawasan pertanian, ketika kita beraksi nya fokus ke kabupaten, Kawasan lain gitu juga, kalau pesisir

fokus ke nelayan tadi, jadi apa titik fokus apa yang mau kita suntik, atau apa yang kita bantu sesuai dengan bidangnya, kalau TTG berkaitan dengan alat-alat penemuan-penemuan alat yang bisa membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat, yang tahun kemarin juaranya alat penumpas pinang yang sudah kering itu, jadi setelah juara nanti akan dipatenkan, dan diproduksi massal, nanti diberikan dan dijual ke masyarakat, memudahkan masyarakat, kalau tahun ini di pemerintah yang mengadakannya ada 40 unit yang akan diberikan kepada masyarakat tidak dijual.

- k. Bagaimana konsep pemberdayaan program pengembangan Lembaga ekonomi desa?

Jawab:

Konsepnya itu lebih banyak ke BUMG maksudnya ke ekonomi gampong, lebih ke pelatihan, diharapkan BUMG itu menjadi penampung atau distribusi atau distributor produk-produk dari gampong, contohnya dari hasil pertanian gampong yang biasanya yang belinya itu tengkulak dengan harga murah kemudian dia entar jual lagi kemana, ada beberapa tahap harganya otomatis naik naik terus, ke masyarakat tinggi, jadi diharapkan BUMG ini ke petani langsung ke BUMG, BUMG langsung ke pembeli, jadi memutus mata rantai tengkulak-tengkulak tadi, harga jualnya bisa langsung ke BUMG langsung tinggi, disini bisa langsung mengsejahterkan petani.

- l. Apa tantangan yang dihadapi DPMG dalam progrja kerja yang dilakukan?

Jawab:

Biasanya mindset masyarakat kayak penanggulangan kemiskinan, kita minta data kemiskinan, banyak masyarakat yang emang dia berharap dia miskin supaya dapat bantuan, kemudian ketika ada bantuan-bantuan masyarakat mereka menganggap ya ini uang kita uang masyarakat,

kayak tahun sebelumnya da program kita UUPG segala macam itu emang program untuk modal usaha, jadi dia bergilir tetapi nyatanya nggak berjalan, karena menganggap itu uang sendiri, uang kita ini, jadi enggak ada istilah membalikkan, seharusnya kan pinjam balik, kasih ke orang lagi, biar semuanya dapat, nyatanya enggak berjalan, begitulah mindset masyarakat.

### 3. Maqashid Syariah

#### a. Menjaga Agama

1) Apakah program-program di DPMG mempertimbangkan dari sisi syariah atau agama? Jika iya, panduan apa yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat?

Jawab:

Kalau pada secara umumnya tidak terlalu menjurus kesitu tetapi peraturan-peraturan di gampong nanti juga ada qanun-qanun gampong, peraturan-peraturan gampong, ya disitu nanti akan, kalau emang sekiranya program ini terbentur dengan agama, maka program ini tidak akan bisa dilaksanakan, jadi kalau khusus program yang dari dinas kita yang menjurus kesitu,, sepertinya nggak akan sampai segitunya paling hanya 10% yang sekiranya tidak memungkinkan untuk kita lakukan, ya tidak kita lakukan, karena benteng di gampong juga cukup kuat karena ada qanun gamponnya, karena setiap gampong beda.

2) Apakah tokoh agama diikutsertakan dalam program-program tersebut? jika iya apa perannya?

Jawab:

Kita programnya basis di gampong jadi semua yang ada di gampong mencakup semuanya, misalnya kayak dana desa, untuk membuat rencana anggaran di desa, semua masyarakat gampong ikut terlibat dan mereka musyawarah, kalau yang berkaitan dengan pelatihan-

pelatihan dari kabupaten ke gampong yang kita panggil, yang secara langsung tidak ada sebenarnya.

- 3) Kegiatan keagamaan apa yang sering dilakukan dalam merealisasikan program?

Jawab:

Kalau dari kita tidak mengharuskan, tidak mengintervensi sampai segitu, itu terserah mereka, kalau misalnya BUMG ingin membuat kegiatan agama kita lepas tangan tidak ada urusan sama kita lagi.

- 4) Bagaimana merumuskan 2 program tersebut agar dapat menjaga agama?

Jawab:

Kalau yang sudah dijalankan selama ini kita membuat program tidak langsung berkaitan dengan agama tadi, Cuma program kita nanti akan berbenturan dengan agama otomatis akan tertolak jadi buat programnya secara umum emang manusiawi tidak langsung menjurus ke agamanya, karena agamanya kan ada link sektor sendiri, jadi selama berjalan tidak menyelisih agama itu lah yang akan dijalankan, kalau ada yang menyelisih agama pasti itu akan terbentuk enggak disini di BAPEDA atau DPR pasti akan terbentur, jadi tidak mungkin lah berbenturan dengan agama.

- 5) Bagaimana dampak dari 2 program kegiatan masyarakat terhadap peningkatan keimanan? (dijelaskan per perprogram)

Jawab:

Kita tidak tau

b. Menjaga jiwa

- 1) Apa saja kegiatan dari program-program tersebut yang dapat meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat?

Jawab:

PTMAS untuk anak sekolah, pemberian bantuan makanan tambahan jadi dalam setahun tiga bulan untuk anak TK.

- 1) Dalam memotivasi masyarakat langkah apa yang dilakukan oleh DPMG?

Jawab:

Selama inikan gubernur kan kita main mengpbulikasikan segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pemerintah gubernunya maupun dinas-dinasnya melalui media sosial itu merupakan salah satu terobosan yang diharapkan masyarakat mengetahui kemudian mau berpartisipasi melalui saran-saran dan kritik-kritik itu diharapkan seperti itu, kalau secara langsung ketika melakukan kunjungan-kunjungan lapangan dengan bantuin itu diberikan motivasi itu yang bisa dilakukan.

c. Menjaga Akal

- 1) Dalam 2 program tersebut apakah diikutsertakan pendidik dalam pemberdayaan?

Jawab:

Ada juga sering bekerjasama dengan universitas syiah kuala berkaitan dengan kayak TTG tadi itu sebenarnya membutuhkan ahli harus tenaga ahli, itulah kita bekerjasama dengan syiah kuala, teknik kemudian yang apalagi sekarang sama UIN, beberapa tahun lalu dengan pertenarkkan dan pertanian ada beberapa program gampong terpadu ada kerjasama dengan dosen-dosen pokoknya dengan ilmuwan-ilmuwan sana lah. Jadi kalau kita membutuhkan dnegan ahli pasti kita akan bekerjasama dengan universitas syiah kuala.

- 2) Ragam kegiatan apa saja yang mengupayakan peningkatan intelektual/keilmuwan warga?

Jawab:

Enggak ada khusus paling kayak pelatihan, kalau emang khusus untuk meningkatkan intelektual tadi enggak ada, tapi kalau untuk meningkat kapasitas untuk meningkatkan ilmu pengelolaan BUMG itu ada dibagian-bagian pelatihan tadi.

- 3) Untuk DPMG apakah ada bimbingan dari pimpinan kepada karyawan? jika iya, bagaimana bentuk bimbingannya?

Jawab:

Dari awal dari kasubig, kabid, kepala dinas, kepala dinas setelah mengajukan ke BAPEDA otomatis kepala dinas akan mempertanggungjawabkan kepada gubernur jadi secara otomatis ketika ada masukan atau saran otomatis dari 3 tahap tersebut sedikit-sedikit masuk, dari kabid gini, dari gubernur nanti ada masukan-masukan atau bimbingan arahan, antar kalaborasi semuanya.

d. Menjaga Keturunan

- 1) Siapa saja yang menjadi target dalam 2 program tersebut?

Jawab:

Yang menjurus kepada individu masyarakat itu kurang programnya yang lebih banyak itu ke lembaga, lembaga dan aparatur gampongnya.

- 2) Apakah perempuan juga terlibat dalam 2 program tersebut? Kalau iya seperti apa keterlibatannya?

Jawab:

Itu kewenangan mereka, kalau mereka memilih perempuan tidak masalah, kemudian kayak di rumah dhuafa yang pengentasan kemiskinan, ada beberapa yang menerima bantuan lansia sudah nenek-nenek, jadi, bisa jadi seperti gitu, tetapi itu bukan menjadi patokannya, patokannya adalah tempat tinggal dia, bantuan rumah kaum dhuafa.

e. Menjaga Harta

- 1) Bagaimana sistem kerja 2 program tersebut sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat?

Jawab:

Kayak saya bilang tadi ketika dia memutuskan mata rantai tengkulak tadi otomatis harga yang di jual tadi, misalnya kayak kalau ada tengkulak tadi dia jual 2 ribu sekilo tengkulak jual lagi jual lagi seharga pembelinya 8 ribu jadi itukan meningkatkan sebenarnya itu harapan dari DMPG, kalau ke pelatihan-pelatihan aparatur dampak ke masyarakatnya otomatis peningkatan pengetahuan aparatur tadi tentang pengelolaan gampong tadi akan, kalau emang diterapkan yang seperti yang diajarkan atau dilatih otomatis pengelolaan gamponya lebih baik, itu balik lagi ke aparatur tadi.

f. Menghilangkan kesulitan dan Kesusahan

- 1) Bagaimana peran DPMG dalam menghilangkan kemiskinan yang ada di Aceh?

Jawab:

Gubernur sebenarnya sangat berharap DPMG ini menjadi distributor dalam pengentasan kemiskinan itulah melalui dengan program-program yang dijelaskan tadi, DPMG mengharapkan kemudian dana desa tadi itu yang diharapkan, dana desa tadi peruntukkannya bisa jadi untuk modal usaha, ekonomi rumah tangga, kembali kesitu semua.

- 2) Apakah dari 2 program tersebut dapat menjadikan masyarakat hidup mandiri dan terbebas dari kemiskinan?

Jawab:

Makanya yang saya bilang tadi kendalanya ada di mindset tadi, tidak di manfaatkan betul-betul contoh dibeilin sapi, sapinya dijual, ya kayak-kayak gitulah contohnya, itu ada program terpadu seperti pengemukan sapi, dengan berbagai cara dijual, ketika ditanya pertanggungjawaban bilangnya mati, segala macam-macam gitu-gitu, sampe berkasus juga pejabat-pejabat kita dipanggil kejaksaan gara-gara itu. Ada juga yang emang betul-betul, dia memanfaatkan ada beberapa gampong yang BUMGnya bagus kayak di Aceh besar, nama gampongnya blang krung dan itu bagus, kemarin baru dikunjung oleh kadis di Bireuen bagus. Modal dulu ada, sekarang motivasi-motivasi pelatihan-pelatihan kemudian balik lagi dari kemauan pengurusnya itu kalau emang dia betul-betul kita Cuma memfasilitasi aja apa yang mereka butuhkan, akan kita link-lingkan lah kalau bahasa kadis-kadis ini, apa ke lintas sektor kita juga ada bekerjasama dengan pertanian.

g. Menjaga dan Memelihara

1) Bagaimana caranya menjaga 2 program tersebut agar terus berkelanjutan?

Jawab:

Palingan kita melakukan monitoring selalu, pelaporan-pelaporan dari kabupaten kota yang turun ke desa, kabupaten kota juga setiap tahunnya harus memberikan laporan kepada kita, ketika terjadi masalah apa perlu turun, turun kita, pembinaan lagi. Kita basisnya gampong jadi kepala gampongnya yang sangat berperan disitu jadi kek dibilang itu pelaporan gampong, kalau gampong pelaporan turun kita kalau masalah dana desa selama ini kan banyak masalah dana desa, ketika ada pelaporan begitu turun tim satkernya, menyelesaikan masalah, kalau emang tidak bisa diselesaikan kalau perlu tahapan-tahapannya kan dalam penyelesaian permasalahan kalau emang tidak bisa juga ya ke hukum jadinya. Karena kalau kita



kan ada aplikasi pemerintah aceh yang berkerjasama dengan yang lapor spanduk, jadi masyarakat bisa melapor apapun permasalahannya, jadi kedinas masing-masing.

- 2) Sampai sekarang ini sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan 2 program tersebut? Uraikan perprogram)

Jawab:

Kalau emang pencapaian keberhasilan lah istilahnya tidak, kalau secara total kita bilang berhasil tidak semuanya berhasil cuma kayak yang saya bilang tadi, pemerintahnya ngesupport bagus, kemauan masyarakatnya bagus itu bisa dia maju, bisa dia berkembang, sebagian besar tidak seperti itu, apalagi kampung-kampung pengalaman yang SDMnya aparat-aparatnya masih kurang, makanya ada perlu pendampingan dana desa.

- 3) Apa standar dan ukuran keberhasilan program kerja yang ditetapkan oleh DPMG atas pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan?

Jawab:

Biasanya secara umum pengentasan umum angka kemiskinannya menurun, peningkatan ekonomi masyarakatnya meningkat, keberhasilan BUMG dia bisa memproduksi atau kayak di Bireuen, BUMG nya memproduksi alat pompa air, jadi disitu jika dia bisa memproduksi, bisa menjual harganya sampe 40-50 juta berunit, bisa jual kedesa lain, desa ini juga bisa membeli alat itu dengan desa untuk kepentingan pengairan desa, ya seperti-seperti itulah.

- 4) Apa tindakan yang dilakukan atas hasil pengukuran dan penilaian keberhasilan program kerja?

Jawab:

Otomatis kan kalau udah berhasil pasti ada apresiasi pertama, kemudian keberhasilnya tidak seratus persen berhasil kayak terakhir kadesnya pergi terakhir ke Bireuen itu ketemu ada pabrik pembuatan pakan ikan itu kali kedua kades mengunjungi itu gunanya untuk meminta saran atau tantangan apa, permasalahan apa yang masih dihadapi, tantangan apa, ketika menampung saran itu akan dicara solusi melalui lintas sektor seperti pertanian tadi kalau emang ada support bantuan bisa disodot kesitu, meningkatkan modal misalnya.

### Narasumber Ketiga

#### 1. Umum

Nama :Siska Vita sari  
Jabatan :Staf Bidang Program  
Masa Jabatan :lima tahun

#### 2. Proses Perumusan Program

##### a. Bagaimana tahapan dalam perumusan program?

Jawab:

Tahapannya pertamanya itu kan kita mencari jadi kita itukan punya setiap gampong itukan ada pendamping desa ya sekarang dia itu udah masuk ke dalam BUMG dia yang pantau sampe dengan alat TTG ini, ketika nanti udah di seleksi siapa-siapa aja gampong-gampong mana aja yang punya alat TTG itu alat teknologi tepat guna, setelah itu baru diadakannya biasanya kami disini itu kayak monitoring, dilakukan monitoring setelah dilakukan monitoring baru kami buat acara kayak pembinaan gitu, setelah itula baru nanti ada acara namanya gelar TTG disitulah nanti terpilih mana yang terbaik.

##### b. Apa saja program dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh DPMG Aceh ?

Jawab:

Ini banyak sekali nanti foto aja ya dek, pembinaan dan perencanaan, terus pengembangan penempatan teknologi disitu juga, teknologi ini mereka itu carik dari semua gampong yang mempunyai teknologi tepat guna itu nanti akan dipilih salah satunya nanti dia akan ada dia kayak sejenis event nanti dia disitu ada pemilihan teknologi yang terbaik nanti dia akan dibuat untuk penunjang, penunjang kegiatan yang ada di gampong contohnya kayak ibuk-ibuk yang lagi viral itu sekarang kayak panjat pinang itukan kita kasih pemudah beliau untuk bekerja, kita mau ngasih apa mesin pengupas pinang jadi enggak pakek dibelah lagi itulah kegiatan dari teknologi tetap guna selanjutnya pengembangan potensi sumber daya, penerapan inovasi, terus selanjutnya pengembangan informasi gampong, penataan dan pengembangan Kawasan, pengembangan gampong binaan, terus pengembangan keuangan gampong, peningkatan kapasitas lembaga masyarakatan, pembinaan gampong tertinggal ini yang tepatnya di yang adek apa tadi? Penanggulangan kemiskinan ya, terus pembinaan lembaga masyarakat gampong, PKK itu termasuk ke dalam dinas ini, masuk ke dalam ini, iya itu aja kalau lebih jelasnya nanti kita ambil soft filenya ya.

- c. Apa saja yang menjadi landasan dan prinsip dalam perumusan program kerja?

Jawab;

Kalau landasannya kakak kurang pasti ya lebih tepatnya tanya sama kak ana, dia itu ada dokumen rensra sama kami dia itu berlakunya lima tahun sekali disitulah rensra dalam kegiatan kami.

- d. Pertimbangan apa saja dalam merancang sebuah program?

Jawab:

Kalau pertimbangan itu lebih ke rapat internal, saya enggak tau

- e. Dalam setiap kali usulan-usulan yang ditujukan kepada pemerintah pusat, apakah semua usulan usulan tersebut mendapat tindak lanjut atau ada usulan-usulan yang tidak terima? Contoh usulan yang tidak diterima/ditolak?

Jawab:

Pasti ada yang ditolak, jadi disetiap SKPA itu, punya tupoksi kerja masing-masing, kalau dinas pemberdayaan masyarakat ini dia hamper, gimana ya? Kalau banyak orang bilang kami ini mencaplok semua kegiatan dinas lain kayak dinas sosial ada di kami kek gitu, terus banyak ada beberapa dinas yang sepertinya kegiatannya sama kayak kami disitulah nanti dibilang ini bukan tupoksinya DPMG, contohnya kayak misalkan nanti gimana ya? Emm membangun rumah masyarakat miskin itu dulu pernah terjadi tapi sekarang kayaknya udah diganti nama kegiatannya.

- f. Siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan program?

Jawab:

Kasubag program, pokoknya pejabat struktural, pelaksananya bidang kalau program hanya menyusun aja.

- g. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan perumusan program?

Jawab:

Strateginya gimana ya, strateginya yang pertama tepat sasaran terus yang dilatih yang dibina itulah, yang dibina tepat sasaran itulah salah satu strateginya.

- h. Siapa yang menjadi prioritas dalam program tersebut ketika merealisasikan program? Bagaimana vcara menentukan prioritas?

Jawab:

Kalau di DPMG sendiri itu diutamakan yang udah udah udah kami membangun bukan dari nol, membina, jadi kami bukan dari nol kalau

dari nol, kami tepatnya kan kami memberdayakan jadi kami mencari sesuatu yang di gampong yang bisa dikembangkan, mungkin digampong itu ada produk kayak kue ade kak nah itukan dia udah pasarnya gitukan, itu kami mengembangkan bukan mencari orang yang miskin ini kami berikan rumah satu enggak.

- i. Bagaimana hubungan atau keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program?

Jawab:

Masyarakat adalah orang yang kita berdayakan.

- j. Bagaimana prosedur sehingga program tersebut dapat tersalurkan kepada masyarakat?

Jawab;

Dia ada melalui geuchik itulah yang kakak sebutin tadi dia ada yang melalui geuchik, ada yang melalui tuhapeut, ada yang melalui perangkat desa, ada yang melalui BUMG begitulah, tapi kebanyakan disini, bukan disini aja ya dek semuanya seluas tau bahwa walaupun ada levelnya masyarakat miskin tapi banyak yang dikasih tau orangnya itu itu aja gitu kan, kalau kita bilang tepat sasaran, enggak dek, semuanya dinas, ada pelatihan disitulah kami tau data-datanya, biasanya disitu kan nantik dia dilakukan kayak ada, apa ya namanya ya? Iya pembinaan disitulah kita lakukan pembinaan, pembinaan itu bukan kami langsung datang monitoring langsung ke lokasi biasanya mereka diundang, biasanya kalau ada acara di hotel kami buat surat undangan untuk datang terus sebelum ke geuchik biasanya kami langsung ke DPMG kota, dari DPMG kota itu kami mereka yang langsung menginformasi kan sama jajaran kayak pak geuchik tuha peut sesuai dengan kebutuhan yang akan kita sampaikan.

k. Bagaimana konsep program peningkatan keberdayaan masyarakat desa?

Jawab:

Kakak kurang tau detailnya, entar nanya sama kak ana

l. Bagaimana konsep pemberdayaan program pengembangan Lembaga ekonomi desa?

Jawab:

Itu BUMG, BUMG itu kayak kakak bilang sebelumnya, digampong itu ada namanya BUMG, semua itu pasti ada dibentuk tetapi antara aktif sama tidaknya itu tergantung masyarakat itu sendiri bukan masyarakat, kelompok itu sendiri karena BUMG itu dijalankan oleh kelompok, jadi BUMG itu kayak dia bukan penampung ya tetapi bisa jadi sebagai penampung pasarnya gampong BUMG itu apa potensi yang ada di gampong itu dipasarkan ke BUMG, BUMG itulah bisa dipasarkan karena kalau masyarakat itunya sendiri kan keterbatasan ya dek apalagi ibuk-ibuk mana tau dia sosial media, itulah gunanya BUMG.

m. Apa tantangan yang dihadapi DPMG dalam progrja kerja yang dilakukan?

Jawab:

Tantangannya gini kami kan kalau buat program kegiatan itu kadang udah sesuai ternyata kami itu bukan jadi tupoksi kami jadi kami harus ngulang kembali, harus bentuk kembali terkadang sampai 2020 itu program kegiatan kami itu belum sesuai dengan tupoksi dinas itu sendiri tapi 2021 ini dengan bantuan pak kadis pak kadis itu pindahan dari bapeda jadi lebih tau disitulah jauh lebih baik disitu nanti ada gampong diciptakan nantik kegiatan pengembangan gampong, tematik itu nantik kayak kakak bilang tadi produk yang ada di gampong itu akan dikembangkan lebih luas lagi itulah sekarang ini enggak ada dari beberapa, ada beberapa kegiatan nanti akan diperkecil lebih diutamakan

untuk membangun atau mengembangkan masyarakat miskin menjadi lebih rendah.

### 3. Maqashid Syariah

#### a. Menjaga Agama

- 1) Apakah program-program di DPMG mempertimbangkan dari sisi syariah atau agama? Jika iya, panduan apa yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat?

Jawab:

Iya sudah pasti, program yang mempertimbangkan agama ya kalau disuruh jelaskan kakak enggak tau menjelaskan gimana ya dek karena selama kakak disini semuanya yang kami latih, yang kami kasih pembinaan setiap kami kasih acara muslim kecuali kalau kami mau bekerjasama untuk ada kayak tahun 2020 ini kami mau membuat apa ya? Emm gampong tematik dari beberapa kabupaten, kabupaten kota yang terpilih itu ada ambil referensi dari kalau enggak salah apa ya? Itu kakak kurang jelas adek tanda aja nanti kakak, oh balaisurah, balaisurah itu organisasi mereka gitu.

- 2) Apakah tokoh agama diikutsertakan dalam program-program tersebut? jika iya apa perannya?

Jawab:

Sudah pasti kalau kita ada kegiatan palingan ikut sertakan ketika pembukaan dengan baca doa itu tapi kalau untuk yang kayak khusus itu enggak ada, entar khusus 2021 itu ada kegiatan Baitul maal, itu 2021 ada kegiatan itu.

- 3) Kegiatan keagamaan apa yang sering dilakukan dalam merealisasikan program?

Jawab:

Oh itu enggak ada

- 4) Bagaimana dampak dari 2 program kegiatan masyarakat terhadap peningkatan keimanan? (dijelaskan per perprogram)

Jawab:

Kakak kurang tau kalau masyarakat internal dari gampong, mungkin dari kayak tadi itu BUMG gitu kan, mungkin ada menyumbangkan ke masjid mereka merenovasi, itu kami kurang tau itu dari gampongnya sendiri atau DPMG kabupaten kotanya sendiri yang tau kan soal keagamaan.

b. Menjaga jiwa

- 1) Apa saja kegiatan dari program-program tersebut yang dapat meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat?

Jawab:

Itu kemungkinan ada, kemungkinan besar adanya dalam PKK, karena mereka itu banyak program kegiatan mereka ada kan, ada di PKK

- 2) Dalam memotivasi masyarakat langkah apa yang dilakukan oleh DPMG?

Jawab:

Sebetulnya itu salah satunya itu dari yang Teknologi Tepat Guna yang acara TTG event, yang salah satu acara seperti itu kan biasanya besar paling lama ada 5 hari kegiatan itu, itulah untuk memotivasi masyarakat kalau misalkan dalam BUMG gampongnya itu ya kalau misalkan kita udah pembinaan misalnya kayak bu disini potensinya apa namanya? Pembuatan kue atau anyaman apa, kadang enggak banyak ya orang ini, kecuali emang ada kelompoknya sendiri, dari kelompok itulah nanti kita kembangkan sampai satu gampong itu jadinya kesibukannya itu sama, ya lebih kurang gitu lah.



c. Menjaga Akal

- 1) Dalam 2 program tersebut apakah diikutsertakan pendidik dalam pemberdayaan?

Jawab:

Oh disertakan dosen biasanya, gini contohnya itu kayak 2021 nanti itu kita ambil dari beberapa referensi dosen, organisasi, kek mana sih caranya yang mudah untuk menanggulangi kemiskinan, atau mengembangkan gampong-gampong yang tertinggal kayak gitu, pasti mereka kasih referensi disitulah kami pertimbangkan lagi kegiatan-kegiatan yang direkomendasikan oleh mereka, jadi kami tahun-tahun sebelumnya kurang, tapi tahun ini banyak ngambil referensi dari dosen juga.

- 2) Ragam kegiatan apa saja yang mengupayakan peningkatan intelektual/keilmuan warga?

Jawab:

Emmm ragam keilmuan, ada ada, tapi kurang lebih ada yang intelektual tapi 50% tidak nyampe lah.

- 3) Untuk DPMG apakah ada bimbingan dari pimpinan kepada karyawan? jika iya, bagaimana bentuk bimbingannya?

Jawab:

Oh ada, itu biasanya bimbingannya langsung ke pejabat strukturalnya, kayak ke kakak staf, itu kurang tau juga tau juga, kecuali kalau kakak jadi operator di acara rapat, bimbingannya paling emm gimana ya emm dipastikan lagi kegiatan-kegiatannya sudah tersalurkan dengan tepat, kayak rapat internal itu, rapat rutin biasa ada lah, tapi pada umumnya yang tau pejabat struktural.

- 4) Dalam merealisasikan 2 program tersebut apakah membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi yang diberdayakan? Jika iya bagaimana bentuk pelatihannya?

Jawab:

Untuk stafnya enggak ada, enggak ada pelatihannya, kalau untuk gampong ada itulah dengan program kegiatan yang kita lakukan selama setahun itu pasti ada.

d. Menjaga Keturunan

- 1) Siapa saja yang menjadi target dalam 2 program tersebut?

Jawab:

Enggak ada ditentukan

- 2) Apakah perempuan juga terlibat dalam 2 program tersebut? Kalau iya seperti apa keterlibatannya?

Jawab:

Enggak ada sih itu ada di dinas sendiri dinas pemberdayaan perempuan, tapi kalau untuk PKK itu ada, kemungkinan besar pasti ada.

- 3) Bagaimana sistem kerja di DPMG dalam pemberdayaan masyarakat melihat dengan berbagai umur yang ada di desa?

Jawab:

Enggak dilihat enggak ada, kami enggak ada melihat usia untuk dilakukan pengembangan potensi itu enggak ada, kami melihat misalkan dalam satu gampong itu satu kelompok memiliki potensi produk unggulan, mau disitu ada anak-anak mau disitu ada lansia, kalau mereka masih bisa dalam bekerja, semuanya sanggup bekerja, semuanya, enggak ada kami pilih-pilih.

e. Menjaga Harta

- 1) Bagaimana sistem kerja 2 program tersebut sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat?

Jawab:

Itulah yang tadi kayak kita bilang melakukan pembinaan, ada BUMG, yang produk unggulan gampong, dari situlah semua.

- 2) Apakah ada kerja sama dengan pihak lain dalam mengelola dan mengembangkan harta?

Jawab:

Enggak ada sih

- 3) Bagaimana dampak dari 2 program tersebut terhadap peningkatan perekonomian Gampong secara umum?

Jawab:

Ada berdampak positif tapi tidak semua gampong, enggak semua gampong gimana ya peduli terkadang ketika kita melakukan pembinaan ini bisa bukannya disini bukannya potensinya perikanan, coba ibu buat misalkan ikan asap gitu, itu enggak semuanya, mungkin ada beberapa orang melaksanakan produk itu sesuai dengan gampong tapi in kalau satu dua orang itu enggak ini, paling nanti dikonsumsi oleh masyarakat sekitarnya aja, tapi ada juga yang memang udah di jual dalam wilayah luas ada.

f. Menghilangkan kesulitan dan Kesusahan

- 1) Apakah dari 2 program tersebut dapat menjadikan masyarakat hidup mandiri dan terbebas dari kemiskinan?

Jawab:

Masih ada yang tidak bisa mandiri, penyebabnya salah satunya mungkin kelompok biasanya kalau udah dilakukan pembinaan itu pasti ada bantuannya kalau misalkan uangnya habis udahlah sampai disitu aja gitu, enggak semuanya masyarakat itu amanah

dek, kayak beberapa tahun lalu kami ada kasih bantuan sapi, ternyata banyak yang individual menjual sapi itu gitu, itulah yang membuat mereka enggak mau itu bukan dari dinasnya, kalau dari dinas sih setiap tahunnya ada dana untuk mereka, tetapi merekanya aja yang tidak mau menjalankan sebaik mungkin sehingga statusnya sama saja. Pendampingannya sampai pelaporan satu tahun dua tahun lancar selanjutnya itu udah mulai collab, pasti nanti alasannya ada yang dicuri hilang, segala macam sampai ada pelaporan masyarakat lain, individual lain, dari KK lain bahwasanya sapi itu sudah terjual, di backlist biasanya kan, enggak akan dibantu lagi.

g. Menjaga dan Memelihara

- 1) Bagaimana caranya menjaga 2 program tersebut agar terus berkelanjutan?

Jawab:

Mengatasinya yang untuk 21 itu kan dek direncanakan untuk tidak memunculkan uang tetapi memunculkan komposisi yang dibutuhkan disitu produk unggulanya yang bagusnya untuk tanman encek gondok misalkan itu langsung apa yang dibutuhkan masyarakat, itu dibuat RAB nya apa-apa aja, kami semua yang sediakan, jadi mereka tidak memegang lagi uang, itu sih yang akan dicoba tahun 2021 karena kalau dalam bentuk uang pasti terjual enggak ada udah habis.

- 2) Sampai sekarang ini sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan 3 program tersebut? Uraikan perprogram)

Jawab:

Kalau sekarang ini sudah tahap ini ya kalau tercipta sesuatu yang giman ya sekarang udah tahap itu udah mulai hamper dikatakan bisa bisa mandirilah, ada beberapa gampong yang udah mandiri, tapi kalau kita buat persen itu enggak sampe 50% jadi ya gitulah kembali

lagi sama kabupaten DPMG kotanya itu mereka ikut serta mereka biasanya semua kegiatan yang akan dilakukan provinsi itu ada berkaitan dengan DPMG kabupaten kota, kalau kami mau monitoring DPMG kota kegiatan bukan kegiatan kalau mau monitoring beberapa gampong untuk melihat bantuan yang diluncurkan kita harus melalui kabupaten kota dulu.

- 3) Apa standar dan ukuran keberhasilan program kerja yang ditetapkan oleh DPMG atas pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan?

Jawab:

Mandiri, pembinaannya yang kita lakukan itu dari mulai pembinaan awal terus pemantauan sampai dia bisa mandiri untuk melaksanakan kegiatan bukan kegiatan pembinaan dari program yang ada di gampong itu misalkan mereka punya produk, produk tersebut sudah tersebar luas, masyarakat semua sudah beli, bukannya hanya masyarakat di gampong itu saja misalkan masyarakat kecamatan darul Makmur, bukan hanya satu kecamatan itu saja yang sudah mulai menikmati atau membeli produk gampong tersebut tetapi sudah lebih dari satu kabupaten itulah dikatakan biasanya sudah berhasil.

- 4) Apa tindakan yang dilakukan atas hasil pengukuran dan penilaian keberhasilan program kerja?

Jawab:

Itu biasanya kita tinjau lagi kampong mana yang akan kita bina lagi untuk berkembang mandiri yang seperti sudah terlaksana, makanya kalau DPMG itu pilih gampong atau beberapa kabupaten kota yang benar-bener sudah ada produknya kayak gitu bukannya yang nanti kita buat ini mikir dulu terencana duku itu nggak, menang udah berjalan kita tinggal mengembangkan saja jadi bukan dari nol.

Narasumber keempat

1. Umum

Nama : Ruksanah  
Jabatan : Sekretaris  
Masa Jabatan : Selama 14 tahun

2. Proses Perumusan Program

a. Bagaimana tahapan dalam perumusan program?

Jawab:

Tentu yang pertama sekali kita menentukan unggulan, jadi namanya kami misalnya di kegiatan ada namanya gampong percontohan tematik jadi kita untuk membuat ini sesuatu ini kemudian berkembang dan kemudian dicontoh oleh kampung orang lain, orang lain kan melihat ini kan keberhasilan dari yang sudah ada, jadi namanya kita blok project jadi kita enggak namakan blok project jadi kita enggak namakan blok project gampong percontohan tematik, menurut gampong, gampong menurut potensinya yang potensinya kerajinan yang potensinya memanfaatkan tanaman obat yang potensinya nya memakai membuat industri bukan produk industri home made makanan seperti kerupuk gitu ya, bagaimana caranya kita merumuskan itu pertama kali setelah kita tentukan judul inikan untuk provinsi untuk 23 kabupaten kota jadi untuk bisa misalnya untuk pengetahuan dasar yang ada kita dasar sekarang kayaknya misalnya di sumur itu banyak ikan, di bireuen itu misalnya ada daun kelor kemudian ada mesin pellet ikan kemudian kita kunjungi kita turun lapangan kemudian kita identifikasi jadi yang sudah ada ini, kemudian apa kira-kira yang dapat kita sumbangkan, apa yang dapat kita intervensikan kegiatan oleh kita lagi supaya lebih berkembang misalnya ini di Bireuen kemarin kita liat pellet ikan, di Bireuen sudah ada mesin pellet ikan, kita perlu kali pellet ikan, karena pellet ikan selama ini kata dapatkan dari Medan harganya sudah mahal

padahal produk bahan baki pellet ikan dari kita, kemudian mereka mesin pellet ikannya sudah ada, prduknya sudah ada, pasarnya sudah ada, apa yang ingin kita intervensikan kita akan tambahkan lagi mesinnya biar agar, kemudian kita juga mengajarkan bagaimana bisa menjual barang ini melalui BUMG, BUMG kan usaha milik gampong jangan peorangan, kalau sudah ada di BUMG nanti melalui lewat online misalnya begitu, kemudian turun lagi misalnya kayak kemarin kita turun daerah tanjung keramat di langsa ya di yaitu sudah itu, Sudah dibina oleh Lembaga asing ada juga masuk kesitu dalam rangka penyelamatan hutan bakau, penyelamatan hutan bakau tapi kemudian harus memilih alternative pekerjaan lain kepada masyarakat mereka memotong bakau untuk mencari sesuap nasi kalau kita tidak kasih apa yang akan kita kerjakan dari situ ada kedondong apa namanya sebetuk siput lah, siput itu bebas siput itu sebagai gulma di ikan, di bakau itu untung ada tambak-tambak kalau tambak dia sebagai gulma jadi dia hidup di daerah baku juga tambak kemudian diolah siput itu menjadi kerupuk siput kerupuk kedondong jadi kemudian kami turun kesana bagaimana kita jajaki, kita identifikasi selevel mana usaha itu sekarang, ternyata usaha itu terkendala dengan produknya yang masih minimal, kenapa? ternyata mereka belum punya alat mesin yang untuk mengolah tepung hanya kecil itu sebetuk ampia kita lah nanti jadi sekarang yang dapat kita lakukan itulah sama halnya kita akan mengintervensi kegiatan-kegiatan kita di tempat mereka lah membeli alat mereka yang lebih bagus mengajarkan mereka menggunakan alat itu kemudian produknya sudah banyak kemudian memperkuat membina BUMG agar melalui BUMG ini kerupuk kedondong ini bisa dijual, bisa dijual ke pasar bebas, kemudian nanti mislanya ditempat lain kita sudah meihat jadi pengempakannya yang kurang jadi kita kan berupaya akan membuat mesn pengempakannya yang bagus dengan kualitas yang mutu bahan itu kueh misalnya, ini misalnya agak cepat ini dan ini agak cepat berjamur karena pengempakannya yang kurang

sempurna, untuk daerah tersebut gampong tematik untuk daerah tersebut akan mengintervensi kepada pengempakan, peningkatan mutu produk kemudian peningkatan pengempakan yang menarik ujungnya tentu pemasaran yang lebih luas agar supaya pendapatan mereka dapat bertambah signifikan seperti itu, soalnya juga seperti saya katakan tadi yang pengentasan masyarakat miskin itu dengan budidaya lebah madu itu juga mungkin kita datang kesana apa yang kita lakukan tiram apa yang kita dapat intervensi, tiram itu benar-benar dapat lebih banyak, dapat lebih luas pasarnya, jadi kita intervensikan satu-satu baru kemudian kita rebutkan ini, ini, ini, baru yang harus kita lakukan itu agar supaya mereka betul-betul berdaya begitu.

- b. Apa saja program dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh DPMG Aceh ?

Jawab:

Inikan program penanggulangan kemiskinan DPMG ini berubah terus artinya sesuai dengan dengan visi misi gubernur dulu pernah pernah yang namanya KOB misalnya, MMK, terus dia bergulir terus ada BK PMG bantuan keuangan pemakmu gampong walaupun hanya 10 juta pertahun kemudian sekarang setelah itu enggak adakan kita udah ada dana desa sekarang, dana desa ada karena lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pemerintah desa adalah pemerintah dalam republik kesatuan Indonesia jatuh padanya berhak adanya APBN oleh karena itu sekarang desa kekuatannya bagus power desa sekarang punya uang dia punya lahan dia punya masyarakat dia punya pemerintahan yang diakui legitimit kemudian dia juga punya uang jadi sekarang desa emang bersinar kemudian apa program kita di dalam ini? Mereka kan sudah punya uang tentu dengan pembinaan-pembinaan, pemerintah pusat juga kasih uang kemereka juga tidak lost begitu, dia juga diwajibkan kabupaten kota untuk memberikan dana sharing sekian dari pusat sekian dari daerah, di daerah ini nanti menjadi dana-dana



insentif pengelola keuangan oh pengelola pelaksanaan pembangunan dan pemerintah di gampong-gampong kemudian di kita dengan APBA kita juga melakukan berbagai-bagai upaya untuk mendampingi desa agar mereka memang bisa mandiri dengan kekuatan sekarang yang ada di desa disini ini ada beberapa bidang misalnya ada pemberdayaan ekonomi gampong disini nanti ada BUMG badan usaha milik gampong yang kita membina Lembaga BUMG ini Lembaga ini tentu sudah dimulai dari dulu tapi sekarang membina masyarakat gampong itu juga butuh kesabaran barang kali kita juga memperlihatkan contohnya dulu nanti baru desa-desa lain akan ikut, pembinaan BUMG gampong ini juga program strategis pemerintah Aceh dimana pemerintah Aceh juga mewajibkan mewajibkan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Aceh agar CSRnya dibagikan ke BUMG-BUMG ini kemudian ada pengentasan masyarakat miskin dibidang ekonomi tadi keduanya ada, ini ada usaha misalnya di tahun 2021, tahun ini enggak ada lagi kita enggak ada lagi dana, dananya sudah dialihkan ke covid semuanya misalnya nanti akan ada budidaya lebah madu jadi nanti kita akan ada intervensi kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat miskin selama ini kita intervensi lagi agar mereka lebih mekar agar mereka lebih lebih apa namanya ya lebih berkembang, kemudian ada satu lagi dana desa, dana desa yang sudah ada itu juga ikut dibina oleh provinsi sebagai bimas sebagai pembinaan dan pengawasan karena pemerintah pusat juga menyertakan dengan apa namanya pendamping desa ada pendamping ahli ada tenaga ahli ini, ada infrastruktur ada kemudian layanan sosial dasar ada ekonomi ada fisik prasarana mereka juga ikut mendampingi dan ada PLD dan Pd semua mereka ini ribuan jumlahnya ada 2737 orang di provinsi Aceh ini mereka semua bergelut dengan masyarakat desa yang mereka mengawasi atau mendampingi supaya mereka pemerintah desa itu menggunakan dana desa itu sesuai dengan patrun yang diberikan, kemudian ada lagi lembaga kemasyarakatan, dibidang kemasyarakatan ada beberapa Lembaga yang menjadi

pembinaan mereka misalnya ada PKK ada LPM ada posyandu ada karan taruna ini LPM apa tugas LPM salah satunya adalah dia menjadi bahagian dari tim perencanaan desa untuk desa merencanakan pembangunan desa direncanakan oleh masyarakat desa dengan bersama-sama tidka boleh, harus aspiratif, kooperatif, partisipatif, sehingga pembangunan semua yang dianggap perlu di desa itu tidak hanya diputuskan oleh pemerintah desa saja tapi bersama-sama dengan Lembaga kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan yang pak geuchik dan pak kades semau di lembaga pemerintah jadi itu menjadi tugas kita juga di lembaga kemsyarakatan sebagai sebahagian dari perencanaan desa kita kuatkan rencananya kita berikan apa namanya muatan, pengetahuan bagi mereka bagaimana bahwa membangun desa itu harus bersama-sama karena sesuai dengan amanah undang-undang dana desa itu adalah pelimpahan dari kewenangan pemerintah selama dulu itu dulu pemerintahan sekarang diserahkan kepada desa yang iyanya kemudian direncanakan dilaksanakan diawasi oleh kita masyarakat desa keseluruhan kemudian ada bidang pemerintahan jadi pemerintahan disini dia tugasnya adalah memperkuat lembaga pemerintahan sebagai pemerintah terkecil dalam negeri kesatuan repbulik Indonesia ini memakai patrun nasional ya kalau lembaga kemasyarakatan nanti ada kearifan lokalnya kemudian nanti ada juga bidang TTG teknologi tepat guna kita juga, kita juga memberikan motivasi agar masyarakatnya berinovasi menemukan teknologi-teknologi sederhana yang dapat membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang padi misalnya kalau yang di lokasi padi apa yang dapat dihasilkan dengan teknologi sederhana itu dapat memudahkan pengerjaan sawah itu oleh masyarakat ada pula di daerah perkebunan pinang misalnya ditemukan teknologi penumpas pinang yang nila bagaimana menghasilkan minyak, ini banyak banyak sekali inovasi ini kita juga salut kepada masyarakat kita tapi banyak juga yang belum terekpos lagi kita di Aceh ini tahun kemarin kita nomor 34 enggak ada inovasi dikit, padahal cukup banyak

Cuma kita belum terekos tetapi secara nasional kita juga pernah dapat juara kedua di TTG nasional lomba inovasi alat-alat teknologi tepat guna, jadi itu menjadi keseluruhan tupoksi yang ada di DPMG.

- c. Apa saja yang menjadi landasan dan prinsip dalam perumusan program kerja?

Jawab:

Inikan sebenarnya kalau kita tanya seperti landasannya sudah ada kemendagri, kalau dulu kemendagri nomor 13 tahun 2000 nomor 6 tahun 2013 kalau sekarang 90 tahun 2019 ya ini sudah ada, nomenklturnya sendiri udah ada tapi kita kemudian kita menterjemahkan sesuai dengan kebutuhan daerah nomenklatur programnya sudah ada. Kemedagri tetap itu tetapi dia tidak kaku misalnya apa judulnya gampong tematik misalnya dia pengembangan Kawasan judulnya nanti di dalam pengembanan Kawasan itu kita bisa olah berbagai- berbagai sub kegiatan, kegiatan nomenklatur itu kan diprogram dikegiatan, disub sub kegiatan, kita nanti kita upayakan supaya program kita itu, kta tetap ikut nasional tapi nanti tetap ada nomeklatur-nomeklatur daerah yang tidak kaku, menjadi misalnya apakah namanya gampong percontohan tematik enggak ada tetapi apa judulnya itu? pengembangan kawasan secara nasional pengembangan Kawasan.

- d. Dalam setiap kali usulan-usulan yang ditujukan kepada pemerintah pusat, apakah semua usulan usulan tersebut mendapat tindak lanjut atau ada usulan-usulan yang tidak terima? Contoh usulan yang tidak diterima/ditolak?

Jawab:

Kalau kita ikuti prosedur tidak ada pastinya, tidak ditolak, kecuali kayak tahun ini enggak ada dana karena covid itu enggak asi lagi, tapi kalau emang kita melakukan sesuai dengan nomeklatur untuk kita, untuk

DPMG sudah ada nomenklatur apa saja, jadi tidak kemudian kita membuat itu tanpa dasar, ada dasarnya dan ini dijudul besarnya program kegiatan, di sub kegiatan dan sub-sub kegiatan menyesuaikan, kan tidak mungkin sekarang kita sekarang pendidikan ya, kemudian kita DPMG, DPMG ini kesannya kita mengambil alih pekerjaan-pekerjaan lain, tetapi kita skopnya dalah membina gampong, apa saja yang ada di gampong tapi masih misalnya sekarang kita melancarkan apa namanya atau membuat konstruksi untuk jembatan, dan tidak mungkin kita laksanakan itu pasti ditolak, tapi asal itu masih ada di dalam koridor tupoksi kita, tak akan sama, sesuai dengan dana yang tersedia, misalnya kalau orang PU menanam padi pasti ditolak tidak ada nomenklatur tidak tau dimasuk kemana bukannya ditolak waktu kita masukan dia tidak masuk karena kamarnya salah, asal kamarnya betul no problem iya tapi kita tetap terbatas anggaran tetapi saya pikir kita tidak dengan anggaran, tetapi kita adalah membuat dengan bagaimana anggaran sekecil-kecilnya maksimal.

e. Siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan program?

Jawab:

Semuanya dilibatkan, semua orang dilibatkan ini masing-masing kan ada bidang, ada kepala bidangnya, kepala bidang bersama kasubidnya, ini kepala bidang bidang, ini kasubidnya, kasubidnya lebih rinci lagi dia soalnya kayak tadi pengembangan ekonomi masyarakat gampong dia dan kasubidnya BUMG ada kasubid pengentasan kemiskinan, ada kasubid pembinaan dana desa jadi masing-masing kasubid ini dengan stafnya dia berkolaborasi ini untuk menemukan data-datanya untuk merumuskan persoalan-persoalan yang menjadi tupoksinya, nanti baru dia kumpul di bidang setelah kumpul dibidang baru naik ke program kita rapatkan bersama pak kadis.

f. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan perumusan program?

Jawab:

Arti tahapan kita bagaimana merencanakan masuk sampai tahap kedalam masuk kedalam rencana ke DPA dokumen perencanaan peranggaran 2021 tahapannya seperti saya bilang tadi mencari data lapangan, menemukan data lapangan, kemudian menentukan intervensi data apa dan kemudian masuk ke DPA kegiatan intervensi adalah a b, c kalau sudah seperti itu didalam dokumen DPA 2021 yang akan disahkan pada desember 2020 itu sudah ada, jadi 2021 tinggal actionnya aja, disitu sudah rinci kapan akan laksanakan dari tahapan kegiatan a dari bulan 1 kuartal 1 kuartal 2 kuartal 3 kuartal 4 itu semuanya sudah tercantum jadi kita hanya melaksanakan saja ini tahap perencanaan di juni ini, ini RKA kemudian nanti ada pembahasan RKA bersama DPR, pembahasan RKA bersama TAPA untuk menuju kepada DPA setelah RKA itu jadi lengkap, sempurna, tertanda tangani baru kita rubah, jadi kita sempurnakan ke DPA, setelah DPA tidak ada halangan apa-apa untuk dilaksanakan karena di DPA udah ada qanun, kekuatan hukumnya sudah mutlak, qanun ya qanun dari pusat, qanun beberapa tahun lalu, itu adalah mengenai APBA jadi kita melaksanakan itu dengan legalitas yang.

- g. Bagaimana konsep program peningkatan keberdayaan masyarakat desa?

Jawab:

Itu kalau program pemberdayaan, itu program besar, itu program, keberdayaan masyarakat ada dalam npeklatur kemendagri nomor 6 tahun 2013 sekarang sudah berubah itu lagi, tapi ujung-ujungnya juga itu memberdayakan masyarakat tapi sesuai dengan program yang disebutkan tadi sudah diganti nomeklturnya bukan itu lagi, nanti bisa ditanya sama ana, ya mana itu kemdagri nomor 19 tahun 2019 nomor 9 tahun 2019 tidak banyak program kita sedikit cuman, tiga program kegiatannya banyak, banyak sekali seperti dulu bukan.

Narasumber kelima

1. Umum

Nama :Hery Mahyuda  
Jabatan :Staf di Bidang Program  
Masa Jabatan :2005-2010

2. Proses Perumusan Program

a. Bagaimana tahapan dalam perumusan program?

Jawab:

Dia pertama pasti kapan itu apapun itu tetap diidentifikasi dulu apapun masalah, pasti sih, emang sih dari masing-masing bidang dan sesuai dengan tupoksi dia, misalnya bidang pengentasan kemiskinan ya menangani kemiskinan, kayak TTG ya mengenai itu sesuai dengan tupoksi, dia setelah itu baru mengusulkan mengusulkan melalui apa, rencana yang muserbank kan, nanti dari muserbank itu baru dibahas sama anggota pembahas dibahas juga sama anggota DPR, kalau udah disahkan nanti baru jadi, tapi kalau emang yang dianu yang direncanakan programnya enggak sesuai tupoksi orang-orang yang anggota komisi 6, kita naggotanya itu komisi 6, kalau enggak sesuai tupoksi ya ditolak, intinya disitu apapun itu tetap kita melakukan identifikasi dulu identifikasi masalah, kalau udah sesuai dengan tupoksi baru dijalankan kalau tidak sesuai dengan tupoksi itu tidak diterima, ditolak dan tidak terlepas juga dari visi misi gubernur, visi misi gubernur Aceh, disitu ada Aceh careng, banyak ada sekitar belasan gitulah tapi yang sesuai itu baru kita milih kan, kta pilih menjadi tugas-tugas DPMG itu akan sinkron dengan tugas-tugas gubernur jangan jalan sendiri lagi, sekarang dikatakan orang apa visi misi kantor DPMG kalau dulu kan masing-masing kalau sekarang enggak, emang arah ke gubernur langsung apa cita-cita gubernur disitu cita-cita dibawahnya.

- b. Apa saja program dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh DPMG Aceh ?

Jawab:

Program apa? pemberdayaan masyarakat saya nggak ingat kalipun kalau, kalau program penanggulangan kemiskinan itu lebih kegiatan itu, lebih kegiatan, penanggulangan kemiskinan lebih kegiatan, kalau programnya pengembangan lembaga ekonomi gampong habis itu ada beberapa kegiatan yang memang mengentaskan kemiskinan itu berkaitan dengan pembinaan gampong tertinggal dan masyarakat miskin yang sekarang dipegang oleh pak sayed, kalau programnya lebih kesitu pengembangan ekonomi gampong, kalau program lebih kesitu dia, kalau ada program ada beberapa buah memang.

- c. Apa saja yang menjadi landasan dan prinsip dalam perumusan program kerja?

Jawab:

Dari LPJM rencana jangka panjang menengah dari LPJM turun ke renja, kalau rensra rencana saat ini, kalau memang udah ada, itu secara umum kalau habis rensra baru renja renjana kerja itu udah pertahun, kalau renja kan lima tahun dari lima tahun itu ya setahun-tahun harus jalan sama lima tahun itu kadang-kadang pernah itu pencapaian LPJM itu enggak tercapai gara-gara pertahun di LPJM lain kemudian di renjanya yang programnya itu lain-lain sehingga tercapai targetnya nggak tercapai selama lima tahun itu, itu yang sekarang saya tengok udah mulai membaik saya sudah lama di program, kadang-kadang kenapa kayak kemarin itu tiap tahun itu pertengahan tahun selalu ada review rensra karena perbaikan perbaikan balik karena itulah orang itu merencanakan rencana kerjanya tidak sesuai dengan tahapan-tahapan di rensra tadi, sekarang tidak bisa lagi sekarang mulai tahun ini mulai tahun 2020 ini untuk tahun 2021 isian LPJM itu isian RKA itu udah satu sipida sistem informasi penganggaran daerah itu udah, kalau ada item disitu berarti

bisa kita program kalau enggak ada item yang tertera di aplikasi itu enggak bisa, sehingga nanti apa yang diprogramkan dia sejalan sesuai target pencapaian rensra itu tercapai kalau kemarin itu enggak tahun ini lain, tahun dua itu lain padahal di tahun 2 itu diapa di LPJM ngomong A tapi di renja tahun dua itu SKPA mengganggu ke lain sehingga nanti pencapaian akhir rensra enggak tercapai makanya sekarang itulah yang sedang dibenahi enggak bisa lagi, saya lihat udah mulai baik udah mulai mengarah itu dengan menggunakan sistem ini, kemarin karena enggak ada sistem, enggak ada sistem seperti itu makanya lain-lain akhirnya tidak mengarahkan, kalau sekarang sudah mulai baik lah sistemnya itu dia sekarang berarti LPJM habis itu dari LPJM apa yang perlu dibuat bersama kantor nanti setiap tahunkan orang itu buat anggaran, anggarannya itu mengarah enggak ke LPJM.

- d. Dalam setiap kali usulan-usulan yang ditujukan kepada pemerintah pusat, apakah semua usulan usulan tersebut mendapat tindak lanjut atau ada usulan-usulan yang tidak terima? Contoh usulan yang tidak diterima/ditolak?

Jawab:

DPMG contohnya sebenarnya banyak sih dari segi misalnya apa namanya ya kemarin ada usulan apa namanya tapi usulan itu lebih ke aspirasi sebenarnya ditarok di kantor habis itu banyak juga kenapa usulan aspirasi emang tidak sesuai dengan kebijakan kantor misalnya kemarin pembebasan apa tanah wakaf tanah kuburan itu bukan tupoksi DPM jadi ditolak, biasanya itu yang ditolak itu biasanya usulan dari aspirasi orang-orang itukan atas aspirasinya kan di ini terus dimasukan ke sistem diarahkan akhirnya ada yang tupoksi tupoksi mereka itu asal-tunjuk sementara yang dikasih bukan tupoksi dinasnya misalnya kayak tadi kan itu bukan tupoksi kita jadi tidak jalan misalnya apalagi ya ada beberapa buah kemarin lupa yang maksudnya itu bukan tupoksi kita, yang ditolak lagi masjid masjid itu lebih ke badan dayah emang



kalau kita tengok kantor kita ini masyarakat gampong hanya kalau melihat sekilas seolah-olah pekerjaan dicaplok sama DPMG semua padahai itu enggak cuma lain ininya, lain tupoksinya aja dia kalau misalnya teknis baru ke dinas-dinas tapi kalau sifatnya pemberdayaan pendekatannya lebih ke desa dia kita disini pendekatannya lebih ke desa makanya dinas pemberdayaan ini lebih ke desa pendekatannya lebih ke desa itu dia, kalau ini banyak TTG SDA kan ada dinas-dinas lain kayak apa kayak kemiskinan ya ada dinsos ya tapi dinsos lebih ke bantuan dia kalau kita lebih ke pengayoman bagaimana kita mengajak masyarakat bagaimana cara untuk apa pengentasan kemiskinan istilahnya lebih ke pemberdayaannya lah kata dasarnya kan pemberdayaan lebih menberdayakan itu bukan ke teknis nya kalau teknis itu udah ke dinas-dinas terkait yang itu tugas dia ya, yaitu ya macam kami turun ke lapangan kemarin ya ini saya baru turun lapangan kemarin ya masalah gampong percontohan, tematik, itu bisa masuk-masuk ke dinas lain secara teknis istilahnya kalau kami hanya sebatas pemberdayaan bagaimana masyarakat itu nanti sejahtera, dengan adanya pemberdayaan inilah kita lakukan itu, itu aja sebenarnya.

e. Siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan program?

Jawab:

Kalau perumusan program itu tentu saja kalau secara internal itu pasti semua pejabat eselon, semua pejabat eselon dia tetap, namun tentunya kalau pejabat eselon tentunya apa perlu bantuan apa mungkin saja memakai tenaga ahli kalau kita ada beberapa tenaga ahli termasuk di ini emang kita pakek tenaga ahli semua kayak di satker tapi itu APBN kan pakek pedamping gampong, itu pakek itu dia, tapi kalau disini pejabat struktural semua, makanya dia harus penuh dengan cita asal mengusul begitu tapi dia penuh dengan pertimbangan penuh dengan referensi dasar-dasar yang akan dia lakukan itu memenuhi masuk akal nah, dan emang itu tupoksi dia, yang terlibat cuman itu yang dari eselon 4 ke

musyawarah sama eselon 3 nya kabid, kabid kadis, sesuai dengan tupoksi baru setelah itu jalan kan ada RKA namanya rencana kerja ada pra RKA lagi disitulah kita masukan program kita apa aja, itulah lingkungan kita ini baru ini ada pembahasan, pembahasan itu ada BAPEDA ada di DPR ada di keuangan tiga itu dibahas disitu kalau emang udah oke baru nanti bisa dijalan jadilah dia DPA, baru bisa kita jalankan program itu sekarang malah lebih jauh saya tengok kemarin hanya sebatas outpun kan misalnya ada bantuan misalnya bantuan sapi kemarin itu setelah kita bantu masyarakat ini habis enggak ada lagi, itulah apakah sapi itu dengan alasan dijual, sakit karena habis itu mati tapi terserah orang itu nanti sampek kita kasih aja, sekarang enggak lagi seperti itu sekarang stelah kita kasih sapi, sapi itu dia sampe beranak sampe bisa dikembangkan bisa mendapatkan manfaat kelompok masyarakat yang apa menangani masalah itu yang kita kasih bantuan itu, sekarang itu emang enggak main-main lain sampe ke impact sampe ke benefitnya malahan, sampe mnerima manfaat, manfaat terakhirnya sampe kesitu sekarang karena kalau enggak sampe segitu banyak indikator kinerja kinerja kita itu banyak yang enggak pas kalau banyak indikator nya enggak pas isi-isi bakalan di teliti oleh orang itu, misalnya ditolak ukur target pencapaiannya apa tingkat kepuasan masyarakat tolak ukurnya tingkat kepuasan masyarakat, ini yang rutin.

f. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan perumusan program?

Jawab: 16.00

Tentunya ini harus partisipasi dan apa namanya proaktif inilah pejabat harus betul-betul apa ya? disesuaikan dengan keadaan Sekarang karena kalau keadaan sekarang ini kan lagi covid kan misalnya sebenarnya kalau kita enggak ada covid anggaran kita banyak karena ada covid ini banyak anggaran yang dipotong ke covid sehingga misalnya kalau ada mengadakan pelatihan yang sebelumnya 200 orang misalnya jadi 100

orang, kita harus menyesuaikan juga dengan ini dengan kondisi sejauh mana program telah terlaksanakan.

- g. Siapa yang menjadi prioritas dalam program tersebut ketika merealisasikan program? Bagaimana vcara menentukan prioritas?

Jawab:

Prioritas kan pasti kita subyeknya ya, subyeknya masyarakat miskin habis itu masyarakat daerah tertinggal misalkan pinggiran juga ya subyeknya disitu tentu kita meihat potensi-potensi dia juga yang akan kita kembangkan tentu, masyarakat miskinlah karena tujuan kita kan masyarakat utama, tujuan kedua ya pengembangan ekonomi masyarakat agar dia taraf hidup masyarakatnya mungkin sejahtera sehingga tingkat pengangguran itu tidak ada lebih kemasyarakat miskin subyeknya.

- h. Bagaimana prosedur sehingga program terssebut dapat tersalurkan kepada masyarakat?

Jawab:

Kalau prosedur sebenarnya kita ada SOP ya, berdasarkan SOP itu sistem operasional prosional kita juga ada namanya teknis, ada tingkat professional itu emang dirancang dulu sebelum misalnya kayak ada bantuan, ada segala macam itu terlebih dahulu kita membuat peraturan-peraturannya agar nanti yang kita lakukan dan pengatur sesuai dengan SOP.

- i. Apa tantangan yang dihadapi DPMG dalam progrja kerja yang dilakukan?

Jawab:

Kalau tantangannya sih banyak karena tantangan disini kadang-kadang sebelum disahkan negara, pada saat kemas disitu pas kita sudah buat kegiatan sudah pas nanti terbukti oh ini kurang, oh ini kurang akhirnya

rubah lagi rubah lagi dan terakhir sampek diketok palu sampe anggarannya disitu baru enggak ada bisa lagi kalau enggak dia itu masih aja, masih kepikir apa oh ini ada baru sehingga oaring itu langsung merubah itukan bahkan setelah RKA disahpun masih ada aja yang tertinggal, apakah salah menjumlahkan uang pelatihan itu kayak enggak ada uang sakunya belum di anggarkan akhirnya orang itu enggak bisa laksanakan pelatihan ada tertinggal-tertinggal seperti itu, disitu agak ini sikit ya kalau itu aja Cuma di program, sebenarnya lebih cenderung ke kesini data basenya kalau arah kebijakan mungkin ke atasnya seperti ibuk yang tadi kan beliau sebenarnya lebih ke arah kebijakan beliau sekitatr itu setau saya seperti itu yang saya alami kan habis itu mengenai waktu, waktu emang kau di program ini fulltime sifatnya deadline kalau kita karena apapun yang kita input itu ada batas waktu deadline kalau dibilang orang atas sana gubernuer ini, BAPEDA segala macam ini diinput harus misalnya besok tanggal 20 sedangkan tanggal 20 pukul 23.59 ini itu harus betul-betul telah diinput kalau enggak close, kita harus betul-betul siap disni di program perencanaan ini nah itu dia tantangannya kalau emang dia lupa entar di sistem kan, close, kecepatan kerja emang harus ada kayak merah kuning hijau emang-emang harus sesuai jadwal harus pas itu dia.

### 3. Maqashid Syariah

#### a. Menjaga Agama

- 1) Apakah program-program di DPMG mempertimbangkan dari sisi syariah atau agama? Jika iya, panduan apa yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat?

Jawab:

Tergantung lagi dia sebenarnya program-program yang akan dijalankan kita ini kan visi misi dari gubernur karena pasti sesuai dengan agama lah tidak terlepas dari agama apalagi tugas kita ini memberdayakan masyarakat jadi kita tidak mungkin melakukan

kegiatan itu tidak memberdayakan masyarakat misalnya kayak diluar Syariah itu tidak mungkin pasti itu bertolak belakang dengan orang gampong pas kita buat pelatihan apa, misalnya kita tidak mungkin pelatihan, pasti pelatihan itu yang sesuai dengan syariah lah enggak ada yang enggak sesuai dengan Syariah, ya kek gitu.

2) Apakah tokoh agama diikutsertakan dalam program-program tersebut?

Jawab:

Tokoh agama ya tentunya kayak gitu apapun itu kan menurut saya lihat kan misalnya kayak dan desa atau segala macam pasti yang namanya yang saya tengok di gampong itu yang musyawarah, rencana musyawarah penggunaan desa pasti ada tengku di meunasah, pasti dia ikut andil untuk apa? Untuk meluruskan kegiatan apa yang hendak dibuat sama desanya pasti itu orang kampung itu biasanya dia pasti minta pendapatkan bagaimana, itu tergantung yang kita programkan disini emang secara umum, tapi nanti saya yakin dikampung itu pasti nanti diakmpung sekarang harus terlibat, pasti terlibat kemungkinan besar terlibat apalagi orang kampung kitakan tidak mungkin tidak sesuai dengan Syariah, kan, pasti tidak mungkin lagi.

b. Menjaga jiwa

1) Apa saja kegiatan dari program-program tersebut yang dapat meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat?

Jawab:

Meningkatkan kesehatan kemarin itu ada, PMTAS kan, ya pemberian makanan tambahan anak sekolah itu TK sama MIN aja dan prioritasnya adalah TK TK yang emang istilahnya pinggiran, TK terpencil nah yang sama sekali enggak bukan susah gitukan, masyarakat miskin juga makanya orang itu perlu dikasih juga tetapi

sekarang saya tengok enggak ada lagi. SekarAng udah bantuan apa namanya sudah dialih ke dinas sosial semuanya untuk yang itu, habis itu sekarang stantentinglah kita, penanganan stanting itu udah masuk keini target spesifik dinas, yang dibawah DPMG stanting, posyandu juga, stanting programnya kita hanya semacam apa kembali lagi kita hanya semacam apa ya, pengayoman itu ada bidang khusus bidang LKGAG, posyandu juga disitu kita ada kerjasama dengan kesehatan juga, posyandu itu untuk ingrasi kan, cuma itu posyandu stanting, mengenai itu, untuk kesehatan cuman itu ya.

- 2) Dalam memotivasi masyarakat langkah apa yang dilakukan oleh DPMG?

Jawab:

Disini kita semua banyak pelatihan di kita disini di DPMG lebih banyak pelatihan, pelatihan BIMTEK itulah yang dilatih apakah aparatur desa apakah itu lembaga kemasyarakatan ya, itu emang ada pelatihannya termasuk aparat desa itu geuchik, geuchik yang baru dilantik, segala macam ya ada disitu kita kasih bimbingan kita kasih arahan bagaimana melaksanakan pemerintahan yang bagus sehingga itu dapat di implementasikan oleh orang-orang desa, orang-orang gampong ke desanya masing-masing dengan cara itu, dengan cara membuat pelatihan itulah, ya itu.

c. Menjaga Akal

- 1) Dalam 2 program tersebut apakah diikutsertakan pendidik dalam pemberdayaan?

Jawab:

Oh ada ada termasuk akademis unsyiah termasuk dia, dia ada kita undang juga untuk narasumber. Ya termasuk kami tetapi selama ini tidak ada termasuk kami kemarin tahun tahun dulu kami diprogram

ini ada namanya rapat koordinasi, rapat koordinasi itu setiap tahun satu kali, kemarin waktu tahun lalu ada dipanggil dari ekonomi dari fakultas ekonomi dosen ekonomi, disitu mnjelaskan apa bagaimana tingkat apa namanya ekonomi masyarakat bagaimana seharusnya ya, dan sinkron enggak dengan kegiatan-kegiatan dengan penanganan oragnisasi-organisasi kegiatan-kegiatan yang terlibat itu emang ada diundang kesitu dari ekonomi sering kemarin pak apa namanya pak Effendi, bapak itu emang orang akademik sering kita jadikan narasumber yang apa yang ahli ekonomi sering pada saat rakor kami rakor itu semua DPMG kabupaten kota ngumpul disini membahas apa nanti nanti langkah kedepan yang akan dilakukan oleh DPMG Aceh, biar kabupaten A dan kabupaten B itu lain-lain padahal diakan DPMG juga, dia satu diserah itu.

- 2) Ragam kegiatan apa saja yang mengupayakan peningkatan intelektual/keilmuwan warga?

Jawab:

Kalau kita ada namanya dia kontribusi, kontribusi untuk BIMTEK, untuk BIMTEK serta setiap tahun itu dia ada di minta apa daftar pegawai untuk mengikuti diklat DI PTSN itu emang sebelumnya sudah kita kasih naman-nama ya misalnya dari segi pengarsipan kita kurang arsip, kan ada diminta diklat, itu dikasih orang—orang yang akan mengikuti itu, misalnya orang kurang mampu berkomputer kan nanti kita kepegawaian dia akan mendata orang-orang siapa yang pegawai ini belum bisa mengoperasi komputer sama sekali kan nanti diikutkan diklat komputer informatika biar ini semacam itu tapi kalau keilmuwan di gampong itulah tadi semacam pelatihan kembali lagi kesitu nanti geuchik yang baru dilantik bagaimana cara menjalankan, nanti ada semacam bantuan apa, nanti kalau ada bantuan nanti kan bagaimana cara iniin sapi yang bagus ilmu-ilmu yang sperti itu biar nanti programnya berjalan kayak itu dia.

- 3) Untuk DPMG apakah ada bimbingan dari pimpinan kenapa ada karyawan? jika iya, bagaimana bentuk bimbingannya?

Jawab:

Ya kalau bimbingan disini kami sekarang ada setiap 12 kali ya atau sebulan sekali ya enggak tau pokoknya dua tiga bulan sekali ada itu ada semacam arahan emang dari pak kadis tentang pencapaian-pencapaian program kita sejauh mana dan tindak lanjutnya apa-apa yang harus dipersiapkan sampe kemarin kami setiap staf itu harus betul-betul memahami tupoksinya masing-masing kemarin ya dan apa target-target kegiatan program 2021 itu harus bisa mulai dari sekarang itu baru dua tiga bulan kami ada sama pak kadis itu ada arahan bimbingan seperti itu kalau sama kabagnya ada juga itu pada saat kalau kami diprogram pada saat penyusunan anggaran gitu kan apa yang harus ditinjau apa-apa yang harus dibuat semacam bimbingan seperti itu, ada kalau itu ada.

d. Menjaga Keturunan

- 1) Bagaimana sistem kerja di DPMG dalam pemberdayaan masyarakat melihat dengan berbagai umur yang ada di desa?

Jawab:

Kita tergantung program yang kita buat, kita tidak melihat umur karena disini ada pelatihan-pelatihan itu, berarti orang dewasa dia tapi kalau ada misalnya kayak tadi PMTS itu kan lebih ke anak-anak memberikan makanan, ada kemarin itu bantuan rumah dhuafa ada juga kemarin itu kalau sekarang enggak ada lagi karena ditangani sama dinas lain kalau itu kan orang dhuafa yang tangani sehingga sebenarnya umur itu tergantung dari apa-apa yang kita buat program apa-apa yang kita buat kegiatan misalnya kalau kegiatan itu emang dia lebih ke obyeknya lebih ke anak-anaknya seperti PMTAS tadi kan kalau misalnya kita buat pelatihan, pasti pelatihan itu untuk



orang dewasa jadi dia modalnya apa namanya menyesuaikan lah dengan kegiatannya enggak bisa kita liat dari umur berapa enggak bisa jadi berdasarkan kegiatannya yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan nanti sesuai dengan apa yang kita buat, misalnya untuk siapa untuk orang dewasa, untuk lansia apa untuk anak-anak itu semuanya ada.

e. Menjaga Harta

1) Bagaimana sistem kerja 2 program tersebut sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat?

Jawab:

Ya kembali lagi sebenarnya itu maksudnya kita kembali lagi kita enggak bisa diluar daripada yang telah dibuat oleh sebelumnya itu emang sesuai dengan tupoksinya masing-masing tapi yang pasti kalau emang misi-visi itu yang pas dan cocok dengan DPMG ini misalnya a kita harus menjalankan a, kalau emang dia visi misinya itu b, cocok dengan DPMG ya kita ambil b dan apa tadi termasuk dengan minimal arahan tadi itu dipelatihan-pelatihan itu ada apa namanya program bantuan-bantuan ya, dia nerima bantuan juga disitulah kita apa, kita membimbing memberikan masukan, penyuluhann tadi yang sesuai dengan kapasitasnya misalnya kayak padi tadi kalau emnag dibutuhkan ahli apa apa namanya kita ambil dari perternakan biar masyarakat gampong itu tau dia bagaimana nanti setelah hasilnya itunya enggak apa namanya kita ada ketertarikan semuanya kalau melakukan pelatihan itu misalnya ini lebih ke ke ekonomi nanti pasti kita panggil itu ada ekonomi kita ini kita panggil nanti masyarakat itu tau ekonomi masyarakat yang seperti apa yang diterapkan di kampung ya nanti bisa kita panggilkan, apalagi disini ada PKK juga PKK kan untuk meningkatkan taraf hidup perempuan

- 2) Apakah ada kerja sama dengan pihak lain dalam mengelola dan mengembangkan harta?

Jawab:

Itu emang dengan masyarakatnya

- 3) Bagaimana dampak dari 2 program tersebut terhadap peningkatan perekonomian Gampong secara umum?

Jawab:

Ya pastinya tingkat kemiskinan kan walaupun kita secara nasional tapi secara ini kita sebenarnya naik ya disitu dia, disitu dia, targetnya kalau kita bilang tercapai ya sekarang kan masih dia ini bertahap kecuali bisa saja nanti apa ya kan, ini kan kita masih masa periode dari kita bilang, tapi secraa sekilas kita lihat ini meningkat, menurun maksudnya angka kemiskinan, dari segi apa yang pemerintah aceh itu ada keberhasilan.

f. Menghilangkan kesulitan dan Kesusahan

- 1) Apakah dari 2 program tersebut dapat menjadikan masyarakat hidup mandiri dan terbebas dari kemiskinan?

Jawab:

Kan sekarang bantuan ada beberapa ada BLT, ada segala macam dampaknya sebagian udah bisa sebagian belum juga karena sebagian masih ada apa di masyarakat gampong kita ini apalagi yang pinggiran kan kadang-kadang masih ada anggapan kalau itu uang negara sehingga apa kita ini kita habiskan, orang-orang masih ada tanggapan seperti itu, masih ada mindset yang seperti itu jadi tidak dikembalikan lagi atau kalau misalkan ada disuruh beli tidak dibeli dia ada aja, kalau ada bantuan sapi dijual alasan mati karena anggapannya itu duit pemerintah, tapi ada juga yang berhasil tidak semuanya yang berjalan sampai sekarang itu ada, ada, tidak semuanya.

g. Menjaga dan Memelihara

1) Bagaimana caranya menjaga 2 program tersebut agar terus berkelanjutan?

Jawab:

Ya memang program itu perlu dilanjutkan ya harus dicari solusi kalau misalnya kegiatan itu sudah dipertimbangkan tidak lagi, memang enggak bisa dijalankan tidak usah aja kita buat kegiatan yang lain yang memang itu ini biasanya dilanjutkan ya tergantung itu tadi, setiap tahunnya itu kan punya target masing-masing kalau memang enggak pas bisa aja direvisi yang penting semua itu enggak lepas dari itu.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis di lahirkan di Bireuen pada tanggal 12 November 1997 sebagai anak ketiga dari tiga saudara dari pasangan Bapak Sayuti Ar dan Ibu Nurlaili, saat ini bertempat tinggal di Desa Meunasah baroh Kecamatan Peudada Kab Bireuen Provinsi Aceh. Penulis dapat dihubungi ke kontak ini: 081382497499 atau melalui email: [dewisuciekhai@gmail.com](mailto:dewisuciekhai@gmail.com). Riwayat pendidikan penulis pada tahun 2014-2010 di MIN 1 Peudada, tahun 2010-2013 di MTsN Bireuen, tahun 2013-2016 di SMA Kolombo Yogyakarta, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Selama menjalani masa studi di kampus UII penulis aktif sebagai anggota Marching Band UII menjadi bagian dari Tim Perkusi yang memainkan alat intrusmen Pits, dan juga mengikuti kepanitiaan lain seperti PAB XXXIV UII yang menjadi sebagai transkoman, kemudian juga pernah mengikuti Tamah UII sebagai bagian keamanan, yang terakhir penulis pernah mengikuti LSF 2018 UII yang menjadi bagian Humstrant. Penulis juga pernah magang di Bidang Keuangan Haji Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.

